



MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH-UM.01.01-50  
Sifat : Segera  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kementerian Hukum Tahun 2025

26 Februari 2026

Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
di Jakarta

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum kepada publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum Tahun 2025, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu sekalian, diucapkan terima kasih.

Menteri Hukum  
Supratman Andi Agtas



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025

#bangga  
melayani  
bangsa

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Kompeten,  
Integritas, Loyal, Tanggung Jawab





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon: 021-5252975, Faksimile: 021-5252975

Laman: <http://www.itjen.kemenkum.go.id>; Pos-el: [itjen@kemenkum.go.id](mailto:itjen@kemenkum.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Hukum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 13 Februari 2026

Inspektur Jenderal



Hendro Pandowo





## **Alamat:**

Kementerian Hukum Republik Indonesia  
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

**Phone** : +(62) 5253004

**Email** : [sahabatpengayoman@kemenkum.go.id](mailto:sahabatpengayoman@kemenkum.go.id)

**Website** : [www.kemenkum.go.id](http://www.kemenkum.go.id)

# Pengantar..

Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transparansi kinerja dan anggaran kepada publik berupa *output* yang terukur secara jelas dan *outcome* yang berdampak langsung kepada masyarakat serta menjadi bahan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, Kementerian Hukum memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang Tahun 2025.

Apresiasi layak diberikan kepada seluruh insan pengayoman yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi positif dalam pencapaian kinerja melalui sasaran strategis, program dan kegiatan.

Kedepan, kita lakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjadikan Kementerian Hukum yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dan Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kedepannya.

Jakarta, 27 Februari 2026



**Supratman Andi Agtas**  
Menteri Hukum Republik Indonesia

Tahun 2025 adalah awal perjalanan pemerintahan baru Indonesia yaitu Kabinet Merah Putih, ditandai dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, hukum, ketahanan ekologi, dan pembangunan wilayah, termasuk kebijakan awal seperti percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, efisiensi anggaran, dan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian Hukum adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum. Pembangunan Hukum bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak. Hal ini dilaksanakan melalui arah kebijakan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, serta pelayanan dan penegakan hukum.

Reformasi hukum menunjukkan capaian yang sangat penting termasuk pengesahan UU strategis dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 - 2029, pelayanan administrasi hukum dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan akses keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum terhadap perlindungan hukum yang inklusif dan berkeadilan.





Berdasarkan periode kabinet pemerintahan yang baru, pada tahun 2025 Kementerian Hukum juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra memuat:

- Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
- Arah kebijakan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
- Target Kinerja dan kerangka pendanaan.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025–2029 disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang menyesuaikan dengan Dokumen Renstra terbaru. Sehingga pada tahun 2025, Kementerian Hukum memiliki 2 dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025 Versi Renstra Kemenkumham 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja 23 Oktober 2025 Versi Renstra Kemenkum 2025 – 2029.

Atas dokumen PK yang telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas kinerja dan anggaran Kementerian Hukum pada tahun 2025. Melalui laporan kinerja, Kementerian Hukum dapat memberikan informasi atas capaian dan prestasi yang telah didapatkan serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja yang semakin berdampak.

Harapan ini selaras dengan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden RI yang diturunkan ke dalam visi, misi Kementerian Hukum sebagai berikut:



Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 adalah:

## **"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045"**

Atas dasar tersebut, rumusan visi, misi, dan tujuan Kementerian Hukum untuk tahun 2025–2029 adalah:

### **VISI**

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045."

### **MISI**

1. Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

### **TUJUAN**

1. Meningkatnya pembangunan hukum;
2. Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

# IKHTISAR EKSEKUTIF

“ Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran ”

Berdasarkan transformasi organisasi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, dan tahun 2025 menjadi awal penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra), maka dari itu disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Hukum Tahun 2025 menyesuaikan perubahan.

**Perjanjian Kinerja  
Menteri Hukum Tahun 2025**  
(Berdasarkan Renstra Kemenkumham 2020 – 2024)

**2 Sasaran Strategis  
2 Indikator Kinerja**



**Perjanjian Kinerja  
Menteri Hukum Tahun 2025**  
(Berdasarkan Renstra Kemenkum 2025 – 2029)

**2 Sasaran Strategis  
4 Indikator Kinerja**

- PK Menteri Hukum 7 Januari Tahun 2025 Versi Renstra Kemenkumham 2020 – 2024

| No | Sasaran Strategis                                                                                 | Indikator Kinerja Utama                      | Target     | Realisasi    | Persentase Capaian                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                               | Indeks Kepastian Hukum Nasional              | 3,1 Indeks | 3,6 Indeks   | 116,12%                                         |
| 2  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90 Indeks  | Dalam Proses | Hasil Evaluasi RB belum diterbitkan KemenPAN RB |

- PK Menteri Hukum 23 Oktober Tahun 2025 Versi Renstra Kemenkum 2025 – 2029

| No | Sasaran Strategis                                                                                 | Indikator Kinerja Utama                      | Target       | Realisasi    | Persentase Capaian                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                               | Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum         | 3,39 Indeks  | 3,76 Indeks  | 110,91%                                         |
|    |                                                                                                   | Indeks Budaya Hukum                          | 0,83 Indeks  | 0,81 Indeks  | 97,59%<br>(Penilaian Bappenas 2024)             |
|    |                                                                                                   | Indeks Materi Hukum                          | 0,51 Indeks  | 0,61 Indeks  | 119,60%<br>(Penilaian Bappenas 2024)            |
| 2  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,38 Indeks | Dalam Proses | Hasil Evaluasi RB belum diterbitkan KemenPAN RB |



Jika dilihat pada tabel diatas, rata-rata **capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum Tahun 2025 sebesar 110,88%**, dimana masih terdapat 1 IKU yang belum terdapat realisasi dikarenakan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dikarenakan hasil evaluasi belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB.

Namun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, **Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 sebesar 90,38 (predikat A-) yang mengalami kenaikan 6,75 poin dari Tahun 2023** sebesar 83,63 (predikat A-). Ini menunjukkan kemajuan birokrasi dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Hasil evaluasi ini juga yang digunakan sebagai *baseline* dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya yang dapat dilihat pada dokumen PK Menteri Hukum 23 Oktober 2025.

Selain itu, terdapat 2 IKU yang realisasinya merupakan hasil penilaian tahun 2024 yaitu **Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum**. Kedua IKU ini merupakan 2 dari 5 pilar Indeks Pembangunan Hukum Indonesia. Realisasi tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2024, **dimana pada tahun 2025, 2 pilar tersebut dialihkan kepada Kementerian Hukum khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)**. Terhadap hal ini, Kementerian Hukum akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan akses terhadap keadilan (termasuk perlindungan kelompok rentan) serta melakukan evaluasi kualitas peraturan perundang-undangan, termasuk harmonisasi, sinkronisasi, dan inklusivitas hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam meningkatkan Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum demi pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik lagi.

Selain capaian kinerja, **Kementerian Hukum juga berhasil mencapai penyerapan anggaran sebesar 90,46%**. Penyerapan anggaran ini belum sepenuhnya maksimal dikarenakan adanya pagu belanja pegawai yang berlebih. Besarnya pagu belanja pegawai tersebut diakibatkan pada tahun 2025 jumlah pagu belanja pegawai Kementerian Hukum masih disusun berdasarkan kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, pada tahun 2025 juga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan **Kementerian Hukum mengalami blokir anggaran sebesar Rp1,427,044,881,000**. Walaupun demikian, Kementerian Hukum tetap bisa mencapai target kinerja dan program prioritas nasional.

| Pagu Alokasi            | Blokir                  | Pagu Efektif            | Realisasi               | %      | Sisa                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| Rp<br>4,505,366,379,000 | Rp<br>1,427,044,881,000 | Rp<br>3,078,321,498,000 | Rp<br>2,784,610,931,198 | 90.46% | Rp<br>293,710,566,802 |

Beberapa capaian Kementerian Hukum lainnya, adalah:

**Nilai Indikator Kinerja  
Pelaksanaan Anggaran  
Kemenkum Tahun 2025**



(Nilai Akhir yang diambil dari aplikasi spanint kemenkeu per tanggal 7 Januari 2026)

**Nilai Kinerja  
Perencanaan Anggaran  
Kemenkum Tahun 2025**



(Nilai Sementara yang diambil dari aplikasi monev kemenkeu per tanggal 20 Januari 2026)

Capaian kinerja anggaran tersebut membuktikan bahwa Kementerian Hukum berhasil mengimplementasikan efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja.



Di waktu yang bersamaan, pada tahun 2025 Kementerian Hukum juga berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap **Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebesar Rp733.291.611.188 dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sebesar Rp967.767.568.231**. Dan jika dilakukan perbandingan, jumlah PNBP ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga membuktikan Kementerian Hukum akan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penguatan budaya integritas juga menjadi perhatian utama yang terus dilakukan melalui kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada seluruh unit kerja. Hal ini terbukti bahwa **Kementerian Hukum berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju WBBM terbanyak tahun 2025 dengan jumlah 7 satuan kerja**. Capaian ini bukan sekadar penghargaan, melainkan manifestasi dari kerja keras, inovasi, dan dedikasi untuk memberikan pelayanan publik yang bersih dan prima kepada masyarakat.

Dengan seluruh pencapaian Kementerian Hukum selama tahun 2025, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga tidak lupa tetap diinternalisasikan. Pengawasan kinerja yang harus sesuai dengan koridor serta pemetaan manajemen risiko. Perbaikan proses bisnis maupun layanan berupa modernisasi atau digitalisasi terus dilakukan melalui pengelolaan layanan TIK yang andal. Maka dari itu pada tahun 2025, **Kementerian Hukum juga meluncurkan SuperApps PASTI dengan maksud "Menyatukan Layanan Hukum dalam Genggaman"**. Super Apps PASTI akan menjadi *platform* integrasi seluruh layanan Kementerian Hukum, baik layanan publik maupun layanan internal. Integrasi layanan akan dilakukan secara bertahap dan diperbarui setiap hari yang nantinya akan ada sekitar 450 layanan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait digitalisasi layanan publik.



Tahun 2025 adalah awal perjalanan pemerintahan baru Indonesia yaitu Kabinet Merah Putih, ditandai dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai fondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, hukum, ketahanan ekologi, dan pembangunan wilayah, termasuk kebijakan awal seperti percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, efisiensi anggaran, dan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 sebanyak 48 Kementerian. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang mengalami transformasi menjadi 3 Kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Pemisahan instansi Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan untuk mempertajam fungsi, tugas, dan program instansi. Dengan demikian, setiap kementerian dapat lebih fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing.

Kementerian Hukum adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum. Pembangunan Hukum bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak. Hal ini dilaksanakan melalui arah kebijakan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, serta pelayanan dan penegakan hukum. Reformasi hukum menunjukkan capaian yang sangat penting termasuk pengesahan UU strategis dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 – 2029, pelayanan administrasi hukum dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan akses keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Hukum terhadap perlindungan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

# The Legal Trinity

Penegakan, Pelayanan dan Pembinaan Hukum  
yang Inklusif dan Berkeadilan



# DAFTAR ISI

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                        | iii     |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>                    | vii     |
| <b>DAFTAR ISI</b>                            | xiii    |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                          | xiv     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                         | xvi     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 | <br>1   |
| <i>Latar Belakang</i>                        | 2       |
| <i>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</i> | 3       |
| <i>Maksud dan Tujuan</i>                     | 9       |
| <i>Aspek Strategis</i>                       | 9       |
| <i>Isu Strategis</i>                         | 10      |
| <i>Sistematika Laporan</i>                   | 12      |
| <br><b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>        | <br>13  |
| <i>Rencana Strategis</i>                     | 14      |
| <i>Perjanjian Kinerja</i>                    | 18      |
| <br><b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>     | <br>21  |
| <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>            | 22      |
| <i>Realisasi Anggaran</i>                    | 81      |
| <i>Capaian Kinerja Anggaran</i>              | 83      |
| <i>Capaian Kinerja Lainnya</i>               | 84      |
| <br><b>BAB IV PENUTUP</b>                    | <br>96  |
| <i>Kesimpulan</i>                            | 97      |
| <i>Saran</i>                                 | 98      |
| <br><b>LAMPIRAN</b>                          | <br>100 |

# DAFTAR TABEL

## BAB II

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| II.1 | <i>Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 7 Januari 2025</i>  | 16 |
| II.2 | <i>Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 23 Oktober 2025</i> | 17 |

## BAB III

|        |                                                                                            |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III.1  | <i>Capaian Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2025</i>                             | 21 |
| III.2  | <i>Capaian Parameter Pembentuk Indeks Kepastian Hukum Nasional</i>                         | 22 |
| III.3  | <i>Perhitungan Bobot Parameter Pembentuk Indeks Kepastian Hukum Nasional</i>               | 23 |
| III.4  | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan</i>          | 24 |
| III.5  | <i>Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan</i>                   | 25 |
| III.6  | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Otoritas Pusat</i>                     | 29 |
| III.7  | <i>Indikator Pengukuran Indeks Efektivitas Otoritas Pusat</i>                              | 30 |
| III.8  | <i>Interpretasi Indeks Efektivitas Otoritas Pusat</i>                                      | 30 |
| III.9  | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan AHU</i>            | 33 |
| III.10 | <i>Indikator Pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan AHU</i>                     | 33 |
| III.11 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum</i>          | 36 |
| III.12 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual</i>           | 38 |
| III.13 | <i>Indikator Pengukuran Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual</i>                    | 38 |
| III.14 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</i>             | 41 |
| III.15 | <i>Perbandingan Capaian IKM Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</i>                      | 42 |
| III.16 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Pembinaan Hukum</i>                  | 45 |
| III.17 | <i>Hasil Survei Berkala IKM Terhadap Layanan Pembinaan Hukum</i>                           | 45 |
| III.18 | <i>Perbandingan Capaian IKM Terhadap Layanan Pembinaan Hukum</i>                           | 46 |
| III.19 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Anev PUU</i>                 | 48 |
| III.20 | <i>Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Anev PUU</i>                          | 48 |
| III.21 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepastian Hukum Nasional</i>                       | 50 |
| III.22 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkum</i>                   | 52 |
| III.23 | <i>Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkum</i>                          | 54 |
| III.24 | <i>Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkum</i>             | 54 |
| III.25 | <i>Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkum</i>  | 55 |
| III.26 | <i>Capaian Parameter Pembentuk Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>                    | 57 |
| III.27 | <i>Perhitungan Bobot Parameter Pembentuk Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>          | 58 |
| III.28 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Indeks Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum</i> | 59 |
| III.29 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pelindungan Kekayaan Intelektual</i>               | 62 |

|        |                                                                                          |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| III.30 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum</i>        | <b>65</b> |
| III.31 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kemudahan Berusaha</i>                           | <b>65</b> |
| III.32 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI</i> | <b>66</b> |
| III.33 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional</i>       | <b>66</b> |
| III.34 | <i>Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional</i>    | <b>67</b> |
| III.35 | <i>Target, Realisasi dan Capaian IKM Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM</i>    | <b>68</b> |
| III.36 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>                | <b>70</b> |
| III.37 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Budaya Hukum</i>                                 | <b>72</b> |
| III.38 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Materi Hukum</i>                                 | <b>74</b> |
| III.39 | <i>Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum</i>        | <b>76</b> |
| III.40 | <i>Realisasi Anggaran Kementerian Hukum TA 2025</i>                                      | <b>80</b> |
| III.41 | <i>Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2025</i>               | <b>89</b> |
| III.42 | <i>Capaian Pelaksanaan Tindak Lanjut atas LHE AKIP Kemenkumham Tahun 2024</i>            | <b>94</b> |



# DAFTAR GAMBAR

## BAB I

---

- |     |                                                |   |
|-----|------------------------------------------------|---|
| I.1 | Struktur Organisasi Kementerian Hukum          | 6 |
| I.2 | Statistik Pegawai Kementerian Hukum Tahun 2025 | 7 |

## BAB II

---

- |      |                      |    |
|------|----------------------|----|
| II.1 | Core Value BerAKHLAK | 17 |
|------|----------------------|----|

## BAB III

---

- |       |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|
| III.1 | Kemenkumham mendapatkan Opini WTP 16 kali                   | 82 |
| III.2 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kemenkum Tahun 2025      | 83 |
| III.3 | Nilai IKPA Kemenkum Tahun 2025                              | 84 |
| III.4 | Capaian Aplikasi E-Performance UKE I Tahun 2025             | 85 |
| III.5 | Capaian Rencana Aksi pada Aplikasi E-Performance Tahun 2025 | 85 |
| III.6 | Capaian E-Monev Bappenas Tahun 2025                         | 86 |



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

---

- A. LATAR BELAKANG**
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- C. MAKSUD DAN TUJUAN**
- D. ASPEK STRATEGIS**
- E. ISU STRATEGIS**
- F. SISTEMATIKA LAPORAN**

## A. Latar Belakang

Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sebelumnya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah melaksanakan seluruh arah kebijakan pembangunan nasional bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dalam perjalanannya, pada Kabinet Merah Putih Kemenkumham bertransformasi menjadi 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan (KemenIMPAS).

Kementerian Hukum merupakan bagian vital dari sistem hukum nasional Indonesia yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum. Sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, Kementerian Hukum berperan penting dalam memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

**“Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 Kementerian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Kementerian Hukum melaksanakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kementerian Hukum memiliki 8 (delapan) Unit Kerja Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

### 1. Sekretariat Jenderal

#### TUGAS :

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

#### FUNGSI :

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

#### TUGAS :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, perancangan, dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi/nonlitigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang undangan di daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, perancangan, dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi/nonlitigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang undangan di daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perancangan, dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi/nonlitigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, perancangan, dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang, pengundangan Peraturan Menteri/Lembaga, penerjemahan, publikasi, dan litigasi/nonlitigasi peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

#### TUGAS :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemberian bimbingan teknis di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

#### TUGAS :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 5. Inspektorat Jenderal

### TUGAS :

Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian.

### FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 6. Badan Pembinaan Hukum Nasional

### TUGAS :

Menyelenggarakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
2. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, pembinaan literasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dan pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
4. Pelaksanaan administrasi badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 7. Badan Strategi Kebijakan

### TUGAS :

Menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

### FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
3. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### TUGAS :

Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

### FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
2. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
5. Pengelolaan pendidikan tinggi kementerian di bidang hukum;
6. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain itu, Menteri Hukum dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus selaku pemberi rekomendasi sesuai keahliannya, yang terdiri dari:

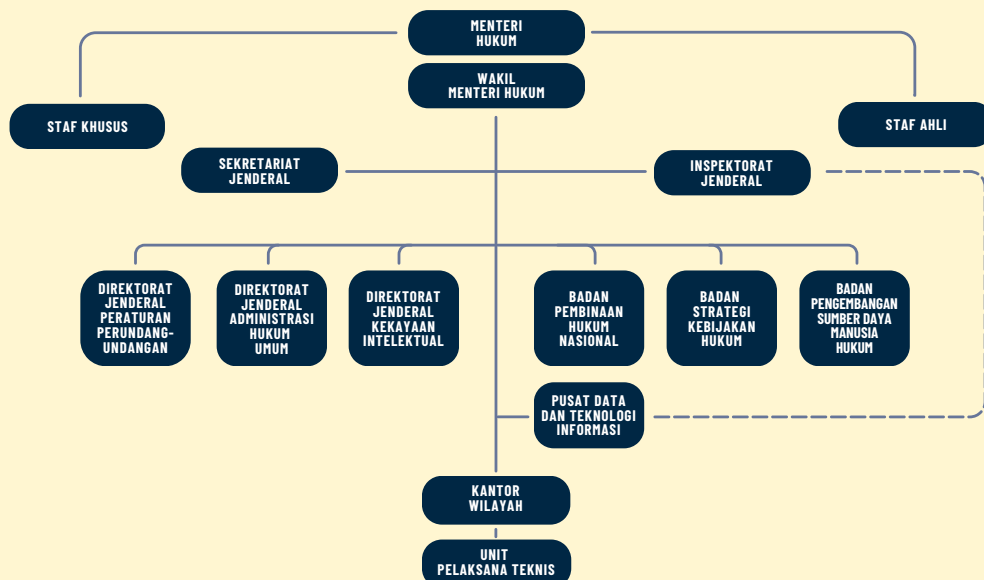
1. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sosial;
3. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi;
4. Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Isu-Isu Strategis.

Selain itu, berdasarkan pembentukan Kabinet Merah Putih, semula Kementerian Hukum dan HAM memiliki 844 satuan kerja operasional dan 22 perwakilan imigrasi di luar negeri serta 64.001 pegawai menjadi Kementerian Hukum dengan jumlah 49 satuan kerja dan 7.979 pegawai, dengan rincian:

- 1.33 Kantor Wilayah;
- 2.5 Balai Harta Peninggalan;
- 3.3 Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum.

### STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum



Gambar.I.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum

# Statistik Pegawai Kementerian Hukum

Per 10 Januari 2026



## 7.979 pegawai

yang terdiri dari PNS, PPPK, CPNS, dan Non-ASN

| PNS         | PPPK        | CPNS      | NON ASN  |
|-------------|-------------|-----------|----------|
| 72,5%       | 16,6%       | 10,7%     | 0,1%     |
| 5.788 orang | 1.327 orang | 852 orang | 12 orang |



Berdasarkan Unit Kerja

Wilayah  
4.108



Pusat  
3.871

Generasi

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| Z           | 901  | 11,3% |
| Y           | 4456 | 55,5% |
| X           | 2505 | 31,4% |
| Baby Boomer | 145  | 1,8%  |



Pendidikan

|             |     |       |    |     |     |       |     |       |    |    |
|-------------|-----|-------|----|-----|-----|-------|-----|-------|----|----|
| SD-SMA      | 13% | 1.030 | 4% | 343 | 58% | 4.604 | 24% | 1.927 | 1% | 75 |
| D I - D III |     |       |    |     |     |       |     |       |    |    |
| DIV/S1      |     |       |    |     |     |       |     |       |    |    |
| S2          |     |       |    |     |     |       |     |       |    |    |
| S3          |     |       |    |     |     |       |     |       |    |    |



55%  
Pria  
4.377



45%  
Wanita  
3.602

Kelompok Jabatan ASN

STRUKTURAL

|             | PRIA | WANITA |     |
|-------------|------|--------|-----|
| Eselon I.a  | 6    | 2      | 8   |
| Eselon I.b  | 3    | 0      | 3   |
| Eselon II.a | 65   | 13     | 78  |
| Eselon II.b | 49   | 16     | 65  |
| Eselon III  | 113  | 66     | 179 |
| Eselon IV   | 64   | 39     | 103 |
|             | 300  | 136    | 436 |

FUNGSIONAL

|              |       |
|--------------|-------|
| Ahli Utama   | 72    |
| Ahli Madya   | 713   |
| Ahli Muda    | 1.400 |
| Ahli Pertama | 2.582 |
| Penyelia     | 27    |
| Mahir        | 50    |
| Terampil     | 171   |
| Pemula       | 0     |
|              | 5015  |
| PELAKSANA    | 2.538 |

Masa Kerja

|         |       |
|---------|-------|
| 0 - 5   | 2.463 |
| 6 - 10  | 1.495 |
| 11 - 15 | 521   |
| 16 - 20 | 1.966 |
| 21 - 25 | 832   |
| 26 - 30 | 289   |
| > 30    | 413   |

## C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Selain itu, Kementerian Hukum juga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional ke-7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan" melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum;
2. Pembangunan Hukum;
3. Penegakan Hukum; dan
4. Pelayanan Hukum.

## E. Isu Strategis

1. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari Kementerian/Lembaga (K/L) membuat penyelesaian pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Unit kerja belum optimal dalam menerapkan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi;
4. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum 100% tertata dengan baik;
5. Kualitas layanan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum masih ada yang bernilai buruk, sehingga diperlukan upaya dalam peningkatan kualitas layanan bantuan hukum;
6. Besaran biaya bantuan hukum belum sesuai atau ideal dengan kebutuhan pendampingan;
7. Sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) belum merata di Kabupaten/Kota;
8. Akses dokumen dan informasi hukum melalui <https://jdih.go.id/> masih dinilai belum ramah pengguna sehingga kecenderungan pengguna internet yang mencari dokumen hukum cenderung menggunakan mesin pencari seperti *google*;
9. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan belum optimal dimanfaatkan oleh K/L sebagai bahan penyusunan perencanaan hukum sehingga Kementerian Hukum saat ini sedang menyusun regulasi yang dapat menjadi daya ikat bagi K/L untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum/peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh BPHN;
10. Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum melalui penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi AHU untuk penegakan hukum, penguatan kerja sama hukum internasional (Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi), dan pemberian keterangan ahli di bidang hukum pidana;
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Hukum Umum melalui percepatan dan simplifikasi Layanan Administrasi Hukum Umum, digitalisasi dan integrasi Sistem Layanan Administrasi Hukum Umum, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum, penguatan kapasitas SDM pemberi Layanan Administrasi Hukum Umum, optimalisasi peran Balai Harta Peninggalan dalam perlindungan Hak Keperdanaan, penguatan kehandalan Layanan Administrasi Hukum Umum, dan perlindungan Hukum Kewarganegaraan;
12. Fasilitasi Kemudahan Berusaha Melalui Inovasi Layanan AHU dengan mensimplifikasi regulasi dan menskronisasikan kebijakan administrasi Badan Usaha, mengintegrasikan penuh Layanan Administrasi Hukum Umum dengan ekosistem kemudahan berusaha, melakukan pengembangan Layanan Administrasi Hukum Umum, dan meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha;

- 
- 
13. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Ditjen AHU dengan meningkatkan kinerja anggaran dan akuntabilitas keuangan, melakukan percepatan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, meningkatkan kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen Internal secara efektif, efisien, terpadu dan berkelanjutan, melakukan penguatan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Manajemen Risiko, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan SDM Ditjen AHU;
  14. Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri agar segera dapat diundangkan mengingat RUU Desain Industri tersebut diharapkan dapat segera mengantisipasi kekurangan dari UU Desain Industri yang saat ini berlaku dan juga agar Indonesia segera bisa meratifikasi perjanjian internasional Hague Agreement dan pembentukan Komisi Banding Desain Industri;
  15. Adanya kekosongan hukum dalam peraturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
  16. Belum adanya aturan permohonan paten terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal permintaan pendapat kepada instansi terkait pada seksi publikasi Direktorat Paten Ditjen KI Kementerian Hukum;
  17. Kesenjangan Kompetensi SDM Hukum terhadap Kebutuhan Organisasi, masih terdapat gap antara kompetensi ASN hukum dan kebutuhan jabatan. Perubahan peraturan, kompleksitas permasalahan hukum, serta munculnya bidang hukum baru (cyber law, AI regulation, digital governance) menuntut Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelatihan yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis analisis kebutuhan kompetensi.
  18. Belum meratanya akses pengembangan SDM Hukum di daerah. Sehingga peran Balai Diklat wilayah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas sarana prasarana, ketersediaan pengajar, serta perluasan cakupan pelatihan.
  19. Sistem pengelolaan analisis kebijakan (*Legal Policy Hub*) telah dikembangkan, namun sosialisasi dan implementasinya belum komprehensif. Ketergantungan pada proses yang manual mengurangi efisiensi pengelolaan kegiatan analisis kebijakan dan membatasi kemampuan analitik berbasis data besar yang seharusnya menjadi keunggulan *think tank modern*;
  20. Belum adanya sistem manajemen pengetahuan yang terpadu menyebabkan data kebijakan tersebar di berbagai unit tanpa adanya mekanisme integrasi yang efektif. Kondisi ini menghambat akses terhadap data historis, menimbulkan duplikasi pengumpulan data, dan mempersulit pengembangan basis pengetahuan organisasi yang komprehensif. Koordinasi antar-unit dalam analisis kebijakan yang melibatkan beberapa pusat menjadi kurang optimal karena keterbatasan berbagi informasi secara *realtime*;
  21. Belum terlaksana integrasi antara aplikasi pengukuran kinerja organisasi (*E-Performance*) dan aplikasi pengukuran kinerja individu (*Simpeg*) dikarenakan fitur E-Kinerja pada aplikasi *Simpeg* belum berfungsi.

## F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                | Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>           | Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>             | Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>    | Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> | <p>Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum.</p> <p>Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;</li> <li>2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;</li> <li>3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;</li> <li>4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);</li> <li>5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;</li> <li>6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;</li> <li>7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.</li> <li>8. Manajemen Risiko yang menjelaskan potensi risiko dan tindak pengendalian risiko;</li> <li>9. Dampak/outcome yang dirasakan.</li> </ol> |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                | Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LAMPIRAN</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian kinerja tahun 2024;</li> <li>• Perjanjian kinerja tahun 2025;</li> <li>• Perjanjian kinerja tahun 2026;</li> <li>• Prestasi dan penghargaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

---

- A. RENCANA STRATEGIS;**
- B. PERJANJIAN KINERJA;**
- C. PRIORITAS NASIONAL.**

# A. Rencana Strategis

## 1. VISI

Dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan - 115 - Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7 yakni "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan".

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045".

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025 - 2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029.

Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:

- Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat;
- Kesetaraan di hadapan hukum;
- Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi;
- Proses penegakan hukum yang adil dan transparan;
- Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan;
- Kepastian hukum;
- Sistem peradilan yang independen dari berbagai intervensi kekuasaan.

2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi, dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.

3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:

- Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat;
- Kepercayaan investor;
- Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

## 2. MISI

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau 8 Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

- 
- 
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Misi #1: Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum;

1. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mewujudkan 5ata Kelola Pemerintah yang Bersih  
Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. TATA NILAI *Core Values* ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

1. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
4. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;
5. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
6. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;
7. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



Gambar.II.1 Core Value BerAKHLAK

#### 4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan Visi Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, maka Tujuan Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 1.1 Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum; dan

2. Tujuan 2: Meningkatkan kualitas implementasi RB Kementerian Hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Selanjutnya, sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029. Sasaran Strategis Kementerian Hukum diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Dimana pada tahun 2025, Kementerian Hukum memiliki 2 sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI; dan

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi.

## B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Menteri Hukum Tahun 2025.

(Capture Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Hukum ada pada lampiran).

#### • Berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 7 Januari 2025

| SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | TARGET     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | Indeks Kepastian Hukum Nasional              | 3,1 Indeks |
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90 Indeks  |

Tabel.II.1 Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 7 Januari 2025

• **Berdasarkan Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 23 Oktober 2025**

| SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | TARGET       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | 1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum      | 3,39 Indeks  |
|                                                                                                  | 2. Indeks Budaya Hukum                       | 0,83 Indeks  |
|                                                                                                  | 3. Indeks Materi Hukum                       | 0,51 Indeks  |
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,38 Indeks |

**Tabel.II.2 Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 23 Oktober 2025**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Kementerian Hukum melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja berdasarkan penetapan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025 – 2029 yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024.

Untuk melaksanakan target kinerja tersebut, pada tahun 2025 Kementerian Hukum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.066.600.725.000 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen            | : Rp 4.261.403.597.000 |
| 2. Program Pembentukan Regulasi          | : Rp 53.677.076.000    |
| 3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | : Rp 751.520.052.000   |

## C. Prioritas Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 , terdapat 8 kerangka nasional yang ditetapkan yaitu:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

- 
- 
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
  6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
  7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
  8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Kementerian Hukum mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Kementerian Hukum bertanggung jawab atas 3 program prioritas, 14 kegiatan prioritas yang mendukung PN 7 tersebut yang tersebar di 7 Unit Eselon I. Realisasi anggaran Prioritas Nasional hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp 65.476.178.340 atau 93,87% dari pagu anggaran sebesar Rp 80.804.838.000.

Selain itu, Kementerian Hukum juga melaksanakan kegiatan prioritas dan non prioritas lainnya bersama dengan Kementerian/Lembaga eksternal yang menjadi pengampu, antara lain:

1. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
2. Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Pengarusutamaan Gender (PUG);
4. Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
6. Sismonev Kantor Staf Presiden (KSP);
7. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA);
8. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PBB) 2025–2029;
9. Rencana Nasional Penanggulangan Ancaman Non Militer;
10. Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan; dan
11. Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**
- C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN**
- D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun pertama penyesuaian organisasi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pada tanggal 7 Januari 2025, Kementerian Hukum menetapkan Perjanjian Kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 dikarenakan dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029 masih dalam tahap penyusunan. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2025, ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan Renstra tersebut, Kementerian Hukum melakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja terbaru yang ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2025. Sehingga pada tahun 2025, Kementerian Hukum memiliki 2 Perjanjian Kinerja.

Berikut sasaran dan indikator kinerja Menteri Hukum pada tahun 2025:

| PK 7 Januari 2025                                                                                |                                              |            | PK 23 Oktober 2025                                                                               |                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | TARGET     | SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                      | TARGET       |
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | Indeks Kepastian Hukum Nasional              | 3,1 Indeks | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | 1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum      | 3,39 Indeks  |
|                                                                                                  |                                              |            |                                                                                                  | 2. Indeks Budaya Hukum                       | 0,83 Indeks  |
|                                                                                                  |                                              |            |                                                                                                  | 3. Indeks Materi Hukum                       | 0,51 Indeks  |
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90 Indeks  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,38 Indeks |

Tabel III.1 Capaian Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2025

Jika dilihat pada tabel diatas, terdapat penyesuaian indikator kinerja dan pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB), target yang ditetapkan telah sesuai baseline Hasil Evaluasi RB Kemenkumham Tahun 2024. Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci capaian dari 2 Perjanjian Kinerja tersebut.

# • Capaian Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 7 Januari 2025

## SASARAN STRATEGIS 1 "TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM DI SELURUH WILAYAH NKRI"

### 1. Indikator Sasaran Strategis "Indeks Kepastian Hukum Nasional"

Indeks Kepastian Hukum Nasional adalah metode untuk mengukur tingkat pelayanan hukum yang pasti yang diberikan oleh Kementerian Hukum. Indeks ini dibentuk oleh 9 parameter, yaitu:

| No | Parameter                                                                                                                                                                                                                     | Target      | Realisasi                                      | Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------|
| 1  | Indeks kualitas peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                  | 3,25 Indeks | 3,78 Indeks                                    | 116,30% |
| 2  | Indeks efektivitas otoritas pusat                                                                                                                                                                                             | 3,1 Indeks  | 3,16 Indeks                                    | 101,93% |
| 3  | Indeks kemudahan berusaha pada layanan AHU                                                                                                                                                                                    | 3,1 Indeks  | 3,65 Indeks                                    | 117,74% |
| 4  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU                                                                                                                                                                               | 3,5 Indeks  | 3,86 Indeks                                    | 110,28% |
| 5  | Indeks penegakan hukum KI                                                                                                                                                                                                     | 3,1 Indeks  | 3,64 Indeks                                    | 117,41% |
| 6  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI                                                                                                                                                                                | 3,36 Indeks | 3,43 Indeks                                    | 102,08% |
| 7  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum                                                                                                                                                                   | 3,08 Indeks | 3,83 Indeks                                    | 124,35% |
| 8  | Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L | 20%         | 86,96% konversi ke skala 4 menjadi 3,47 Indeks | 434,80% |

Tabel III.2 Capaian Parameter Pembentuk Indeks Kepastian Hukum Nasional

Masing-masing parameter diatas memiliki bobot masing-masing dalam pengukuran Indeks Kepastian Hukum Nasional, sehingga hasil dari pembobotan sebagai berikut:

| No                                     | Parameter                                                                                                                                                                                                                     | Bobot       | Realisasi                                      | Realisasi x Bobot |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                      | Indeks kualitas peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                                  | 20,00%      | 3,78 Indeks                                    | 0,76              |
| 2                                      | Indeks efektivitas otoritas pusat                                                                                                                                                                                             | 15,00%      | 3,16 Indeks                                    | 0,47              |
| 3                                      | Indeks kemudahan berusaha pada layanan AHU                                                                                                                                                                                    | 15,00%      | 3,65 Indeks                                    | 0,55              |
| 4                                      | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU                                                                                                                                                                               | 10,00%      | 3,86 Indeks                                    | 0,39              |
| 5                                      | Indeks penegakan hukum KI                                                                                                                                                                                                     | 15,00%      | 3,64 Indeks                                    | 0,55              |
| 6                                      | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI                                                                                                                                                                                | 10,00%      | 3,43 Indeks                                    | 0,34              |
| 7                                      | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum                                                                                                                                                                   | 10,00%      | 3,83 Indeks                                    | 0,38              |
| 8                                      | Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L | 5,00%       | 86,96% konversi ke skala 4 menjadi 3,47 Indeks | 0,2               |
| <b>Indeks Kepastian Hukum Nasional</b> |                                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b> |                                                | <b>3,6 Indeks</b> |

Tabel III.3 Perhitungan Bobot Parameter Pembentuk Indeks Kepastian Hukum Nasional

#### Formulasi Perhitungan:

#### Indeks Kepastian Hukum Nasional =

$$(WIKPU\ PP \times IKPU\ PP) + (WIEOP\ AHU \times IEOP\ AHU) + (WIKB\ AHU \times IKB\ AHU) + (WIKM\ AHU \times IKM\ AHU) + (WIPK\ KI \times IPK\ KI) + (WIKM\ KI \times IKM\ KI) + (WIKM\ PHN \times IKM\ PHN) + (WANEVPUU\ PHN \times ANEVPUU\ PHN)$$

Dimana,

- WIKPU PP = Bobot Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
- IKPU PP = Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
- WIEOP AHU = Bobot Indeks efektivitas otoritas pusat
- IEOP AHU = Indeks efektivitas otoritas pusat
- WIKB AHU = Bobot Indeks kemudahan berusaha pada layanan AHU
- IKB AHU = Indeks kemudahan berusaha pada layanan AHU
- WIKM AHU = Bobot Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU

- IKM AHU = Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU
- WIPK KI = Bobot Indeks penegakan hukum KI
- IPK KI = Indeks penegakan hukum KI
- WIKM KI = Bobot Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI
- IKM KI = Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI
- WIKM PHN = Bobot Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum
- IKPM PHN = Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum
- WANEVPUU PHN = Bobot Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L
- ANEVPUU PHN = Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L

**Maka dari itu, realisasi:**

$$\begin{aligned} & \Sigma (20\% \times 3,78) + (15\% \times 3,16) + (15\% \times 3,65) + (10\% \times 3,86) + (15\% \times 3,64) + \\ & (10\% \times 3,43) + (10\% \times 3,83) + (5\% \times 3,47) \\ & = 0,76 + 0,47 + 0,55 + 0,39 + 0,55 + 0,34 + 0,38 + 0,2 \\ & = 3,6 \text{ Indeks} \end{aligned}$$

**Sehingga, Indeks Kepastian Hukum Nasional Tahun 2025 sebesar 3,6 Indeks.**

Penjelasan masing-masing parameter:

**1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan**

| INDIKATOR                                     | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Kualitas Peraturan Perundang- Undangan | 3,25<br>Indeks | 3,78<br>Indeks | 116,30% |

**Tabel III.4 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan**

Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan merupakan hasil pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Hukum. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan merupakan indikator kinerja utama yang terdapat dalam Sasaran Strategis 1 Kementerian Hukum. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian kuesioner yang diisi oleh 259 (dua ratus lima puluh sembilan) responden yang berasal dari kementerian/lembaga dan Unit Eselon I. Responden yang mengisi kuesioner menyatakan pernah terlibat dalam masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran diawali dengan pengisian kuesioner kualitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari berbagai indikator pengukuran.

Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Bapak Imam Lukito selaku Analis Kebijakan Muda dan Bapak Haryono selaku Analis Kebijakan Muda pada Badan Strategi Kebijakan. Perhitungan indeks dilakukan satu kali pada akhir tahun. Data yang akan ditampilkan adalah data realisasi kinerja pada masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung ketercapaian indeks dimaksud, di antaranya capaian perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan undang-undang, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, penetapan Peraturan Menteri Hukum, dan pengundangan Peraturan Menteri Hukum (pada level Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan).

Nilai Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 dengan realisasi 3,78 dan target 3,25 bila dibandingkan akan mendapatkan persentase capaian kinerja sebesar 116,30%. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun kecuali Tahun 2023 namun sudah mencapai target. Pada Tahun 2025 juga mengalami peningkatan signifikan.

Tren perbandingan capaian kinerja 2021 – 2024 :

|                                              |      |           |             |         |
|----------------------------------------------|------|-----------|-------------|---------|
| Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan | 2021 | TARGET    | 3,1 Indeks  | 109,03% |
|                                              |      | REALISASI | 3,38 Indeks |         |
|                                              | 2022 | TARGET    | 3,15 Indeks | 108,8%  |
|                                              |      | REALISASI | 3,43 Indeks |         |
|                                              | 2023 | TARGET    | 3,2 Indeks  | 104,69% |
|                                              |      | REALISASI | 3,35 Indeks |         |
|                                              | 2024 | TARGET    | 3,25 Indeks | 113,84% |
|                                              |      | REALISASI | 3,70 Indeks |         |
|                                              | 2025 | TARGET    | 3,25 Indeks | 116,30% |
|                                              |      | REALISASI | 3,78 Indeks |         |

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Indeks kualitas perundang-undangan mengalami peningkatan setiap tahun kecuali tahun 2023 namun masih mencapai target. Pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan yang signifikan.

### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Keberhasilan pencapaian target dikarenakan peran serta pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, mengoptimalkan peran perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dan penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penyusunan-pengundangan.
2. Peraturan perundang-undangan yang mendorong keberhasilan pencapaian target:
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan hingga pengundangan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
    - Keikutsertaan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, diantaranya pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika, rumusan naskah awal, rancangan undang-undang, rancangan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di tingkat pusat, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan perundang-undangan di bawah peraturan daerah. Tahapan penyusunan terdiri dari penyusunan Panitia Antar Kementerian, dan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
    - Keikutsertaan perancang pada tahap pembahasan dilaksanakan pada Pembahasan Tingkat I (tim kerja, tim perumus, tim sinkronisasi) dan Tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna);
    - Keikutsertaan perancang pada tahap pengesahan atau penetapan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan yang akan disahkan atau ditetapkan;
    - Keikutsertaan perancang pada tahap pengundangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan.
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih, dari segi karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek penyusunan peraturan perundang-undangannya. Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang melalui tahapan harmonisasi akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Setiap permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau
- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kelengkapan dokumen permohonan pengundangan, kesesuaian naskah peraturan yang akan diundangkan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan kewenangan lembaga untuk mengundangkan, dengan adanya tahapan pemeriksaan dokumen peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang diundangkan.

**b. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dilakukan melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan:

1. Pada tahapan penyusunan, koordinasi dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait substansi RUU, RPP, RPerpres yang akan disusun pada Tahun Anggaran 2025, rapat Tim Internal Pemerintah, dan Rapat Penyusunan Panitia Antar Kementerian;
2. Pembahasan RUU dilakukan melalui kegiatan Rapat Tim Internal, Rapat Konsinyering, dan Rapat Kerja;
  - a. Peraturan Menteri Hukum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, bahwa setiap permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kelengkapan dokumen permohonan pengundangan, kesesuaian naskah peraturan yang akan diundangkan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan kewenangan lembaga untuk peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang diundangkan;
  - b. Pada Tahun 2025, dalam rangka pembaruan hukum acara pidana untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dalam risiko ini timbul karena terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan adanya pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam implementasi dan kurangnya sosialisasi yang masif dan inklusif kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memahami manfaat, prosedur, atau latar belakang kebijakan tersebut sehingga muncul resistensi atau ketidakpedulian. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah pengendalian diarahkan pada sinkronisasi hukum dan strategi komunikasi inklusif seperti melakukan evaluasi dan revisi terhadap aturan yang bertabrakan melalui legal audit, melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan kelompok sasaran sebelum kebijakan disahkan (FGD), menyediakan dokumen tanya-jawab sederhana tentang kebijakan untuk meminimalkan salah tafsir, dan memperkuat sistem feedback untuk mendengar kendala implementasi di lapangan;
2. Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam Risiko ini timbul karena tumpang tindih kewenangan instansi. Ketidakjelasan pembagian urusan dalam undang-undang sering kali membuat beberapa kementerian/lembaga merasa memiliki mandat atas objek yang sama. Akibatnya, masing-masing instansi berusaha mempertahankan kewenangannya demi menjaga eksistensi, penguasaan anggaran, atau kendali operasional atas sektor tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengendalian diarahkan pada penguatan peran penengah yang netral dan penggunaan standar penilaian objektif seperti mewajibkan analisis dampak yang objektif untuk menentukan lembaga mana yang paling efisien memegang kewenangan tertentu, menghadirkan akademisi atau praktisi netral dalam rapat harmonisasi untuk memberikan perspektif berbasis data, bukan kepentingan instansi, dan memetakan seluruh kewenangan kementerian/lembaga secara komprehensif untuk mengidentifikasi dan memutus area tumpang tindih secara permanen;
3. Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem. Dalam risiko ini timbul karena konsep rancangan peraturan yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi. Hal ini disebabkan kurangnya riset atau naskah akademik yang mendalam, ketidakjelasan arah kebijakan dari unit teknis pemrakarsa, dan data pendukung yang tidak valid atau belum disepakati secara internal sebelum diajukan ke proses penyusunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengendalian difokuskan pada penguatan tahap pra-penyusunan untuk memastikan hanya draf yang matang yang masuk ke dalam antrean Progsun.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, transparan, dan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Dukungan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari jenjang pertama hingga utama yang memadai dan berkompeten. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatannya;
3. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan turut pula dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan mengurangi kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (disharmoni);
4. Peningkatan koordinasi dengan kementerian/lembaga pada masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksimalkan melalui *hybrid* (daring).

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini** bahwa semakin berkualitas peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dibuktikan dengan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan yang mencapai indeks 3,78.

**2. Indeks Efektivitas Otoritas Pusat**

| INDIKATOR                         | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Efektivitas Otoritas Pusat | 3,10<br>Indeks | 3,16<br>Indeks | 101,93% |

Tabel III.6 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan penanganan permintaan kerja sama bantuan hukum timbal balik/*mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi, bekerja sama dengan sejumlah kementerian, lembaga dan instansi lainnya, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Keberadaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sangat signifikan dan vital dikarenakan melaksanakan fungsi strategis, yaitu fungsi Otoritas Pusat (*Central Authority* atau CA).

Fungsi Otoritas Pusat yang diselenggarakan adalah meliputi bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang merupakan fungsi khusus yang menjembatani hubungan koordinasi, kerja sama, dan pelaksanaan tugas antara institusi penegak hukum di Indonesia dengan institusi penegakan hukum di negara lain terutama dalam hal penanganan tindak pidana, semisal antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Interpol. Adapun layanan-layanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pusat adalah:

1. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Pengukuran Indeks Efektivitas Otoritas Pusat adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kualitatif dan kuantitatif tingkat efektivitas otoritas pusat yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi otoritas pusat dalam upaya penanganan dan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan ekstradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Efektivitas organisasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh unsur-unsur organisasi yang berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Efektivitas Otoritas Pusat terdiri atas:

| No | INDIKATOR                             | BOBOT |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1  | Ketepatan Waktu Penanganan Permintaan | 60%   |
| 2  | Komunikasi dan Koordinasi             | 30%   |
| 3  | Tanggapan Permintaan MLA/ Ekstradisi  | 10%   |

Tabel III.7 Indikator Pengukuran Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

| NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU EFEKTIVITAS | KINERJA OTORITAS PUSAT |
|----------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| 0 – 25,00      | 0 – 1,00                | D                | Tidak Efektif          |
| 25,01 – 50,00  | 1,01 – 2,00             | C                | Cukup Efektif          |
| 50,01 – 75,00  | 2,01 – 3,00             | B                | Efektif                |
| 75,01 – 100,00 | 3,01 – 4,00             | A                | Sangat Efektif         |

Tabel III.8 Interpretasi Indeks Efektivitas Otoritas Pusat

#### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

1. Indeks Otoritas Pusat adalah Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mulai diterapkan pada tahun 2024. Indeks ini berfungsi mengukur efektivitas kinerja Otoritas Pusat secara kualitatif dan kuantitatif dalam menangani kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979);
2. Pada tahun 2024, skala interpretasi yang digunakan adalah 5. Dengan skala ini, Direktorat Jenderal mencapai skor 4,5 dari 5 (Sangat Efektif), dengan target 3,1, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 145,16%;
3. Pada tahun 2025, terjadi perubahan skala interpretasi dari nilai 5 menjadi 4, yang mempengaruhi bobot nilai setiap indikator. Meskipun terjadi perubahan skala, target tidak disesuaikan dan tetap ditetapkan pada angka 3,1. Capaian kinerja tahun 2025 berhasil melampaui target ini, yaitu sebesar 3,16;
4. Oleh karena itu, penurunan angka indeks dari tahun 2024 ke 2025 semata-mata disebabkan oleh perubahan metodologi penilaian (skala interpretasi), bukan oleh penurunan kinerja substantif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

#### **b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

Penyebab keberhasilan atau peningkatan capaian kinerja sasaran program Indeks Efektivitas Otoritas Pusat disebabkan oleh program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian, yaitu dengan optimalisasi pencapaian target penindaklanjutan permintaan MLA, baik yang diterima maupun yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, dapat didukung melalui 2 (dua) mekanisme utama, yaitu:

1. Evaluasi berkala (setiap 3-6 bulan) terhadap permintaan yang diterima, yang dilakukan secara koordinatif dengan Kejaksaan, Kepolisian, serta Kementerian Luar Negeri. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa tindak lanjut dalam negeri telah tersampaikan dan terkomunikasikan dengan baik kepada negara peminta melalui saluran diplomatik; dan
2. Diskusi mendalam dan komunikasi intensif melalui rapat koordinasi dengan instansi berwenang dalam negeri untuk setiap permintaan yang akan diajukan ke luar negeri. Secara operasional, forum diskusi kasus (case work meeting) terbukti sangat efektif karena memungkinkan surat tindak lanjut yang dihasilkan Otoritas Pusat Pemerintah Indonesia tepat sasaran dan mengakomodir masukan substantif dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

#### **c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan permintaan MLA dan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
2. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;

- 
- 
3. Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan MLA;
  4. Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses ekstradisi;
  5. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
  6. Koordinasi antara Apgakum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
  7. Potensi adanya beberapa negara yang tidak merespon permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
  8. Ketersediaan SDM tidak sesuai dengan permohonan MLA dan permintaan ekstradisi yang ditangani.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Melakukan *case work meeting* dengan otoritas berwenang terkait penanganan MLA dan ekstradisi di negara diminta;
2. Melakukan koordinasi dengan Apgakum dalam menindaklanjuti permintaan MLA dan ekstradisi *outgoing*;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dalam mendorong percepatan pemenuhan MLA;
4. Menyusun skala prioritas penyelesaian permintaan MLA berdasarkan kriteria yang ditentukan Ditjen AHU;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permohonan MLA yang berpotensi adanya perlawanan atau upaya hukum lebih lanjut;
6. Melakukan komunikasi/koordinasi terbatas dengan pihak-pihak terkait sesuai SOP;
7. Melakukan komunikasi secara intensif dengan negara yang tidak menindaklanjuti permintaan ekstradisi karena tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia;
8. Melakukan penajakan dengan negara diminta untuk membentuk perjanjian ekstradisi dengan negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia;
9. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Apgakum terkait permintaan ekstradisi pada saat proses penanganan penyelesaian permintaan ekstradisi;
10. Melakukan koordinasi awal dengan Apgakum terkait permintaan ekstradisi yang diterima;
11. Memberikan surat kepada negara yang tidak merespon permintaan MLA agar dapat menindaklanjuti permohonan MLA Pemerintah Indonesia;
12. Melibatkan PPPK untuk membantu proses penyelesaian permohonan MLA;
13. Menyusun dan mengajukan formasi ideal SDM ASN yang menangani MLA dan ekstradisi untuk diprioritaskan agar dipenuhi.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini** bahwa manfaat bantuan timbal balik dan ekstradisi dalam masalah pidana adalah meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan khususnya lintas batas.

### 3. Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan AHU

| INDIKATOR                                  | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan AHU | 3,10<br>Indeks | 3,65<br>Indeks | 117,74% |

Tabel III.9 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan AHU

Indikator Kinerja Program (IKP) ini mengukur seberapa mudah dan cepat pelaku usaha maupun masyarakat memperoleh layanan terkait pendirian, pengelolaan, hingga pencatatan badan usaha dan keperdataan.

Parameter keberhasilan kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan ditentukan oleh 4 (empat) parameter, yaitu:

1. Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus;
3. Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas; dan
4. Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan.

Semakin tinggi capaian kinerja IKP ini menunjukkan kontribusi terhadap kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat. Pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha dilakukan dengan menggunakan survei yang diberikan kepada pengguna layanan pendaftaran jaminan fidusia, pendaftaran kurator dan pengurus, layanan pendirian perseroan terbatas, dan pendirian perseroan perorangan. Pada manual indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja 7 Januari 2025, indeks kemudahan berusaha diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator dimana masing-masing indikator memiliki bobot yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | INDIKATOR                                                                                                                                                  | BOBOT |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Penyelesaian Permohonan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus | 50%   |
| 2  | Tingkat Kemudahan Layanan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus       | 40%   |
| 3  | Peningkatan Jumlah Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan, Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus              | 10%   |

Tabel III.10 Indikator Pengukuran Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan AHU



Namun demikian, pengukuran indeks kemudahan berusaha pada tahun 2025 dilakukan sebanyak satu kali yaitu pada akhir tahun, sehingga pengukuran indeks mengacu pada manual indikator berdasarkan Renstra 2025–2029. Pada manual indikator terbaru, keempat layanan yang telah disebutkan diatas masing-masing memiliki bobot yang sama dan kemudian masing-masing layanan dihitung tingkat kemudahannya dengan mengalikan bobot dengan persentase jumlah responden yang menyatakan “mudah”. Hasil dari tingkat kemudahan setiap layanan kemudian dijumlahkan dan didapatkan hasil indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan.

**a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Administrasi Hukum Umum merupakan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang baru diterapkan pada tahun 2024 yang bertujuan untuk mengukur kemudahan berusaha yang didasarkan pada penyelesaian permohonan, tingkat kemudahan dan peningkatan jumlah layanan pendirian perseroan terbatas dan perseroan perorangan, pendaftaran jaminan fidusia, serta pendaftaran kurator dan pengurus. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh nilai capaian indeks kemudahan berusaha pada layanan AHU sebesar 3,46 indeks dari skala 4, dan pada tahun 2025 nilai capaian indeks kemudahan berusaha sebesar 3,47 indeks dari skala 4. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada 248 pengguna layanan pendirian perseroan terbatas, layanan pendirian perseroan perorangan, layanan jaminan fidusia, dan layanan administrasi kurator dan pengurus, telah mendapatkan hasil survei dimana layanan pendirian perseroan terbatas mendapatkan nilai 70,75%, layanan perseroan perorangan mendapatkan nilai 94,21%, layanan jaminan fidusia 94,48%, dan layanan pendaftaran kurator dan pengurus mendapat nilai 88%. Hasil survei ini telah menunjukkan bahwa pengguna layanan atau masyarakat telah merasa dimudahkan dalam pengurusan layanannya. Peningkatan capaian kemudahan berusaha didukung oleh upaya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melakukan sosialisasi layanan administrasi hukum umum secara masif melalui kantor wilayah, media sosial, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pameran.

**b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. Pengembangan integrasi dan/atau interkoneksi sistem layanan administrasi hukum umum yang mendukung kemudahan berusaha dengan K/L lain yang terkait khususnya layanan badan usaha, jaminan fidusia, dan informasi kepailitan;
2. Pembentukan dan/atau penyempurnaan regulasi yang dapat mendorong peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia diantaranya penyusunan RUU Jaminan Benda Bergerak, perubahan atas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan PKPU, serta penyusunan RUU Badan Usaha.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Risiko adanya keluhan dari pelaku usaha akibat KBLI yang diajukan untuk NIB perseroan perorangan masuk dalam risiko menengah atau tinggi, sehingga butuh proses lebih lanjut dan NIB tidak dapat langsung terbit;
2. Gagal terbit NPWP akibat adanya permasalahan pada aplikasi pendirian perseroan perorangan (masalah standar pelayanan dengan Ditjen Pajak Kemenkeu);
3. Pengguna aplikasi layanan fidusia online tidak bisa menggunakan Aplikasi layanan Fidusia *Online* karena mengalami gangguan jaringan (*downtime/error system*);
4. Lambatnya waktu layanan fidusia yang diberikan kepada masyarakat;
5. Aplikasi Kurator dan Pengurus masih sering mengalami gangguan jaringan (*downtime/error system*);
6. Masih rendahnya pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur yang ada di aplikasi AHU Kurator.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Berkoordinasi secara aktif dengan Ditjen Pajak terkait gagal terbit NPWP Perseroan Perorangan;
2. Mengarahkan pengguna layanan untuk membuat NPWP secara mandiri, dapat dilakukan melalui KPP langsung atau secara *online* melalui *website* Ditjen Pajak;
3. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BKPM (OSS) terkait penentuan profil risiko perseroan perorangan dan koordinasi dengan petugas layanan tatap muka administrasi hukum umum;
4. Menyusun *Service Level Agreement* (SLA) layanan fidusia serta layanan Kurator dan Pengurus dengan Direktorat Teknologi Informasi;
5. Menerapkan skala prioritas terhadap akselerasi penanganan permasalahan layanan jaminan fidusia;
6. Menambah jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dan memahami substansi dalam penanganan layanan jaminan fidusia;
7. Melakukan sosialisasi terkait fitur-fitur dan penggunaan aplikasi AHU Kurator;
8. Memperbaharui dokumen manual penggunaan aplikasi AHU Kurator (*softcopy*).

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini** bahwa dapat disimpulkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha yang berkualitas juga berperan dalam menciptakan kepercayaan investor.

#### 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum

| INDIKATOR                                                           | TARGET        | REALISASI      | CAPAIAN |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum | 3,5<br>Indeks | 3,86<br>Indeks | 110,28% |

Tabel III.11 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau handphone masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/>.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi 3AS BSK Hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kuesioner yang digunakan dalam Aplikasi 3AS mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan sarana.

##### a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:

1. Menyediakan informasi layanan melalui media elektronik maupun non elektronik, yaitu berupa informasi melalui website Ditjen AHU ([ahu.go.id](http://ahu.go.id)) dan sosial media Ditjen AHU (pada kanal Instagram, Facebook, X, TikTok, dan Youtube);
2. Menetapkan prosedur/alur layanan yang mudah bagi masyarakat;
3. Menyelesaikan layanan sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang diinformasikan;
4. Menetapkan tarif layanan yang jelas (tercantum pada Peraturan Menteri) sehingga ada kejelasan tarif yang akan dibayarkan oleh masyarakat;
5. Memberikan sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan *online* yang mudah digunakan;
6. Memberikan peningkatan kompetensi kepada petugas layanan;
7. Memberikan kemudahan layanan konsultasi dan pengaduan yang mudah digunakan/diakses melalui portal pengaduan Ditjen AHU (*Contact Center* Ditjen AHU) dan kanal LAPOR!.



Selain itu, Ditjen AHU berkomitmen untuk memastikan tidak terjadinya praktik diskriminasi pelayanan, pelayanan di luar prosedur atau kecurangan, penerimaan imbalan dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas di luar ketentuan yang berlaku, pungutan liar, serta praktik percaloan atau penggunaan perantara tidak resmi. Praktik-praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Ditjen AHU. Oleh karena itu, penguatan integritas dan akuntabilitas pegawai Ditjen AHU menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

**b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, pada tahun 2025, Ditjen AHU telah membuka enam gerai layanan AHU terbaru, yaitu:

1. Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi;
2. Mall Pelayanan Publik Kota Bogor;
3. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bogor;
4. Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan;
5. Mall Pelayanan Publik Tangerang Kota;
6. Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang.

Penambahan gerai layanan ini melengkapi gerai yang telah ada sebelumnya, yaitu Mall Pelayanan Publik Jakarta dan Galeri Inovasi AHU Mall Kuningan City. Melalui gerai ini, masyarakat dapat memperoleh layanan tatap muka secara langsung serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi secara lebih efektif. Hal ini mendukung peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam aspek kemudahan akses terhadap layanan konsultasi dan pengaduan, yang merupakan salah satu indikator penilaian dalam Survei Kepuasan Masyarakat.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Terjadinya pelanggaran ketentuan oleh petugas layanan;
2. Terjadinya gangguan teknis atau kesalahan sistem pada layanan AHU *Online* yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Penindakan secara tegas berupa pemberhentian terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran;
2. Melakukan pemeliharaan sistem pada layanan AHU Online secara berkala.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini** yaitu masyarakat mendapatkan layanan secara mudah dan tepat, dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

| INDIKATOR                                   | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual | 3,10<br>Indeks | 3,64<br>Indeks | 117,41% |

Tabel III.12 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Sasaran penegakan hukum di DJKI dinilai dengan indikator indeks penegakan hukum kekayaan intelektual yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Indeks penegakan hukum KI diukur menggunakan dua dimensi pengukuran seperti pada tabel dibawah ini:

| Dimensi | INDIKATOR                                                        | BOBOT |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------|
| A       | Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual   | 15%   |
| B       | Persentase Penyelesaian Sengketa HKI Non Litigasi secara optimal | 85%   |

Tabel III.13 Indikator Pengukuran Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Pertimbangan proporsi penegakan hukum ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas, aksesibilitas, dan pendekatan restorative justice serta preventif dalam penegakan hukum. Jalur non-litigasi seperti pengawasan, mediasi, dan pengaduan publik dinilai lebih cepat, murah, serta mampu menjangkau masyarakat luas, sehingga berperan penting dalam mencegah pelanggaran hukum secara sistemik. Sementara itu, litigasi yang bersifat reaktif dan terbatas pada kasus tertentu hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas penegakan hukum. Oleh karena itu, proporsi bobot yang lebih besar diberikan pada non-litigasi untuk mendorong reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif.

### a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:

#### 1. Optimalisasi penyelesaian perkara

Peningkatan capaian pada dimensi ini didukung oleh optimalisasi penanganan aduan pelanggaran KI melalui penguatan proses penyidikan dan koordinasi lintas unit. Penyelesaian aduan tidak hanya difokuskan pada perkara baru, tetapi juga mencakup percepatan penyelesaian tunggakan perkara dari periode sebelumnya. Pendekatan ini meningkatkan rasio penyelesaian aduan secara signifikan dan menunjukkan meningkatnya efektivitas fungsi penegakan hukum formal DJKI. Selain itu, sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait turut mempercepat proses klarifikasi, penindakan dan penyelesaian, 135 aduan pelanggaran KI.

## 2. Peningkatan produktivitas PPNS KI

Dengan keterbatasan jumlah PPNS, peningkatan produktivitas penyidik melalui penguatan manajemen perkara dan prioritas kasus mampu menghasilkan output penegakan hukum yang optimal. dari total 13 PPNS menyelesaikan 66 perkara → rata-rata 5,07 perkara/PPNS/tahun, dimana Penyelesaian perkara lebih besar dari perkara masuk (165%), termasuk penyelesaian tunggakan 2019–2024, sehingga efeknya *backlog* berkurang.

## 3. Penguatan regulasi dan pedoman teknis

Penerbitan regulasi dan pedoman teknis penegakan hukum KI (Terbitnya Permenkum No. 47 Tahun 2025 (penutupan konten pelanggaran KI) dan Terbitnya Perdirjen KI Pedoman Mediasi KI) memberikan kepastian prosedural serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penanganan pelanggaran.

## 4. Optimalisasi mekanisme mediasi KI

Peningkatan pemanfaatan mediasi, baik di tingkat pusat maupun wilayah, berkontribusi pada percepatan penyelesaian sengketa KI serta mengurangi beban proses penyidikan formal.

## 5. Sinergi dan kolaborasi lintas instansi

Kerjasama dengan kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan (Kerja sama aktif dengan KOMDIGI, Bea Cukai, Bareskrim, *e-commerce*, dan Satgas KI) terkait memperluas jangkauan penegakan hukum KI dan meningkatkan efektivitas penindakan serta pencegahan pelanggaran.

## 6. Penguatan kegiatan pencegahan pelanggaran

Pelaksanaan kegiatan pencegahan secara intensif, termasuk pengawasan wilayah dan sertifikasi pusat perdagangan, meningkatkan tingkat kepatuhan dan memperluas wilayah aman dari pelanggaran KI.

## 7. Dukungan sistem dan tata kelola kinerja

Peningkatan koordinasi internal dan pemantauan kinerja secara berkelanjutan mendukung konsistensi pelaksanaan program dan pencapaian indikator kinerja.

### **b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. Tingginya wilayah aman dari pelanggaran KI yang didukung oleh beberapa kegiatan seperti :

- Pelaksanaan kegiatan pencegahan secara on the spot kepada pelaku usaha yang melampaui target wilayah dan lokus (13 wilayah dan 135 lokus).
- Kegiatan pencegahan berbasis inisiasi Kanwil dan stakeholder dengan keterlibatan ratusan peserta.
- Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI, baik sertifikasi baru maupun re-sertifikasi, di berbagai wilayah.

2. Tingginya tingkat penyelesaian pelanggaran KI di tingkat pusat

- Penyidikan pelanggaran KI oleh PPNS pusat dengan rasio penyelesaian perkara melebihi jumlah laporan yang masuk.
- Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sebagai bagian dari optimalisasi manajemen perkara.

### 3. Administratif PPNS yang optimal

- Koordinasi kelembagaan dan administrasi PPNS, termasuk pemutakhiran data penyidik.
- Rapat koordinasi dan persiapan Rakor PPNS untuk penguatan tata kelola penyidikan.

### 4. Penguatan peran kantor wilayah dalam penegakan hukum

- Penanganan pelanggaran KI oleh Kanwil, baik melalui penyelesaian pengaduan maupun dukungan penyidikan.
- Pelaksanaan CPP Kanwil di bidang penegakan hukum KI.
- Keterlibatan Kanwil dalam kegiatan pencegahan dan sertifikasi pusat perbelanjaan.

### 5. Optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi KI)

- Pelaksanaan mediasi KI di tingkat pusat dan Kanwil, dengan 24 mediasi berhasil diselesaikan di wilayah.
- Implementasi Pedoman Mediasi KI sebagai dasar penyelesaian sengketa alternatif.
- Peningkatan peran Kanwil dalam layanan mediasi KI.

### 6. Penguatan regulasi dan pedoman teknis penegakan hukum KI

- Penetapan Permenkum No. 47 Tahun 2025 tentang penanganan laporan pelanggaran KI dalam sistem elektronik.
- Penetapan Perdirjen KI tentang Pedoman Mediasi KI.
- Penyusunan kebijakan teknis pendukung penegakan hukum KI.

### 7. Sinergi lintas instansi dan pemangku kepentingan

- Penandatanganan dan implementasi PKS dengan Komdigi, Bea Cukai, *e-commerce*, dan mitra strategis.
- Rapat koordinasi dan FGD Satgas Pengawasan dan Penanggulangan Pelanggaran KI.
- Kegiatan internasional dan regional (ASEAN, *workshop IPR enforcement*).

## **c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Ketergantungan capaian indeks yang sangat tinggi pada penyelesaian sengketa HKI non-litigasi (85%), sehingga penurunan efektivitas mekanisme mediasi/alternatif penyelesaian sengketa akan berdampak langsung dan signifikan terhadap nilai indeks;
2. Variasi kualitas dan kapasitas fasilitasi penyelesaian sengketa non-litigasi antar wilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan capaian kinerja;
3. Penyelesaian aduan pelanggaran KI (15%) berisiko tidak optimal akibat keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian, dan lamanya proses penanganan.

## **d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Penguatan dan standarisasi prosedur penyelesaian sengketa HKI non-litigasi, termasuk optimalisasi peran mediasi, fasilitasi, dan konsultasi hukum sebagai instrumen utama penegakan hukum KI.

2. Peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi lintas unit untuk menjaga konsistensi dan kualitas penyelesaian sengketa non-litigasi di berbagai wilayah.
3. Optimalisasi mekanisme penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut aduan pelanggaran KI, sehingga meskipun bobotnya lebih kecil, kontribusinya tetap terukur dan akuntabel.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini yaitu:**

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa HKI yang cepat, efisien, dan berbiaya relatif rendah melalui mekanisme non-litigasi.
2. Berkurangnya eskalasi sengketa HKI ke jalur litigasi, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan iklim usaha berbasis KI.
3. Terjaganya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum KI melalui penanganan aduan pelanggaran KI yang lebih tertib dan terstruktur.

## 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

| INDIKATOR                                                        | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual | 3,36<br>Indeks | 3,43<br>Indeks | 102,08% |

**Tabel III.14 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual**

Pada Perjanjian Kinerja periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024, dan pada periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029, tidak ada perbedaan dari indikator kinerja program dan target, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yang dilaksanakan dengan perolehan nilai 3,43 melampaui target 3,36 dengan capaian kinerja sebesar 102,08%. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual” ini dicapai melalui Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI.

Parameter ini dicapai melalui Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Ditjen KI, meliputi:

- a) Layanan Hak Cipta dan Desain Industri;
- b) Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- c) Layanan Merek dan Indikasi Geografis;
- d) Layanan Informasi Publik Kekayaan Intelektual (PPID);
- e) Layanan TIK Kekayaan Intelektual;
- f) Layanan KI di Ke Wilayah.

Semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei IKM menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk pengukuran survei menggunakan skala likert. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke 3 di luar Kementerian Hukum yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survei atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang pelaksanaan Survei IKM nya dilakukan oleh Ditjen KI. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan KI Tahun 2025 sebesar 3,64 (skala 4).

Artinya, secara umum kualitas layanan permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai Sangat Baik oleh penggunanya.

Adapun sebagai gambaran, realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kekayaan Intelektual mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2024.

Tren perbandingan capaian kinerja 2021 – 2024 :

|                                                                         |             |           |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| <b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</b> | <b>2021</b> | TARGET    | 3,30 Indeks | 102,72% |
|                                                                         |             | REALISASI | 3,39 Indeks |         |
|                                                                         | <b>2022</b> | TARGET    | 3,32 Indeks | 104,21% |
|                                                                         |             | REALISASI | 3,46 Indeks |         |
|                                                                         | <b>2023</b> | TARGET    | 3,34 Indeks | 105,68% |
|                                                                         |             | REALISASI | 3,53 Indeks |         |
|                                                                         | <b>2024</b> | TARGET    | 3,36 Indeks | 105,35% |
|                                                                         |             | REALISASI | 3,54 Indeks |         |
|                                                                         | <b>2025</b> | TARGET    | 3,36 Indeks | 102,08% |
|                                                                         |             | REALISASI | 3,43 Indeks |         |

Tabel III.15 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

#### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

Salah satu faktor utama peningkatan capaian kinerja ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI. Peningkatan jumlah permohonan ini tidak terlepas dari kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan KI, yang salah satunya didorong oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik KI. Kemudahan akses, kecepatan proses, serta transparansi layanan berbasis digital dirasakan langsung manfaatnya oleh pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi layanan KI yang dilakukan DJKI telah memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat.

#### **b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. KBKI (Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual) Pembentukan KBKI ini mempunyai tujuan utama yaitu :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI;
- Mendorong pendaftaran dan perlindungan KI secara kolektif dalam suatu kawasan;
- Menjadikan KI sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Wilayah yang ingin ditetapkan sebagai KBKI harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu berasal dari usulan Kantor Wilayah Kemenkum, memiliki jenis ciptaan atau bentuk KI lainnya yang telah terdaftar lengkap dengan nomor permohonannya, memiliki lokasi yang jelas, serta menunjukkan adanya pembinaan dan pengembangan potensi ekonomi yang terdokumentasi dengan baik. Hingga saat ini usulan kawasan berbasis kekayaan Intelektual yang telah diajukan oleh seluruh kantor wilayah sejumlah 41 Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual.

2. Kegiatan *Mobile Intellectual Property Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak* secara serentak. Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berinovasi melalui pendekatan layanan yang adaptif dan inklusif. Pelaksanaan kegiatan *Mobile IP Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak* dilaksanakan secara serentak di seluruh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang dilaksanakan di Kantor DJKI Tangerang pada 26 April 2025. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari program jemput bola DJKI dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat daerah, pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, peneliti, hingga pemerintah daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas pendaftaran KI. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak pada 33 Kantor Wilayah ini berhasil menjangkau sebanyak 17.175 peserta melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi. Dari kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 1.839 permohonan kekayaan intelektual telah diajukan.



3. *Webinar* Obrolan Kreatif Edukasi Kekayaan Intelektual (OKE KI). Merupakan inisiatif strategis dari DJKI untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah interaktif, edukatif, dan inspiratif yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, kreator, seniman, pelajar, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum. Webinar ini merupakan bagian dari misi DJKI untuk mengembangkan budaya sadar hukum dan meningkatkan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu** belum meratanya karakteristik responden, baik dari sisi latar belakang, tingkat pemahaman terhadap pertanyaan kuesioner, maupun kesesuaian antara responden yang mengisi survei dengan jenis layanan KI yang pernah mereka akses atau terima. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hasil survei belum sepenuhnya mencerminkan gambaran kepuasan masyarakat terhadap layanan KI secara menyeluruh.

**d. Terhadap risiko tersebut telah dilakukan tindak pengendalian yaitu** DJKI bekerja sama dengan konsultan independen sebagai pelaksana survei sekaligus pengolah data IKM. Selain penyebaran kuesioner, dilakukan pula *in-depth interview* kepada responden terpilih yang dilaksanakan dalam format diskusi kelompok terarah (FGD). Melalui sesi ini diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengguna, persepsi, serta masukan dan saran responden terhadap layanan KI yang diselenggarakan DJKI. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih jelas terkait kebutuhan, keluhan, serta tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan KI.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini** adalah masyarakat antusias dalam mengajukan permohonan KI. Terbukti dari permohonan KI yang diterima DJKI dan salah satu faktor utama dari antusiasme dalam mengajukan permohonan KI tersebut adalah optimalisasi TI dalam layanan publik KI yang dirasakan masyarakat seperti testimoni dari responden dalam pelaksanaan survei IKM layanan KI tahun 2025. Dampak (outcome) dari kinerja tersebut dirasakan secara nyata oleh masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya antusiasme dalam mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual. Hal ini terlihat dari jumlah permohonan KI yang diterima DJKI, di mana pada tahun 2025 tercatat sebanyak 406.906 permohonan secara keseluruhan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang mencatat 361.031 permohonan, atau mengalami kenaikan sekitar 12,7%.

## 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum

| INDIKATOR                                                   | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum | 3,08<br>Indeks | 3,83<br>Indeks | 124,35% |

Tabel III.16 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, meliputi bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum serta konsultasi hukum.

| Nomor        | Periode      | Nilai Survei       |
|--------------|--------------|--------------------|
| 1            | Triwulan I   | 2,9                |
| 2            | Triwulan II  | 3,44               |
| 3            | Triwulan III | 3,23               |
| 4            | Oktober      | 1,93               |
| <b>Total</b> |              | <b>3,83 Indeks</b> |

Tabel III.17 Hasil Survei Berkala Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum

Nilai ini merupakan akumulasi nilai indeks selama bulan Januari – Oktober 2025 sesuai dengan formulasi perhitungan pada manual IKU tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2020-2024. Jumlah nilai tersebut dibagi tiga (triwulan I-III) sesuai dengan waktu pelaksanaan survei. Terhadap nilai layanan dokumentasi dan informasi hukum, layanan penyuluhan hukum, dan layanan konsultasi hukum didapatkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Sedangkan, layanan bantuan hukum diperoleh dari nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum pada aplikasi SIDBANKUM. Jumlah responden survei layanan pembinaan hukum nasional adalah 1.090 responden. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum didapat dari hasil pengawasan melalui monitoring dan evaluasi penerapan standar layanan bantuan hukum yang dilakukan melalui wawancara ke Penerima Bantuan Hukum dalam rangka menilai kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah pada Kantor Wilayah dan apabila diperlukan dapat bersama dengan Panitia Pengawas Pusat pada BPHN.

Wawancara ke Penerima Bantuan Hukum menggunakan tools monitoring yang terdapat pada aplikasi E-Monev Bankum dalam Sidbankum atau dapat juga menggunakan kuesioner manual yang hasilnya kemudian diinput ke dalam aplikasi E-monev Bankum. Hasil wawancara menghasilkan nilai indeks kinerja Pemberi Bantuan Hukum sebagai indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

| Indikator                                                   | Tahun | Target      | Realisasi   | % Capaian |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum | 2024  | 3,08 Indeks | 3,67 indeks | 119,16%   |
|                                                             | 2025  | 3,08 Indeks | 3,83 Indeks | 124,35%   |

**Tabel III.18 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum**

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian sasaran program meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum Tahun 2025 mengalami peningkatan realisasi dan capaian tahun 2024.

Realisasi terhadap target pada perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 3,83 tidak dapat dibandingkan dengan target pada renstra jangka menengah, dikarenakan formulasi perhitungan yang digunakan berbeda dengan formulasi perhitungan pada renstra 2025-2029.

#### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

1. Layanan bantuan hukum bertujuan untuk memberikan akses keadilan dan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi permasalahan hukum. Penyelenggaraan layanan bantuan hukum diselenggarakan oleh Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum. Pengukuran indeks persepsi kepuasan penerima bantuan hukum menggunakan instrumen indeks kinerja OBH yang ada di aplikasi SIDBANKUM.
2. Layanan dokumentasi dan informasi hukum atau yang lebih dikenal dengan Layanan JDIHN merupakan penyediaan akses dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, cepat, dan mudah. Dalam penyelenggaraannya Pusat JDIHN bertanggungjawab atas akses informasi dimaksud dengan membangun dan mengembangkan website [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id) sebagai platform nasional penyedia dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola oleh pemerintah.
3. Layanan penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat/patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
4. Layanan konsultasi hukum merupakan pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi/petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

Keberhasilan pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum disebabkan oleh kegiatan wawancara mendalam yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah pada Kantor Wilayah, dan dapat didampingi oleh Panitia Pengawas Pusat pada BPHN jika diperlukan. Wawancara dilakukan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Penggunaan tools monitoring pada aplikasi E-Monev Bankum dalam Sidbankum atau kuesioner manual yang hasilnya diinput ke dalam aplikasi tersebut, menghasilkan nilai Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum. Terkait Sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi melalui wawancara telah digunakan secara efektif untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kepuasan layanan Bantuan Hukum. Dengan adanya aplikasi E-Monev Bankum dalam SIDBANKUM sangat berperan besar dalam memudahkan proses pengumpulan data dan analisis, sehingga memungkinkan pemantauan yang akurat dan *real-time*.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Pengelolaan Dokumen Hukum JDIHN terintegrasi belum optimal;
2. Kurangnya Kegiatan penyuluhan hukum sehingga belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; dan
3. Pemberi Bantuan Hukum (PBH) tidak memberikan layanan sesuai standar layanan bantuan hukum.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Sosialisasi standar pengelolaan JDIHN;
2. Validasi Dokumen Hukum;
3. Monitoring dan evaluasi (Penilaian Kinerja JDIHN);
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi penyuluhan hukum dalam hal Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di masyarakat; dan
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini**

bahwa dapat disimpulkan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat memberikan pelayanan bantuan hukum dan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan sangat dibuktikan dengan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang mencapai indeks 3,83.

**6. Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi Atau Pemantauan Dan Peninjauan PUU Yang Dimanfaatkan Terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi Atau Pemantauan Dan Peninjauan PUU Yang Disampaikan Kepada K/L**

| INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi Atau Pemantauan Dan Peninjauan PUU Yang Dimanfaatkan Terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi Atau Pemantauan Dan Peninjauan PUU Yang Disampaikan Kepada K/L | 20%    | 86,96%    | 434,80% |

**Tabel III.19 Target, Realisasi dan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Anev Atau Pemantauan Dan Peninjauan PUU Yang Dimanfaatkan**

Adapun pelaksanaan tindak lanjut terkait rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum atau pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada K/L pada akhir tahun 2024 adalah:

Kegiatan Monev Pelaksanaan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan realisasi sebesar 87% dimanfaatkan (ditindaklanjuti) oleh K/L terkait.

- Rekomendasi PUU yang disampaikan ke K/L= 23 PUU, yang terdiri dari 8 UU, 10 PP, 1 Perpres, 4 Peraturan K/L.
- PUU yang sudah ditindaklanjuti oleh K/L = 20 PUU, yang terdiri dari : 8 UU, 1 Perpres, 7 PP, 3 Permen, 1 Kepmen.
- PUU yang belum ditindaklanjuti oleh K/L = 3 UU, yang terdiri dari : 3 PP.

Tren perbandingan capaian kinerja 2022 – 2024 :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|
| Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan                                                                                                                                                                     | 2022 | TARGET    | 20%    | 49,02%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | REALISASI | 9,80%  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023 | TARGET    | 21%    | 149,66% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | REALISASI | 31,43% |         |
| Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang disampaikan kepada K/L | 2024 | TARGET    | 20%    | 294,1%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | REALISASI | 58,82% |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025 | TARGET    | 20%    | 434,80% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | REALISASI | 86,96% |         |

**Tabel III.20 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Anev Atau Pemantauan Dan Peninjauan PUU Yang Dimanfaatkan**

Jika disandingkan dengan capaian tahun 2024 dengan target yang sama yakni 20%, realisasinya adalah 86,96% sehingga capaian kinerjanya adalah 434,80% (dengan normalisasi capaian 100%), dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2025 belum mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Pada tabel tersebut dapat dilihat perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. capaian realisasi Tahun 2022 dengan target 20% realisasinya adalah 9,80% dengan capaian kinerja 49,02%. Sementara realisasi Tahun 2023 dengan target 21%, capaian realisasinya adalah 31,43% dengan rata-rata capaian kinerja 149,66%. Sedangkan realisasi target tahun 2024 dengan target 20% adalah 58,82% dan capaian kinerjanya sebesar 294,1%. Realisasi terhadap target pada perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 20% tidak dapat dibandingkan dengan target pada renstra jangka menengah, dikarenakan target dan indikator dimaksud tidak lagi menjadi target dan indikator pada renstra 2025-2029.

#### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

Pada semester I Tahun 2025 dibentuk 4 Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, dengan masing-masing tanggung jawab untuk fokus melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Asta Cita, yakni:

1. Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kekuasaan Kehakiman Dalam Mendukung Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi (Asta Cita Ke-7) / Tim Kerja I, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-10.HN.01.01 Tahun 2025;
2. Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Jaminan Produk Halal dalam Rangka Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur (Asta Cita Ke-8) / Tim Kerja II, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-09.HN.01.01 Tahun 2025;
3. Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Logistik dalam Rangka Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Asta Cita Ke-5) / Tim Kerja III, berdasarkan 1) Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-12.HN.01.01 Tahun 2025;
4. Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Keamanan Siber dalam Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Asta Cita Ke-2) / Tim Kerja IV), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-11.HN.01.01 Tahun 2025.

#### **b. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. Pembentukan Tim Kerja Tematik (Asta Cita): Pada Semester II, dibentuk 4 Tim Kerja yang fokus pada isu strategis nasional, menghasilkan total 122 PUU yang dievaluasi;

2. Digitalisasi Melalui Aplikasi Evadata: Penggunaan aplikasi Evadata memungkinkan proses analisis dan evaluasi dilakukan secara digital, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan sinergitas data antar analisis hukum pusat dan daerah;
3. Dukungan Analisis Kantor Wilayah (Daerah): Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah melaksanakan analisis terhadap 256 (dua ratus lima puluh enam) Peraturan Daerah (Perda) dengan tema prioritas seperti swasembada pangan, energi, dan makan bergizi gratis, yang memperluas cakupan evaluasi hukum nasional.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu** belum dipahaminya atau belum dikuasainya prosedur atau metode enam dimensi oleh sebagian Analisis Hukum dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum,

**d. Terhadap risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu** pemilahan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi yang akan disampaikan berdasarkan tingkat urgensitasnya untuk ditindaklanjuti dan pengawasan terhadap ketercapaian target analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan setiap triwulan oleh Ketua Pokja dan melaksanakan Bimtek Analisis dan Evaluasi Hukum terkait penerapan metode enam dimensi, serta kegiatan pendampingan dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi untuk JF Analisis Hukum.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini** bahwa tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum meningkat signifikan hingga mencapai 87% menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan semakin relevan dan dibutuhkan dalam proses perumusan, perubahan, serta penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan. Peningkatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya kualitas rekomendasi yang berbasis data dan mudah diterapkan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, keselarasan dengan agenda prioritas nasional dan kebutuhan strategis kementerian/lembaga, meningkatnya komitmen unit kerja terhadap pentingnya analisis dan evaluasi hukum, serta optimalisasi mekanisme tindak lanjut dan pemantauan.

Selanjutnya, berikut penjelasan analisa capaian kinerja terhadap indikator Indeks Kepastian Hukum Nasional:

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| SASARAN                                             | INDIKATOR                       | TARGET     | REALISASI  | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI | Indeks Kepastian Hukum Nasional | 3,1 Indeks | 3,6 Indeks | 116,12% |

Tabel III.21 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepastian Hukum Nasional

Formulasi perhitungan capaian:

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepastian Hukum Nasional}}{\sum \text{Target Indeks Kepastian Hukum Nasional}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,6 \text{ Indeks}}{3,1 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 116,12\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Indeks Kepastian Hukum Nasional berhasil meraih target yang ditetapkan dengan capaian 116,12%. Hal ini menandakan hukum menjadi panglima yang berfungsi sebagai pedoman tetap dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan tanpa adanya diskriminasi.

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis “ Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI” dan Indikator Kinerja “ Indeks Kepastian Hukum Nasional” merupakan sasaran dan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Menteri Hukum pada awal Tahun 2025. Sehingga sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra, indikator ini tidak ada pada Renstra Kemenkumham Tahun 2020 – 2024 dan tidak ada pada Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029.

## **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepastian Hukum Nasional hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

## **5. Analisa Penyebab dan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Kinerja**

Tercapainya target indikator Indeks Kepastian Hukum Nasional tidak lepas dari kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Indikator ini dibentuk oleh 8 parameter yang diampu oleh Unit Kerja Eselon I. Dan seluruh parameter berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi indikator ini. Masing-masing parameter sudah menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan target, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan serta mitigasi risiko yang direncanakan.

## SASARAN STRATEGIS 2 "TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI"

### 2. Indikator Sasaran Strategis "Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum"

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merepresentasikan tingkat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, berikut penjelasan analisa capaian kinerja terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum:

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| SASARAN                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                     | TARGET    | REALISASI    | CAPAIAN | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM<br>(Tahun 2024 masih instansi Kementerian Hukum dan HAM) | 90 Indeks | Dalam Proses | -       | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB.<br><br>Namun Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 adalah 90,38 dengan rincian:<br>RB General 86,33<br>RB Tematik 4,05 |

Tabel III.22 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal, maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang akan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023, dengan formula: Nilai RB = Nilai RB General (Nilai Maksimal 100) + Nilai RB Tematik (Nilai Maksimal 10)

Dimana,

- Nilai RB General, dengan nilai maksimal 100.
- Nilai RB Tematik, dengan nilai maksimal 10.



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan Kementerian/Lembaga di tingkat meso. Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum merupakan upaya yang difokuskan pada penyelesaian isu hulu atau perbaikan manajemen internal yang lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi instansi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun pelaksanaan RB General dilaksanakan melalui perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso yakni mandat kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan Nasional, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik adalah Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penyelesaian isu hilir atau percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Adapun tema RB Tematik tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Mendorong Hilirisasi;
4. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
5. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional; dan
6. Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro merupakan strategi dalam mendukung Reformasi Birokrasi level meso maupun level makro. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, terdapat 2 (dua) strategi Reformasi Birokrasi level mikro, yaitu:

1. Strategi 1. Dimensi Prioritas Nasional;
2. Strategi 2. Dimensi Prioritas Instansional.

Kedua strategi RB level mikro tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) tahapan Reformasi Birokrasi level mikro, yaitu:

- Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi;
- Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala (triwulan); dan
- Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

| INDIKATOR                                                                                          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum (Tahun 2024 masih instansi Kementerian Hukum dan HAM) | 78,98 | 80,01 | 80,18 | 79,55 | 83,63 | 90,38 | Dalam Proses |

Tabel III.23 Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Hingga saat ini, Kementerian PANRB belum menerbitkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum tahun 2025. Namun jika dilihat hasil evaluasi RB Kementerian Hukum dan HAM beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan. Terutama pada tahun 2024 meningkat signifikan sebesar 6,75 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan melayani seperti perbaikan signifikan dalam birokrasi, tingginya integritas, transparansi, serta kualitas layanan publik yang prima, yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis

Tahun 2025 adalah awal periode perencanaan jangka menengah yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/405/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Nilai RB Kemenkumham Tahun 2024 sebesar 90,38 dengan rincian RB General 86,33 dan RB Tematik 4,05, dimana nilai tersebut digunakan menjadi baseline dalam penetapan target RB Kemenkum Tahun 2025 – 2029.

| TARGET                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INDIKATOR                                    | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
| Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,38<br>Indeks | 90,40<br>Indeks | 90,42<br>Indeks | 90,44<br>Indeks | 90,46<br>Indeks |

Tabel III.24 Perbandingan Target Jangka Menengah Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Namun berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, bahwa pada tahun 2024 Kementerian/Lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin.

Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya. Dan berdasarkan Nilai RB Tahun 2024 sebesar 90,38, Kementerian Hukum telah berhasil mencapai rata-rata standar nasional.

(Sumber: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dua-dekade-menuju-indonesia-emas-gdrbn-2025-2045-fokus-pada-transformasi-digital-pemerintah-hingga-peningkatan-kompetensi-aparatur>).

| INDIKATOR                                    | STANDAR NASIONAL RB K/L TAHUN 2024 | KEMENTERIAN HUKUM |                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                    | 2024              | 2025                                                |
| Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 82,98                              | 90,38             | Hasil Evaluasi belum terbit dari Kementerian PAN-RB |

Tabel III.25 Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

## 5. Penyebab Keberhasilan

Saat ini, Kementerian Hukum masih menunggu hasil evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dari Kementerian PAN-RB. Namun, untuk mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 telah dilakukan langkah/kegiatan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti temuan BPK ;
2. Menindaklanjuti Aol terkait PM SPIP Terintegasi di lingkungan Kementerian Hukum;
3. Menindaklanjuti Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait penilaian SAKIP di tahun sebelumnya;
4. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) berdasarkan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (LHE RB) Kementerian Hukum Tahun 2024. RATL tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Kementerian Hukum Tahun 2025. Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum telah melaksanakan RATL pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025, dan telah dilakukan monev internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaannya.
5. Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada satuan kerja melalui sosialisasi secara masif;
6. Pemenuhan data dukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Rencana Kerja Tahunan RB General dan Tematik oleh satuan kerja pada aplikasi E-RB setiap triwulan;
7. Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025;
8. Penyampaian capaian hasil monitoring dan evaluasi RKT RB General dan Tematik melalui Portal RB Nasional Kementerian PAN-RB setiap triwulan;

9. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi hasil evaluasi RB Tahun 2024 oleh unit pengampu Indeks RB Meso dalam rangka peningkatan Indeks RB;

10. Pelaksanaan tindak lanjut RB Meso hasil evaluasi 2024 oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum baik di tingkat pusat ataupun wilayah.

**6. Kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mencapai target, antara lain:**

1. Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ini adalah belum tersedianya anggaran yang optimal dalam Pelaksanaan RB Meso, sehingga penanggung jawab terkendala dalam menjalankan rencana aksi RB meso yang telah disusun dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan meso sehingga berdampak terhadap upaya peningkatan nilai RB General. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meso Kementerian Hukum pada tahun 2025 merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025;

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan internalisasi dan monitoring secara berkala di tingkat wilayah; dan

3. Implementasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi belum optimal.

**7. Upaya dalam meningkatkan pencapaian target:**

Penambahan anggaran yang tepat bagi pelaksanaan RB meso menjadi salah satu solusi yang efektif dalam upaya mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Selain itu penanggung jawab RB meso diharapkan agar tetap konsisten dan berkomitmen dalam upaya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lakukan mitigasi atas pemberitaan/isu negatif terkait Kementerian Hukum;

2. Lakukan publikasi positif atas capaian kinerja Kementerian Hukum;

3. Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui inovasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;

4. Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SPAK-Survei Persepsi Anti Korupsi dan SPKP-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) melalui aplikasi 3AS pada periode waktu yang telah ditentukan secara terencana, terprogram, dan terlaksana secara berkelanjutan, dengan jumlah perhitungan responden sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie; dan

5. Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana aksi RB Meso secara berkala setiap triwulan.

# • Capaian Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 23 Oktober 2025

## SASARAN STRATEGIS 1 "TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM DI SELURUH WILAYAH NKRI"

### 1. Indikator Kinerja Utama 1 "Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum"

Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah metode untuk mengukur tingkat penegakan hukum sesuai kewenangan dan tingkat pelayanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum.

Indeks ini dibentuk oleh 7 parameter, yaitu:

| No | Parameter                                                                                    | Target         | Realisasi      | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1  | Indeks penegakan hukum AHU                                                                   | 3,5<br>Indeks  | 3,88<br>Indeks | 110,86% |
| 2  | Indeks penegakan hukum perlindungan KI                                                       | 3,05<br>Indeks | 3,75<br>Indeks | 122,95% |
| 3  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU                                              | 3,71<br>Indeks | 3,86<br>Indeks | 104,04% |
| 4  | Indeks kemudahan berusaha pada layanan badan usaha dan keperdataan                           | 3,10<br>Indeks | 3,65<br>Indeks | 117,74% |
| 5  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI                  | 3,36<br>Indeks | 3,43<br>Indeks | 102,08% |
| 6  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum nasional                         | 3,68<br>Indeks | 3,87<br>Indeks | 105,16% |
| 7  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum | 3,48<br>Indeks | 3,87<br>Indeks | 111,21% |

Tabel III.26 Capaian Parameter Pembentuk Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum

Masing-masing parameter diatas memiliki bobot masing-masing dalam pengukuran Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, sehingga hasil dari pembobotan sebagai berikut:

| No                                          | Parameter                                                                                    | Bobot       | Realisasi      | Realisasi x Bobot  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 1                                           | Indeks penegakan hukum AHU                                                                   | 17,50%      | 3,88<br>Indeks | 0,68               |
| 2                                           | Indeks penegakan hukum perlindungan KI                                                       | 17,50%      | 3,75<br>Indeks | 0,66               |
| 3                                           | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan AHU                                              | 12,50%      | 3,86<br>Indeks | 0,48               |
| 4                                           | Indeks kemudahan berusaha pada layanan badan usaha dan keperdataan                           | 15,00%      | 3,65<br>Indeks | 0,55               |
| 5                                           | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI                  | 12,50%      | 3,43<br>Indeks | 0,43               |
| 6                                           | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum nasional                         | 12,50%      | 3,87<br>Indeks | 0,48               |
| 7                                           | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum | 12,50%      | 3,87<br>Indeks | 0,48               |
| <b>Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum</b> |                                                                                              | <b>100%</b> |                | <b>3,76 Indeks</b> |

Tabel III.27 Perhitungan Bobot Parameter Pembentuk Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum

#### Formulasi Perhitungan:

#### Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum =

$(WIGakum\ AHU \times IGakum\ AHU) + (WIGAKKUM\ KI \times IGAKKUM\ KI) + (WIKM\ AHU \times IKM\ AHU) + (WIKM\ KI \times IKM\ KI) + (WIKB \times IKB) + (WIKM\ PHN \times IKM\ PHN) + (WIKM\ PKSDM\ KUM \times PKSDM\ KUM)$

Dimana,

- WIGakum AHU = Bobot Indeks Penegakan Hukum AHU
- IGakum AHU = Indeks Penegakan Hukum AHU
- WIGAKKUM KI = Bobot Indeks Penegakan Hukum Pelindungan KI
- IGAKKUM KI = Indeks Penegakan Hukum Pelindungan KI
- WIKM AHU = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU
- IKM AHU = Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU
- WIKM KI = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
- IKM KI = Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
- WIKB = Bobot Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan
- IKB = Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan

- WIKM PHN = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
- IKM PHN = Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
- WIKM PKSDM KUM = Bobot Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
- PKSDM KUM = Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

**Maka dari itu, realisasi:**

$$\begin{aligned} & \Sigma (17,5\% \times 3,88) + (17,5\% \times 3,75) + (12,5\% \times 3,86) + (15\% \times 3,65) + (12,5\% \times 3,43) \\ & + (12,5\% \times 3,87) + (12,5\% \times 3,87) \\ & = 0,68 + 0,66 + 0,48 + 0,55 + 0,43 + 0,48 + 0,48 \\ & = 3,76 \text{ Indeks} \end{aligned}$$

**Sehingga, Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 sebesar 3,76 Indeks.**

Penjelasan masing-masing parameter:

**1. Indeks Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum**

| INDIKATOR                                      | TARGET        | REALISASI      | CAPAIAN |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Indeks Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum | 3,5<br>Indeks | 3,88<br>Indeks | 110,86% |

**Tabel III.28 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Indeks Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum**

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum AHU sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Parameter keberhasilan penegakan hukum AHU yang profesional ditentukan oleh 4 (empat) parameter, yaitu:

1. Persentase kerjasama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat;
2. Persentase data dan informasi Ditjen AHU hasil kerja sama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap total data dan informasi AHU yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama. Data yang dimaksud adalah Data Badan Usaha sesuai kerja sama;
3. Persentase keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan; dan
4. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (Penyelidikan dan/atau Penyidikan).

Semakin tinggi capaian kinerja ini menunjukkan penegakan Hukum AHU semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat.

#### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja**

1. Kerja sama penegakan hukum lintas batas adalah kerja sama formal antarnegara untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi hukum nasional dalam menyelesaikan perkara pidana yang melintasi wilayah negara, di mana Mutual Legal Assistance (MLA/bantuan hukum timbal balik) untuk mengumpulkan bukti, dan Ekstradisi untuk menyerahkan tersangka. Dalam konteks ini, Ditjen AHU melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional bertindak sebagai otoritas pusat yang menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasi pelaksanaannya di Indonesia, baik permintaan masuk maupun keluar terkait MLA dan Ekstradisi. Setiap permintaan kerja sama yang didapatkan pada periode November s.d. Desember 2025 telah ditindaklanjuti dalam periode yang sama. Keberhasilan pencapaian pada indikator ini diukur dengan formulasi perhitungan jumlah permintaan MLA dan Ekstradisi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah permintaan yang masuk dikali 100%. Sehingga diperoleh persentase tindak lanjut sebesar 100%;
2. Terhadap data dan informasi AHU hasil kerja sama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dijelaskan bahwa jumlah akses yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga merupakan data dan informasi AHU hasil kerja sama yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu sebanyak 8070 kali. Sehingga capaian data dan informasi korporasi hasil kerja sama yang dimanfaatkan APH atau total data dan informasi korporasi yang diberikan untuk mendukung penegakan hukum berdasarkan kerjasama adalah 100%;
3. Layanan Keterangan Ahli Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Pidana adalah memberikan keterangan ahli hukum pidana berdasarkan permohonan. Pada Tahun 2025, Direktorat Pidana menerima 70 Permohonan keterangan ahli hukum pidana dan dapat diselesaikan 70 permohonan sehingga persentase capaian keterangan ahli di bidang hukum pidana yang diberikan sesuai permintaan adalah 100%;
4. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/ atau penyidikan) dihitung berdasarkan jumlah PPNS aktif pada Kementerian/Lembaga dibagi dengan total PPNS pada database PPNS Ditjen AHU dikalikan 100%. Jumlah PPNS aktif pada Kementerian/Lembaga sebanyak 15.772, sedangkan jumlah total PPNS pada database Ditjen AHU sebanyak 17.563 PPNS. Sehingga 1) persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan) adalah sebesar 89,80%.

#### **b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. Perjanjian Kerja sama yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Lembaga Aparat Penegak Hukum, guna untuk mendukung Penegakan Hukum;
2. Monitoring secara berkala ke Kementerian/Lembaga yang memiliki PPNS terkait dengan PPNS yang masih bekerja di bidangnya;
3. Penyelesaian permohonan Keterangan Ahli yang diajukan oleh pemohon secara tepat;
4. Tindak Lanjut permintaan kerja sama dalam penegakan hukum lintas negara oleh negara lain yang tepat waktu.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Koordinasi antar Apgakum dan Kementerian/ Lembaga yang kurang efektif;
2. Kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
3. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli;
4. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan permintaan MLA dan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
5. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;
6. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
7. *Database* yang dimiliki Ditjen AHU perlu update, namun data dapat *update* apabila K/L lain melakukan pelaporan di dalam laman ppns.ahu.go.id.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan kerja sama kepada Apgakum terkait permintaan ekstradisi yang diterima;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan APH terkait permintaan ekstradisi pada saat proses penanganan penyelesaian permintaan ekstradisi;
3. Menyusun Sistem Pelaporan PPNS;
4. Melakukan sosialisasi pelaporan kepada K/L;
5. Menyusun *timeline* pengerjaan keterangan ahli agar tidak ada yang terlewatkan;
6. Melibatkan pegawai pelaksana untuk membantu mengumpulkan bahan terkait kasus yang dimintakan keterangan ahli;
7. Melibatkan seluruh tim untuk menyelesaikan keterangan ahli;
8. Melakukan koordinasi dengan APH dalam menindaklanjuti permintaan MLA dan ekstradisi *outgoing*;
9. Melakukan *case work meeting* dengan otoritas berwenang terkait penanganan MLA dan ekstradisi di negara diminta;
10. Menyusun skala prioritas penyelesaian permintaan MLA berdasarkan kriteria yang ditentukan Ditjen AHU;
11. Meminta bantuan hukum dalam menghadapi upaya hukum yang dilakukan pihak tersangka/terdakwa/terpidana dalam pemenuhan MLA;
12. Melakukan komunikasi/koordinasi terbatas dengan pihak-pihak terkait sesuai SOP;
13. Melakukan korespondensi dengan negara diminta untuk dapat Menindaklanjuti permintaan ekstradisi dengan dasar perjanjian multilateral terkait ekstradisi;

14. Melakukan komunikasi secara intensif dengan negara yang tidak menindaklanjuti permintaan ekstradisi karena tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia;
15. Melakukan peninjauan dengan negara diminta untuk membentuk perjanjian ekstradisi dengan negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia;
16. Menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan kerja sama kepada APH terkait permintaan ekstradisi yang diterima;
17. Melakukan koordinasi secara intensif dengan APH terkait permintaan ekstradisi pada saat proses penanganan penyelesaian permintaan ekstradisi;
18. Memberikan surat kepada negara yang tidak merespon permintaan MLA agar dapat menindaklanjuti permohonan MLA Pemerintah Indonesia;
19. Koordinasi dengan K/L lain untuk melakukan update data pada laman ppns.ahu.go.id.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini yaitu:**

1. Proses penanganan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi menjadi lebih responsif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung penanganan kejahatan lintas batas negara secara efektif;
2. Terbangunnya kepastian hukum lintas batas negara yang memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama penegakan hukum lintas batas;
3. Data badan usaha yang dimanfaatkan secara nyata oleh Apgakum sebagai alat bukti, penelusuran aset, subjek hukum dan jejaring korporasi;
4. Pemanfaatan data mendukung pembuktian perkara yang lebih kuat dan berbasis data;
5. Apgakum memperoleh penafsiran hukum administratif yang lebih komprehensif, sahih, dan konsisten;
6. Penanganan perkara menjadi lebih tepat sasaran karena melibatkan PPNS yang aktif dan kompeten di bidangnya serta mengurangi risiko perkara stagnan, cacat prosedur, atau tidak optimal akibat PPNS yang sudah tidak menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

## 2. Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

| INDIKATOR                                               | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual | 3,05<br>Indeks | 3,75<br>Indeks | 122,95% |

Tabel III.29 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pelindungan Kekayaan Intelektual

Sasaran penegakan hukum di DJKI dinilai dengan indikator indeks penegakan hukum kekayaan intelektual yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Parameter keberhasilan penegakan hukum KI ditentukan oleh 3 (tiga) parameter, yaitu:

- 
- 
1. Banyaknya wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual (proporsi 75%);
  2. Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Pusat (proporsi 15%); dan
  3. Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Wilayah (Proporsi 10%).

Proporsi indikator dalam perumusan Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual (IPHP KI) ditetapkan untuk menekankan keberhasilan penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan dampak nyata di wilayah, sehingga wilayah yang aman dari pelanggaran KI diberikan bobot terbesar sebesar 75 persen karena mencerminkan kondisi kepatuhan, efektivitas pengawasan, serta terbentuknya efek jera yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Sementara itu, penyelesaian pelanggaran KI di pusat diberi bobot 15 persen karena memiliki peran strategis dan normatif dalam penanganan kasus kompleks dan berskala nasional, namun tidak secara langsung merepresentasikan kondisi lapangan secara menyeluruh. Adapun penyelesaian pelanggaran KI di wilayah diberikan bobot 10 persen sebagai indikator pelengkap yang menggambarkan kapasitas operasional daerah, dengan bobot yang lebih kecil untuk menghindari bias penilaian berbasis banyaknya perkara dan menjaga agar indeks tetap berfokus pada outcome penegakan hukum, bukan semata-mata output penindakan.

**a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

Evaluasi terhadap penyesuaian target akan dilakukan setelah tersedia data kinerja yang lebih stabil, guna memastikan target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan berkelanjutan, capaian ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Tingginya wilayah aman dari pelanggaran KI;
2. Tingginya tingkat penyelesaian pelanggaran KI di tingkat pusat;
3. Administratif PPNS yang optimal;
4. Penguatan peran kantor wilayah dalam penegakan hukum;
5. Optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi KI);
6. Penguatan regulasi dan pedoman teknis penegakan hukum KI;
7. Sinergi lintas instansi dan pemangku kepentingan.

**b. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. Pelaksanaan kegiatan pencegahan secara *on the spot* kepada pelaku usaha yang melampaui target wilayah dan lokus (13 wilayah dan 135 lokus);
2. Kegiatan pencegahan berbasis inisiasi Kanwil dan *stakeholder* dengan keterlibatan ratusan peserta;
3. Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI, baik sertifikasi baru maupun re-sertifikasi, di berbagai wilayah;
4. Penyidikan pelanggaran KI oleh PPNS pusat dengan rasio penyelesaian perkara melebihi jumlah laporan yang masuk;
5. Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sebagai bagian dari optimalisasi manajemen perkara;

- 
- 
6. Koordinasi kelembagaan dan administrasi PPNS, termasuk pemutakhiran data penyidik;
  7. Rapat koordinasi dan persiapan Rakor PPNS untuk penguatan tata kelola penyidikan;
  8. Penanganan pelanggaran KI oleh Kanwil, baik melalui penyelesaian pengaduan maupun dukungan penyidikan;
  9. Pelaksanaan CPP Kanwil di bidang penegakan hukum KI;
  10. Keterlibatan Kanwil dalam kegiatan pencegahan dan sertifikasi pusat perbelanjaan;
  11. Pelaksanaan mediasi KI di tingkat pusat dan Kanwil, dengan 24 mediasi berhasil diselesaikan di wilayah;
  12. Implementasi Pedoman Mediasi KI sebagai dasar penyelesaian sengketa alternatif;
  13. Peningkatan peran Kanwil dalam layanan mediasi KI;
  14. Penetapan Permenkum Nomor 47 Tahun 2025 tentang penanganan laporan pelanggaran KI dalam sistem elektronik;
  15. Penetapan Perdirjen KI tentang Pedoman Mediasi KI;
  16. Penyusunan kebijakan teknis pendukung penegakan hukum KI;
  17. Penandatanganan dan implementasi PKS dengan Komdigi, Bea Cukai, e-Commerce, dan mitra strategis;
  18. Rapat koordinasi dan FGD Satgas Pengawasan dan Penanggulangan Pelanggaran KI;
  19. Kegiatan internasional dan regional (*ASEAN, workshop IPR enforcement*).

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat beberapa risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Ketergantungan capaian indeks yang tinggi pada dominasi wilayah aman (75%), sehingga penurunan kecil pada wilayah dengan intensitas pelanggaran tinggi berpotensi berdampak signifikan terhadap skor agregat;
2. Kapasitas penanganan pelanggaran KI di daerah (10%) yang masih timpang antarwilayah berisiko menahan peningkatan indeks lebih lanjut;
3. Kompleksitas koordinasi lintas instansi dalam penyelesaian pelanggaran KI tingkat pusat (15%) berpotensi memperlambat penyelesaian kasus.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Penguatan strategi pencegahan melalui pemetaan dan pemeliharaan wilayah aman berbasis rasio pengaduan terhadap jumlah KI terdaftar;
2. Optimalisasi mekanisme penanganan dan penyelesaian pelanggaran KI di tingkat pusat melalui standarisasi prosedur dan prioritasasi kasus berdampak luas;
3. Peningkatan kapasitas aparat dan koordinasi pemerintah daerah untuk mendorong efektivitas penanganan pelanggaran KI di daerah, meskipun kontribusinya relatif kecil terhadap bobot indeks.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini yaitu:**

1. Meningkatnya kepastian hukum dan rasa aman bagi pemegang KI di sebagian besar wilayah, tercermin dari 75% wilayah kategori aman;
2. Penyelesaian pelanggaran KI di tingkat pusat yang lebih terstruktur, memberikan efek jera dan sinyal penegakan hukum yang konsisten;
3. Perbaikan bertahap iklim perlindungan KI di daerah, meskipun masih memerlukan penguatan agar kontribusinya terhadap indeks dan dampak nyata semakin signifikan.

**3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum**

| INDIKATOR                                                           | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>PK 7 Januari 2025</b>                                            |             |             |         |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum | 3,5 Indeks  | 3,86 Indeks | 110,28% |
| <b>PK 23 Oktober 2025</b>                                           |             |             |         |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum | 3,71 Indeks | 3,86 Indeks | 104,04% |

**Tabel III.30 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum Berdasarkan 2 PK**

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum merupakan indikator yang ada pada kedua dokumen PK, namun yang membedakan hanyalah target. Pada PK 7 Januari 2025 target sebesar 3,5 Indeks dan pada PK 23 Oktober 2025 target sebesar 3,71 Indeks. Kenaikan target ini dikarenakan hasil survei kepuasan terhadap layanan AHU sudah sangat baik, sehingga target yang baru diharapkan dapat memacu kinerja pelayanan yang semakin baik lagi setiap tahunnya. Terhadap indikator ini telah diberikan penjelasan yang memadai pada sub bagian Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025 untuk menghindari duplikasi data.

**4. Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan**

| INDIKATOR                                                          | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>PK 7 Januari 2025</b>                                           |             |             |         |
| Indeks Kemudahan Berusaha Pada Layanan Administrasi Hukum Umum     | 3,10 Indeks | 3,65 Indeks | 117,74% |
| <b>PK 23 Oktober 2025</b>                                          |             |             |         |
| Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan | 3,10 Indeks | 3,65 Indeks | 117,74% |

**Tabel III.31 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan Berdasarkan 2 PK**

Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan merupakan indikator pada dokumen Perjanjian Kinerja baru dimana indikator ini sama dengan indikator pada Perjanjian Kinerja lama yaitu Indeks kemudahan berusaha pada layanan AHU.

Target, Realisasi dan Capaian terhadap indikator ini juga sama namun yang membedakan adalah penamaan indikator yang pada dokumen Perjanjian Kinerja baru lebih di khususkan pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan. Sehingga terhadap indikator ini telah dijelaskan pada sub bagian Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025.

#### 5. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

| INDIKATOR                                                                                    | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>PK 7 Januari 2025</b>                                                                     |             |             |         |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual                             | 3,36 Indeks | 3,43 Indeks | 102,08% |
| <b>PK 23 Oktober 2025</b>                                                                    |             |             |         |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual | 3,36 Indeks | 3,43 Indeks | 102,08% |

Tabel III.32 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI Berdasarkan 2 PK

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan KI merupakan indikator pada dokumen Perjanjian Kinerja baru dimana indikator ini sama dengan indikator pada Perjanjian Kinerja lama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan KI.

Target, Realisasi dan Capaian terhadap indikator ini juga sama namun yang membedakan adalah penamaan indikator yang pada dokumen Perjanjian Kinerja baru lebih di khususkan pada layanan pelindungan dan pemanfaatan KI. Sehingga terhadap indikator ini telah dijelaskan pada sub bagian Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025.

#### 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional

| INDIKATOR                                                            | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>PK 7 Januari 2025</b>                                             |             |             |         |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum          | 3,08 Indeks | 3,83 Indeks | 124,35% |
| <b>PK 23 Oktober 2025</b>                                            |             |             |         |
| Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional | 3,68 Indeks | 3,87 Indeks | 105,16% |

Tabel III.33 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional Berdasarkan 2 PK

Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum nasional pada tahun 2025 adalah 3,68 Indeks dengan formulasi penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan pembinaan hukum. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum nasional merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum nasional yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dinilai oleh penerima layanan melalui aplikasi 3AS milik BSK Hukum. Jumlah responden survei layanan pembinaan hukum nasional adalah 1.090 responden. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum nasional Tahun 2025 adalah sebesar 3,875 (Indeks) dengan persentase capaian sebesar 105,30%.

Rincian Realisasi Indeks Layanan Pembinaan Hukum adalah sebagai berikut:

| Bulan               | Layanan Pembinaan Hukum Nasional |
|---------------------|----------------------------------|
| Januari - Oktober   | 3,83                             |
| November - Desember | 3,92                             |
| <b>RATA-RATA</b>    | <b>3,87</b>                      |

Tabel III.34 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pembinaan Hukum Nasional

Realisasi ini didapatkan melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada aplikasi 3AS BSK Hukum (<https://survei-bsk.kemenkum.go.id/>). Pada bulan Januari-Oktober nilai diambil dari formulasi perhitungan pada manual IKU berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, sedangkan pada bulan November-Desember nilai diambil seluruhnya dari nilai SKM-SPKP pada aplikasi 3AS BSK Hukum.

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada capaian kinerja tahun sebelumnya hanya 4 (empat) layanan (layanan bantuan hukum, layanan dokumentasi dan informasi hukum, layanan penyuluhan hukum, dan layanan konsultasi hukum) yang dijadikan komposit dalam penilaian layanan pembinaan hukum nasional. Sementara pada perjanjian kinerja yang baru, seluruh layanan yang ada dalam survei 3AS dijadikan sebagai komposit penunjang nilai layanan pembinaan hukum nasional. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kementerian Hukum tahun 2025-2029, capaian kinerja tahun 2025 sudah melampaui target jangka menengah. Terhadap kondisi tersebut, direkomendasikan bahwa pada tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2025.

#### **a. Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja:**

Faktor keberhasilan dalam pemberian layanan pembinaan hukum nasional adalah perbaikan standar layanan yang dilakukan oleh BPHN serta evaluasi terhadap hasil survei sebelumnya, sehingga pemberi layanan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada penerima layanan.

**b. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

Keberhasilan pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum disebabkan oleh kegiatan wawancara mendalam yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah pada Kantor Wilayah, dan dapat didampingi oleh Panitia Pengawas Pusat pada BPHN jika diperlukan. Wawancara dilakukan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Penggunaan *tools monitoring* pada aplikasi *E-Monev Bankum* dalam Sidbankum atau kuesioner manual yang hasilnya diinput ke dalam aplikasi tersebut, menghasilkan nilai Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum. Terkait Sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi melalui wawancara telah digunakan secara efektif untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kepuasan layanan Bantuan Hukum. Dengan adanya aplikasi *E-Monev Bankum* dalam SIDBANKUM sangat berperan besar dalam memudahkan proses pengumpulan data dan analisis, sehingga memungkinkan pemantauan yang akurat dan *real-time*.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu** tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan tindak pengendalian yaitu** Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melakukan rencana tindak pengendalian berupa optimalisasi kinerja aplikasi layanan dokumen dan informasi hukum, monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara berkala, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan penyusunan instrumen pengawasan layanan penyuluhan hukum.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini:**

Bahwa dapat disimpulkan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat memberikan pelayanan bantuan hukum dan dokumentasi hukum kepada masyarakat dengan sangat dibuktikan dengan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum yang mencapai indeks 3,87.

**7. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum**

| INDIKATOR                                                                            | TARGET         | REALISASI      | CAPAIAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum | 3,48<br>Indeks | 3,87<br>Indeks | 111,21% |

Tabel III.35 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum

**a. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, perencanaan layanan yang berbasis kebutuhan pengguna, melalui pemetaan kebutuhan kompetensi dan penyesuaian materi pelatihan dengan tuntutan tugas dan perkembangan regulasi, sehingga layanan dirasakan relevan dan bermanfaat. Kedua, kualitas penyelenggaraan layanan yang semakin konsisten, didukung oleh standar operasional yang jelas, serta metode pembelajaran yang adaptif. Ketiga, penguatan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, yang meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan peserta. Keempat, responsivitas penyelenggara terhadap umpan balik peserta, melalui mekanisme survei dan tindak lanjut hasil evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, komitmen pimpinan dan koordinasi lintas unit kerja turut berperan dalam menjaga mutu layanan dan mendorong budaya peningkatan kinerja. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut berkontribusi signifikan terhadap capaian IKM yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan pengembangan kompetensi SDM Bidang Hukum.

**b. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target:**

1. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bidang hukum dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kebutuhan kompetensi jabatan dan isu hukum strategis, penerapan metode pembelajaran blended learning dan studi kasus aktual, serta pelibatan widyaiswara, praktisi, dan narasumber yang kompeten;
2. Penguatan kualitas layanan penyelenggaraan diklat dilakukan melalui standarisasi layanan mulai dari pendaftaran hingga pasca pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan profesionalisme panitia dan pengelola melalui SOP layanan yang jelas;
3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara berkala pada setiap kegiatan pengembangan kompetensi, disertai analisis hasil survei untuk menyusun rencana aksi perbaikan layanan;
4. Peningkatan Kompetensi Pengelola Layanan Pengembangan SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial bagi pengelola pelatihan dan layanan serta penguatan budaya service excellence dan orientasi kepuasan pengguna.

**c. Sehubungan dengan pencapaian target, terdapat risiko yang mungkin atau telah terjadi yaitu:**

1. Kualitas penyelenggaraan layanan yang belum merata;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung;
3. Responsivitas layanan yang belum optimal;
4. Partisipasi responden dalam pengisian survei IKM rendah;
5. Keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi;
6. Perubahan kebijakan dan regulasi.

**d. Terhadap beberapa risiko tersebut, telah dilakukan beberapa tindak pengendalian yaitu:**

1. Menyusun dan menerapkan standar layanan pengembangan kompetensi yang terukur;
2. Penguatan sarana dan prasarana pendukung;
3. Peningkatan responsivitas dan mekanisme umpan balik;
4. Sosialisasi dan pendampingan pengisian survei IKM;
5. Perencanaan dan penyesuaian anggaran secara selektif;
6. Pemantauan regulasi secara berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan internal.

**e. Outcome/dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja ini yaitu**

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, efektivitas pengembangan kompetensi, serta kepercayaan pengguna layanan. Hasil pengukuran IKM menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan penyelenggaraan layanan, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme penyelenggara.

Selanjutnya, berikut penjelasan analisa capaian kinerja terhadap indikator Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum:

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| SASARAN                                             | INDIKATOR                            | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI | Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum | 3,39 Indeks | 3,76 Indeks | 110,91% |

Tabel III.36 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum

Formulasi perhitungan capaian:

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,76 \text{ Indeks}}{3,39 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 110,91\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum berhasil meraih target yang ditetapkan dengan capaian 110,02%. Hal ini menandakan tingkat penegakan hukum dan pelayanan hukum yang diberikan Kementerian Hukum sudah baik sesuai dengan kewenangan.



## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis “ Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI” dan Indikator Kinerja “Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum” merupakan sasaran dan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Menteri Hukum pada 23 Oktober 2025 pasca pengesahan Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029. Sehingga sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra, indikator ini tidak ada pada Renstra Kemenkumham Tahun 2020 – 2024 dan tidak ada pada Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029.

## **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

## **5. Analisa Penyebab dan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Kinerja**

Tercapainya target indikator Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum tidak lepas dari kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Indikator ini dibentuk oleh 7 parameter yang diampu oleh Unit Kerja Eselon I. Seluruh parameter mencapai target diatas 100% yang memberikan kontribusi signifikan atas ketercapaian indikator ini. Masing-masing parameter sudah menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan target, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan serta mitigasi risiko yang direncanakan.

## 2. Indikator Kinerja Utama 2 “Indeks Budaya Hukum”

Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Budaya hukum memiliki 2 dimensi yaitu:

1. *Internal legal culture*: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara;
2. *External legal culture*: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas

Oleh karenanya, budaya hukum juga dapat dikatakan bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memandang hukum dan bagaimana hukum itu diposisikan.

Indeks Budaya Hukum merupakan salah satu pilar dalam pengukuran Indeks Pembangunan Hukum. Tujuan Pengukuran dalam pilar ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, kesadaran, hingga kepatutan hukum masyarakat serta untuk mengetahui tingkat kepatutan hukum lembaga hukum.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| SASARAN                                             | INDIKATOR           | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI | Indeks Budaya Hukum | 0,83 Indeks | 0,81 Indeks | 97,59%  |

Tabel III.37 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Budaya Hukum

Formulasi perhitungan capaian:

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Budaya Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Budaya Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0,81 \text{ Indeks}}{0,83 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 97,59\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Budaya Hukum terlihat belum berhasil meraih target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 97,59%. Namun dapat disampaikan bahwa nilai indeks budaya hukum (pilar 1 Indeks Pembangunan Hukum) merupakan gambaran kinerja pembangunan hukum pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2024, hal ini masih dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dan dimulai pada Juli 2025, Kementerian Hukum melaksanakan Kick Off Meeting Pengukuran IPH bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas serta *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dalam pengumpulan dan pengolahan data dalam pengukuran IPH. Namun target indeks materi hukum yang ditetapkan pada tahun 2025 baru dapat dihasilkan nilainya pada tahun 2026. Sehingga, nilai Indeks Materi Hukum pada tahun 2024 belum dapat digunakan sebagai parameter kegagalan/keberhasilan pencapaian target kinerja Kementerian Hukum.



Variabel utama Indeks Budaya Hukum adalah (i) kepatutan hukum masyarakat, dan (ii) kepatutan hukum lembaga hukum. Berdasarkan hasil pengukuran IPH didapatkan hasil:

1. Variabel 1. Kepatutan Hukum Masyarakat, dengan indikator :

- Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional: 0.92
- Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum: 0.47
- Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM: 0.71
- Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum: 0.56
- Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum: 0.48
- Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas: 0.89 (*reverse*)
- Tingkat Kejahatan: 0.61 (*reverse*)
- Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak: 0.80
- Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat: 0.77
- Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin: 0.20

2. Variabel 2. Kepatutan Hukum Lembaga Hukum, dengan indikator :

- Tingkat Kepatuhan Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik: 0.92
- Tingkat Pelanggaran HAM: 0.99 (*reverse*)
- Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan: 0.99
- Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku: 1.00 (*reverse*)

## **2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis “ Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI” dan Indikator Kinerja “Indeks Budaya Hukum” merupakan sasaran dan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Menteri Hukum pada 23 Oktober 2025 pasca pengesahan Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029. Sehingga sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam renstra, indikator ini tidak ada pada Renstra Kemenkumham Tahun 2020 – 2024 dan tidak ada pada Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029..

## **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan standar nasional karena ini merupakan indikator baru yang diampu oleh Kementerian Hukum khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional, dimana indikator ini sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

## **5. Beberapa hal yang dilakukan dalam meningkatkan pencapaian Indeks Materi Hukum Tahun 2025:**

Peningkatan budaya hukum merupakan salah satu mandat strategis Kementerian Hukum, terutama dalam kerangka pembinaan hukum nasional. Untuk melaksanakan penilaian atas kepatuhan hukum lembaga hukum (K/L/D) Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan penyusunan pedoman penilaian kepatuhan hukum K/L/D. pedoman ini menjadi instrumen untuk melakukan pola pembinaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum lembaga hukum, yang akan mengarah pada meningkatnya kepatutan hukum lembaga hukum yang menjadi salah satu variabel dalam Indeks Budaya Hukum. Dapat dikatakan bahwa meningkatnya indeks kepatutan hukum lembaga hukum, akan mendorong meningkatnya indeks budaya hukum.

Meningkatkan kepatuhan hukum lembaga hukum (K/L/D) telah dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penataan peraturan perundang-undangan dengan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan stakeholder untuk menyampaikan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang. Ini dapat menjadi media untuk mengukur sejauh mana K/L/D patuh terhadap rekomendasi hasil evaluasi peraturan yang bertujuan untuk menata peraturan perundang-undangan.

Kegiatan lain adalah Pembinaan dan Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) antara lain dengan:

- Menetapkan, membina, dan mengawasi Anggota JDIHN (K/L/Pemda) agar memiliki dokumentasi hukum yang tertib, mutakhir, dan terbuka;
- Menyediakan standar pengelolaan dokumen hukum (website, basis data, metadata) sehingga K/L/D memiliki rujukan tunggal dan mengurangi risiko kesalahan penerapan hukum; dan
- Mendorong keterbukaan informasi hukum sehingga publik dapat mengawasi dan menilai kepatuhan hukum K/L/D.

Sedangkan untuk meningkatkan kepatutan hukum masyarakat, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain melalui penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung, pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses keadilan melalui pembentukan posbankum desa/kelurahan. Peningkatan kapasitas penyuluh hukum sebagai motor penggerak peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat:

- Terkait hak konstitusional;
- Terkait mekanisme penyelesaian permasalahan hukum;
- Kebijakan hukum; dan
- Bagaimana masyarakat dalam mengakses keadilan.



Posbankum desa/kelurahan sendiri merupakan faktor pengungkit meningkatkan kepatutan hukum masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses peningkatan pemahaman tentang mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan nya dan pemahaman masyarakat tentang hak atas akses keadilan. Untuk menggerakkan layanan di posbankum tersebut, BPHN telah memfasilitasi pelatihan bagi paralegal tidak kurang dari 10.000 paralegal dan pelatihan juru damai kepada 9.781 Kades/Lurah. Sepanjang tahun 2025, BPHN melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah melaksanakan 24.869 penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung dan telah berhasil melakukan pembentukan/pembinaan 83.409 Posbankum desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

### 3. Indikator Kinerja Utama 3 “Indeks Materi Hukum”

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah instrumen yang dipakai untuk mengukur capaian pembangunan hukum di Indonesia secara nasional. IPH diukur melalui 5 Pilar Pembangunan Hukum, salah satunya adalah Pilar Budaya Hukum. Indeks Materi Hukum mengukur aspek substansi hukum formal, yaitu kualitas dan keberadaan hukum/regulasi perundang-undangan serta bagaimana materi hukum itu memenuhi standar hukum dan kebutuhan masyarakat.

Variabel utama Indeks Materi Hukum adalah (i) proses pembentukan puu taat asas, dan (ii) kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengukuran IPH didapatkan hasil:

1. Variabel 1 : Proses Pembentukan PUU Taat Asas, dengan indikator :

- Tingkat Kesesuaian Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat: 0.58
- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 0.51
- Tingkat Kesesuaian UU dengan UUD NRI 1945: 0.66

2. Variabel 2 : Kesesuaian Materi Muatan PUU, dengan indikator :

- Tingkat Kesesuaian PP dan Perpres dengan UU: 0.96
- Tingkat Kesesuaian PUU dengan Peraturan yang setara: 0.42

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| SASARAN                                             | INDIKATOR           | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI | Indeks Materi Hukum | 0,51 Indeks | 0,61 Indeks | 119,60% |

Tabel III.38 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Materi Hukum

Formulasi perhitungan capaian:

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Materi Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Materi Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0,61 \text{ Indeks}}{0,51 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 119,60\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Indeks Materi Hukum telah berhasil meraih target yang ditetapkan dengan capaian 118,60%. Namun dapat disampaikan bahwa indeks materi hukum (pilar 2 IPH) merupakan gambaran kinerja pembangunan hukum pada tahun 2024.



Dimana pada tahun 2024, hal ini masih dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dan dimulai pada Juli 2025, Kementerian Hukum melaksanakan Kick Off Meeting Pengukuran IPH bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam pengumpulan dan pengolahan data dalam pengukuran IPH. Namun target indeks materi hukum yang ditetapkan pada tahun 2025 baru dapat dihasilkan nilainya pada tahun 2026. Sehingga, nilai Indeks Materi Hukum pada tahun 2024 belum dapat digunakan sebagai parameter kegagalan/keberhasilan pencapaian target kinerja Kementerian Hukum.

## **2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis “ Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI” dan Indikator Kinerja “Indeks Materi Hukum” merupakan sasaran dan indikator baru pada Perjanjian Kinerja Menteri Hukum pada 23 Oktober 2025 pasca pengesahan Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029. Sehingga sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sasaran dan indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra, indikator ini tidak ada pada Renstra Kemenkumham Tahun 2020 – 2024 dan tidak ada pada Renstra Kemenkum Tahun 2025 – 2029.

## **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Materi Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

## **5. Beberapa hal yang dilakukan dalam meningkatkan pencapaian Indeks Materi Hukum Tahun 2025:**

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian tahapan pembuatan produk hukum yang mengikat secara umum, yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Keberhasilan dalam mencapai target pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat waktu dan berkualitas tinggi sangat ditentukan oleh optimalisasi peran perancang peraturan perundang undangan yang kompeten serta penguatan koordinasi yang efektif dengan kementerian dan lembaga terkait pada seluruh tahapan, mulai dari penyusunan rancangan hingga tahap pengundangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan penilaian Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan (IKPUU) yang dirancang sebagai instrumen evaluasi yang lebih menyeluruh, dengan tujuan mengukur secara objektif mutu peraturan perundang undangan yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga(K/L) terkait.



Langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus menyempurnakan regulasi secara berkesinambungan melalui harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan. IKPUU diharapkan menjadi pedoman utama bagi pembentuk kebijakan dalam menghasilkan peraturan yang lebih berkualitas, baik dari aspek substansi maupun proses pembentukannya. Lebih jauh lagi, indeks ini dirancang untuk mendorong peningkatan mutu hukum dan tata kelola regulasi yang lebih efektif serta efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Berdasarkan Manual IKU Kementerian Hukum, Indeks Materi Hukum mengukur aspek substansi hukum formal, yaitu kualitas dan keberadaan hukum/regulasi perundang undangan serta bagaimana materi hukum itu memenuhi standar hukum dan kebutuhan masyarakat.

Indeks Materi Hukum yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan (Ditjen PP) diwujudkan dalam proses penyusunan PUU untuk memberikan kepastian hukum melalui perumusan norma hukum tertentu, upaya menghindari tumpang tindih pengaturan substansi, pengharmonisasian peraturan perundang undangan, dan proses legislasi serta penelitian hukum. Dalam pelaksanaan Indeks Materi Hukum, Ditjen PP melakukan survei Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan (IKPUU) kepada seluruh K/L yang melakukan pembentukan PUU di tingkat pusat terhadap pelayanan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam survei tersebut, Ditjen PP melakukan pembobotan variabel pada:

- 1) Perencanaan;
- 2) Penyusunan;
- 3) Pembahasan;
- 4) Penetapan Peraturan Menteri/Lembaga; dan
- 5) Pengundangan.

Dalam pembahasan Pengukuran Sasaran Strategis Kementerian Hukum bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pilar Materi Hukum yang awalnya terdiri dari (1) Variabel Prosedur Pembentukan PUU yang taat azas dan (2) Variabel Kesesuaian Materi Muatan PUU disesuaikan menjadi (1) Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan (IKPUU) dan (2) Indikator manfaat dan dampak (ex-ante) dan Indikator analisis dan evaluasi (ex-post). Sehingga, hasil dari IKPUU akan disampaikan kepada BPHN selaku pihak yang membuat instrumen dan melakukan pengukuran kinerja untuk mendapatkan hasil Indeks Materi Hukum yang menjadi salah satu unsur pendukung Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Selain itu, dalam hal pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU serta analisis evaluasi PUU, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan strategis yang secara sistematis memperkuat pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan melalui:

1. Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, yang digarap secara intensif sejak Januari hingga Desember melalui rapat tim kerja secara berkala. Koordinasi lintas unit maupun sektor, konsinyasi dalam rangka finalisasi konsep, uji konsep di beberapa daerah (Jawa Barat dan Jawa Timur), hingga uji publik dengan melibatkan pakar dan pemangku kepentingan. Pedoman ini menjadi instrumen kunci untuk menstandarkan metodologi pemantauan dan evaluasi regulasi;
2. Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup rapat analisis regulasi, diskusi dan konfirmasi data, rapat tim kerja tematik, serta konsultasi publik di Jawa Barat dan Jawa Timur. Proses ini diperkaya dengan uji publik yang menghadirkan narasumber ahli, sehingga rekomendasi perbaikan terhadap UU No. 20 Tahun 2016 lebih terarah, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha maupun perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
3. Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang di bidang Minyak dan Gas Bumi, melalui serangkaian rapat intensif, audiensi dan diskusi substantif, serta koordinasi dengan pelaku utama sektor migas (Kadin, SKK Migas, dan IPA). Kegiatan ini dipuncaki dengan uji konsep hasil pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengaturan sektor migas dan kebutuhan penyempurnaan norma. Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, Sepanjang tahun 2025, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum melaksanakan rangkaian kegiatan strategis Analisis dan Evaluasi (AE) terhadap peraturan perundang-undangan (PUU) secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan indeks materi hukum dari sisi ex post. Kegiatan diawali dengan perencanaan melalui perumusan rencana kerja, format dan tahapan AE, penetapan pokja, penyusunan kalender kerja, serta inventarisasi awal PUU dan isu-isu krusial, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Kerja AE di bidang strategis yang selaras dengan Asta Cita, antara lain logistik untuk hilirisasi dan industrialisasi, keamanan siber, kekuasaan kehakiman, jaminan produk halal, jaminan benda bergerak, perumahan, partai politik, serta tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di saat yang sama, dibentuk pula Tim Kerja AE Permenkumham dan Tim Penyusun Pedoman AEH sebagai motor penggerak peningkatan kualitas materi hukum lintas sektor.

Secara substantif, BPHN melakukan analisis dan evaluasi terhadap 18 Permenkumham yang mengatur penyuluhan hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, standar kompetensi dan angka kredit jabatan fungsional, pengelolaan dokumen dan informasi hukum, paralegal, dan analis hukum. Rekomendasi atas regulasi-regulasi ini menjadi dasar penataan regulasi internal Kementerian Hukum dan HAM yang memperkuat tata kelola hukum, akses keadilan, dan profesionalisme SDM hukum.



Selanjutnya, BPHN memperkuat basis data regulasi dengan menginventarisasi dan mengkaji total 122 PUU yang terdiri dari 64 PUU pada semester I dan 58 PUU pada semester II, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan menteri/lembaga. Kajian tersebut mencakup tema kekuasaan kehakiman, jaminan produk halal, logistik, keamanan siber, partai politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penjaminan bagi kewirausahaan dan industri kreatif, serta minyak dan gas bumi untuk swasembada energi. Dari keseluruhan proses tersebut, BPHN berhasil menghasilkan Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum, naskah singkat, dan *policy brief* yang memuat rekomendasi perubahan maupun pencabutan regulasi di sektor-sektor kunci. Rekomendasi ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tumpang tindih, dan ketidaksinkronan dalam materi hukum, tetapi juga menawarkan arah penyempurnaan dan harmonisasi regulasi yang lebih efektif, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan AE terhadap 122 PUU sepanjang tahun 2025 menjadi kontribusi nyata dan terukur Kementerian Hukum yang dilaksanakan oleh BPHN dalam upaya peningkatan indeks materi hukum dari sisi *ex post*.

## SASARAN STRATEGIS 2 "TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI"

### 1. Indikator Kinerja Utama 1 "Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum"

| INDIKATOR                                    | TARGET       | REALISASI    | CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PK 7 Januari 2025</b>                     |              |              | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Namun Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 adalah 90,38 dengan rincian:<br>RB General 86,33<br>RB Tematik 4,05 |
| Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90 Indeks    | Dalam Proses |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PK 23 Oktober 2025</b>                    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,38 Indeks | Dalam Proses |                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabel III.39 Target, Realisasi dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Berdasarkan 2 PK

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan indikator yang sama pada pada dokumen Perjanjian Kinerja baru dan lama namun yang membedakan adalah target kinerjanya. Pada Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025 target Indeks RB Kemenkum adalah 90, dan pada Perjanjian Kinerja 23 Oktober 2025 target Indeks RB Kemenkum adalah 90,38. Target yang baru merupakan hasil Hasil Evaluasi RB Kemenkumham Tahun 2024 yang digunakan menjadi *baseline* dalam penetapan target, dengan harapan Indeks RB Kemenkum Tahun 2025 dapat melebihi 90,38. Penjelasan terhadap indikator ini telah dijelaskan pada sub bagian Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025.

### ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA:

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

## 1. Anggaran

Pagu alokasi Kementerian Hukum Tahun 2025 sebesar Rp 4,505,366,379,000 dan per tanggal 10 Januari 2026 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,784,610,931,198. Namun Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025, Kementerian Hukum mengalami blokir anggaran sebesar Rp 1,427,044,881,000 sehingga Pagu Efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 3,078,321,498,000 dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 90,46%. Hal ini membuktikan walaupun Kementerian Hukum mengalami efisiensi anggaran, namun tetap dapat mencapai target-target kinerja dan menorehkan prestasi/penghargaan selama tahun 2025.

## 2. Sumber Daya Manusia

Seperti yang diketahui, pada tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM mengalami transformasi organisasi dan Kementerian Hukum merupakan salah satu kementerian yang terdampak. Pada tahun 2024, Kementerian Hukum memiliki sumber daya manusia sebanyak 64.001 pegawai yang tersebar di 844 satuan kerja dan 22 perwakilan Imigrasi di luar negeri. Namun pada tahun 2025, Kementerian Hukum hanya memiliki sumber daya manusia sebanyak 7.978 pegawai, yang mengalami penurunan signifikan sebesar 87,5%. Namun walaupun mengalami pengurangan sumber daya manusia, Kementerian Hukum tetap berhasil mencapai target kinerja dengan dukungan anggaran yang juga mengalami efisiensi serta tetap menorehkan banyak prestasi/penghargaan sepanjang tahun 2025.

Beberapa kebijakan yang masih dilakukan dalam rangka tata kelola SDM Kementerian Hukum adalah sebagai berikut:

- Penataan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana;
- Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Pengembangan Karir melalui sistem *talent pool*;
- Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Bidang Hukum;
- Rekrutmen SDM ASN Kementerian Hukum;
- Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Kementerian Hukum;
- Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Kementerian Hukum;
- Penguatan Sistem Merit;
- Implementasi *Core Values* PASTI BerAKHLAK ASN Kementerian Hukum;
- Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

## • Sarana dan Prasarana

Kementerian Hukum telah melakukan serangkaian transformasi digital dalam rangka penerapan e-government dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Untuk meningkatkan layanan, Tahun 2025 Kementerian Hukum membangun aplikasi SuperApps Kementerian Hukum yang bertujuan menyediakan sebuah *platform digital* terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan Kementerian Hukum kepada publik maupun di internal di lingkungan Kementerian Hukum, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, aman serta mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pusdatin Kementerian Hukum berkerjasama dengan pihak Konsultan dengan latar belakang Dosen dan Mahasiswa pada kampus Institut Teknologi Bandung yang telah menghosting 67 layanan eksisting pada Kementerian Hukum ke aplikasi layanan superapps dari total 245 layanan yang menjadi salah satu capaian target kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Namun beberapa aplikasi eksisting yang sudah digunakan selama ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, antara lain:

### 1. Layanan Persuratan

- Aplikasi Sisumaker → Aplikasi pengelolaan surat masuk dan keluar yang. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan agar lebih cepat dan efisien;

### 2. Layanan Kepegawaian

- Aplikasi Simpeg → Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang digunakan untuk mengelola data dan proses kepegawaian.

### 3. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja

- Aplikasi E-RB → Sistem penilaian kinerja reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia berbasis aplikasi secara *online*.
- Aplikasi E-Performance → Sistem pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia berbasis aplikasi secara *online*.
- Aplikasi E-SOP → Sistem Informasi Katalog Data yang menyimpan data SOP di lingkungan Kementerian Hukum.

### 4. Layanan Teknis

- Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU *Online*) seperti Sistem Kewarganegaraan Elektronik (SIMPONIK), *Apostille Online*, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH);

- Layanan pengembangan kompetensi berbasis teknologi melalui aplikasi *Massive Open Online Course* (MOOC) serta metode *Community of Practice*. MOOC merupakan media pembelajaran online dengan yang membahas berbagai materi tentang Hukum yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum maupun non-Kementerian Hukum. *Community of Practice* (CoP) merupakan sebuah wadah pembelajaran kolaboratif yang dirancang khusus bagi para pegawai dengan jabatan fungsional yang sama untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi, serta strategi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Melalui pendekatan ini, CoP diharapkan menjadi ruang interaktif yang mendorong pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) bagi para ASN Kementerian Hukum maupun non-Kementerian Hukum. Kedua metode ini terbukti mampu meningkatkan jumlah peserta pengembangan kompetensi di bidang hukum pada tahun 2025. Melalui kedua aplikasi ini walaupun anggaran pengembangan kompetensi terkena efisiensi anggaran, BPSDM Hukum tetap dapat memenuhi target output pengembangan kompetensi karena dengan adanya transformasi digital pengembangan kompetensi, pelatihan dapat dilaksanakan dengan output maksimal dan dapat dilakukan dimana saja dengan anggaran yang terbatas;
- Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan ([peraturan.go.id](http://peraturan.go.id));
- Sirenkum, e-Penyusunan, e-Harmonisasi, e-Pengundangan, e-Litigasi, e-Perancang, e-Jurnal, e-Partisipasi publik, e-Penerjemahan, JDIH DJPP, Sippdah;
- Aplikasi pelayanan kekayaan intelektual seperti Sistem Aplikasi Paten (SAKI), Portal DJKI, Sistem pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk layanan KI melalui portal [simpaki.dgip.go.id](http://simpaki.dgip.go.id);
- Aplikasi JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) adalah platform digital terintegrasi yang dikembangkan oleh BPHN untuk menyediakan akses mudah, cepat, dan akurat terhadap produk hukum Indonesia.



01 Juli 2025

Kepala BPHN Kementerian Hukum memimpin pelaksanaan kegiatan  
*Kick Off Meeting* Pengukuran IPH: Menuju Pembangunan Hukum yang Lebih Baik



23 Juni 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, dan Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto serta Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menandatangani dokumen naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHP

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, Kementerian Hukum menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 5.066.600.725.000, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa penyesuaian dan kebijakan yang terjadi sehingga pagu definitif Kementerian Hukum pada tahun 2025 sebesar Rp 4,505,366,379,000. Per tanggal 10 Januari 2026 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 2,784,610,931,198. Namun Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025, Kementerian Hukum mengalami blokir anggaran sebesar Rp 1,427,044,881,000 sehingga Pagu Efektif yang dapat digunakan sebesar Rp 3,078,321,498,000 dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 90,46%.

Adapun rincian anggaran Kementerian Hukum Tahun 2025 sebagai berikut:

| JENIS BELANJA   | SUMBER DANA | PAGU ALOKASI                | BLOKIR                      | PAGU EFEKTIF                | REALISASI (RP)              | %             | SISA (RP)                 |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| BELANJA PEGAWAI | RM          | Rp 1,453,671,788,000        | -                           | Rp 1,453,671,788,000        | Rp 1,209,008,457,325        | 83.17%        | Rp 244,663,330,675        |
| BELANJA BARANG  | RM          | Rp 1,307,788,430,000        | Rp 641,437,972,000          | Rp 666,350,458,000          | Rp 646,154,821,854          | 96.97%        | Rp 20,195,636,146         |
|                 | PNBP        | Rp 924,246,966,000          | Rp 480,110,693,000          | Rp 444,136,273,000          | Rp 427,853,298,927          | 96.33%        | Rp 16,282,974,073         |
| BELANJA MODAL   | RM          | Rp 567,895,843,000          | Rp 275,000,464,000          | Rp 292,895,379,000          | Rp 288,186,239,251          | 98.39%        | Rp 4,709,139,749          |
|                 | PNBP        | Rp 251,393,752,000          | Rp 30,495,752,000           | Rp 220,898,000,000          | Rp 213,038,513,841          | 96.44%        | Rp 7,859,486,159          |
|                 | HIBAH       | Rp 369,600,000              | -                           | Rp 369,600,000              | Rp 369,600,000              | 100.00%       | -                         |
| <b>TOTAL</b>    |             | <b>Rp 4,505,366,379,000</b> | <b>Rp 1,427,044,881,000</b> | <b>Rp 3,078,321,498,000</b> | <b>Rp 2,784,610,931,198</b> | <b>90.46%</b> | <b>Rp 293,710,566,802</b> |

Tabel III.40 Realisasi Anggaran Kementerian Hukum TA 2025

Capaian anggaran 90,46% ini diakibatkan pagu belanja pegawai yang berlebih. Besarnya pagu belanja pegawai tersebut dikarenakan pada tahun 2025 pagu belanja pegawai Kementerian Hukum masih disusun berdasarkan kebutuhan pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Namun, terhadap kebutuhan anggaran yang lainnya, Kementerian Hukum berhasil melakukan efisiensi sumber daya dibuktikan dengan adanya blokir anggaran, dapat mencapai bahkan meningkatkan kinerja Kementerian Hukum. Dan baru dapat terpetakan setelah bulan april 2025 pasca restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM.



Gambar III.1 Kemenkumham mendapatkan Opini WTP 16 kali

3/10/2025

## **WTP KE-16, PENUTUP 'MANIS' KEMENKUMHAM SEBELUM TRANSFORMASI KELEMBAGAAN**

Kementerian Hukum dan HAM meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan TA 2024. Capaian ini merupakan yang ke-16 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, sekaligus menjadi capaian terakhir Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga melakukan input Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev Kemenkeu yang dapat diakses melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Hingga 10 Januari 2026, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Hukum yang diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 97,04. Namun ini nilai sementara karena masih dalam proses pengisian capaian oleh satuan kerja.



| No. | Kode K/L | K/L               | NK Perencanaan Anggaran | Efektivitas |        |       | Efisiensi      |               |
|-----|----------|-------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|----------------|---------------|
|     |          |                   |                         | IKSS        | IKP    | CRO   | Penggunaan SBK | Efisiensi SBK |
| 1   | 135      | KEMENTERIAN HUKUM | 97.04                   | 99.40       | 100.00 | 99.60 | 77.04          | 97.40         |

Gambar III.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Kementerian Hukum Tahun 2025

### 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang meliputi :

- Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran:
  - Revisi DIPA (10%);
  - Deviasi Halaman III DIPA (15%);

- Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran:
  - Penyerapan anggaran (20%);
  - Belanja kontraktual (10%);
  - Penyelesaian tagihan (10%);
  - Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) (10%); dan
  - Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (Pengurang Nilai IKPA Maksimal 1%).
- Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran:
  - Capaian Output (25%)

Nilai IKPA Kementerian Hukum Tahun 2025 sebesar 94,11.

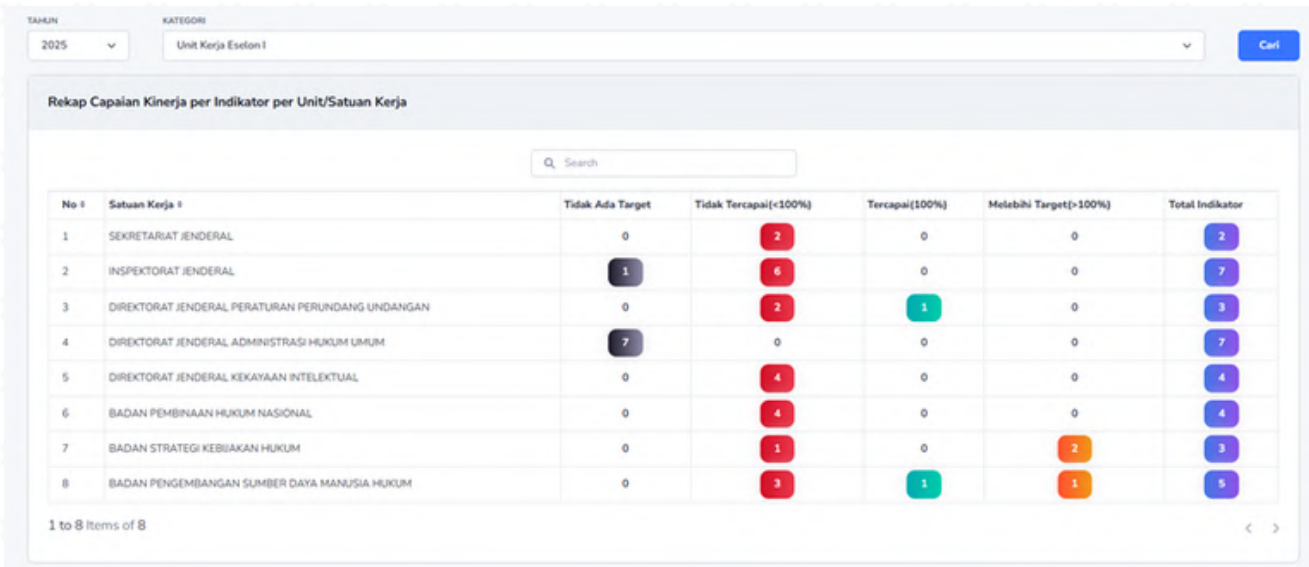
| NO | KODE KL | NAMA KL           | KETERANGAN  | KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN |                        | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                     |                      |                       | KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN | NILAI TOTAL | KONVERSI BOBOT | DISPENSASI SPM (PENGURANG) | NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT) |
|----|---------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|
|    |         |                   |             | REVISI DIPA                   | REVISI HALAMAN II DIPA | PENYERAPAN ANGGARAN           | BELANJA KONTRAKTUAL | PENYELESAIAN TAGIHAN | PENGURAIAN UP DAN TUP | CAPAIAN OUTPUT                      |             |                |                            |                                          |
| 1  | 135     | KEMENTERIAN HUKUM | Nilai       | 99.40                         | 99.43                  | 99.26                         | 100.00              | 99.56                | 96.63                 | 100.00                              | 94.81       | 100%           | 0.58                       | 94.11                                    |
|    |         |                   | Bobot       | 10                            | 15                     | 20                            | 10                  | 10                   | 10                    | 25                                  |             |                |                            |                                          |
|    |         |                   | Nilai Akhir | 9.94                          | 12.81                  | 17.24                         | 10.00               | 9.96                 | 9.66                  | 25.00                               |             |                |                            |                                          |
|    |         |                   | Nilai Aspek | 92.42                         |                        | 95.59                         |                     |                      |                       | 100.00                              |             |                |                            |                                          |

**Gambar III.3 Nilai IKPA Kementerian Hukum Tahun 2025**

## D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 1. Pengukuran dan Pengendalian Kinerja melalui Aplikasi *E-Performance*

Aplikasi E-performance (Sistem Informasi Kinerja Kementerian Hukum) adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance yang baru diluncurkan pada tahun 2025 ini merupakan generasi ke 2 sejak tahun 2016 pertama kali dibangun. Seluruh satuan kerja diminta untuk melaporkan capaian kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja setiap bulan. Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman <https://performance.kemenkumham.go.id/>.

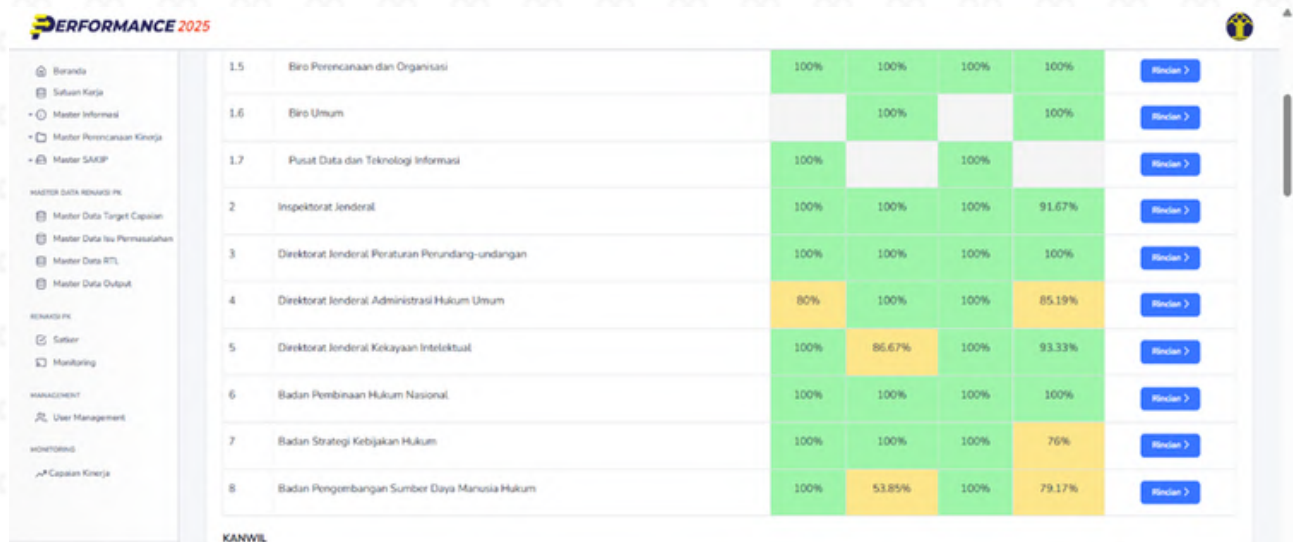


| No | Satuan Kerja                                     | Tidak Ada Target | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Total Indikator |
|----|--------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 1  | SEKRETARIAT JENDERAL                             | 0                | 2                      | 0               | 0                       | 2               |
| 2  | INSPEKTORAT JENDERAL                             | 1                | 6                      | 0               | 0                       | 7               |
| 3  | DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN | 0                | 2                      | 1               | 0                       | 3               |
| 4  | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM      | 7                | 0                      | 0               | 0                       | 7               |
| 5  | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL         | 0                | 4                      | 0               | 0                       | 4               |
| 6  | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL                   | 0                | 4                      | 0               | 0                       | 4               |
| 7  | BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM                   | 0                | 1                      | 0               | 2                       | 3               |
| 8  | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM     | 0                | 3                      | 1               | 1                       | 5               |

**Gambar III.4 Capaian Aplikasi E-Performance UKE I Tahun 2025**

## 2. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Kementerian Hukum telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025. Sekretariat Jenderal juga rutin melakukan penginputan capaian rencana aksi pada aplikasi E-Performance yang dapat dilihat pada gambar berikut:



| No  | Satuan Kerja                                     | 100% | 100%   | 100% | 100%   | Rincai |
|-----|--------------------------------------------------|------|--------|------|--------|--------|
| 1.5 | Biro Perencanaan dan Organisasi                  | 100% | 100%   | 100% | 100%   | Rincai |
| 1.6 | Biro Umum                                        |      | 100%   |      | 100%   | Rincai |
| 1.7 | Pusat Data dan Teknologi Informasi               | 100% |        | 100% |        | Rincai |
| 2   | Inspektorat Jenderal                             | 100% | 100%   | 100% | 91.67% | Rincai |
| 3   | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | 100% | 100%   | 100% | 100%   | Rincai |
| 4   | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum      | 80%  | 100%   | 100% | 85.19% | Rincai |
| 5   | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual         | 100% | 86.67% | 100% | 93.33% | Rincai |
| 6   | Badan Pembinaan Hukum Nasional                   | 100% | 100%   | 100% | 100%   | Rincai |
| 7   | Badan Strategi Kebijakan Hukum                   | 100% | 100%   | 100% | 76%    | Rincai |
| 8   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum     | 100% | 53.85% | 100% | 79.17% | Rincai |

**Gambar III.5 Capaian Rencana Aksi pada Aplikasi E-Performance Tahun 2025**

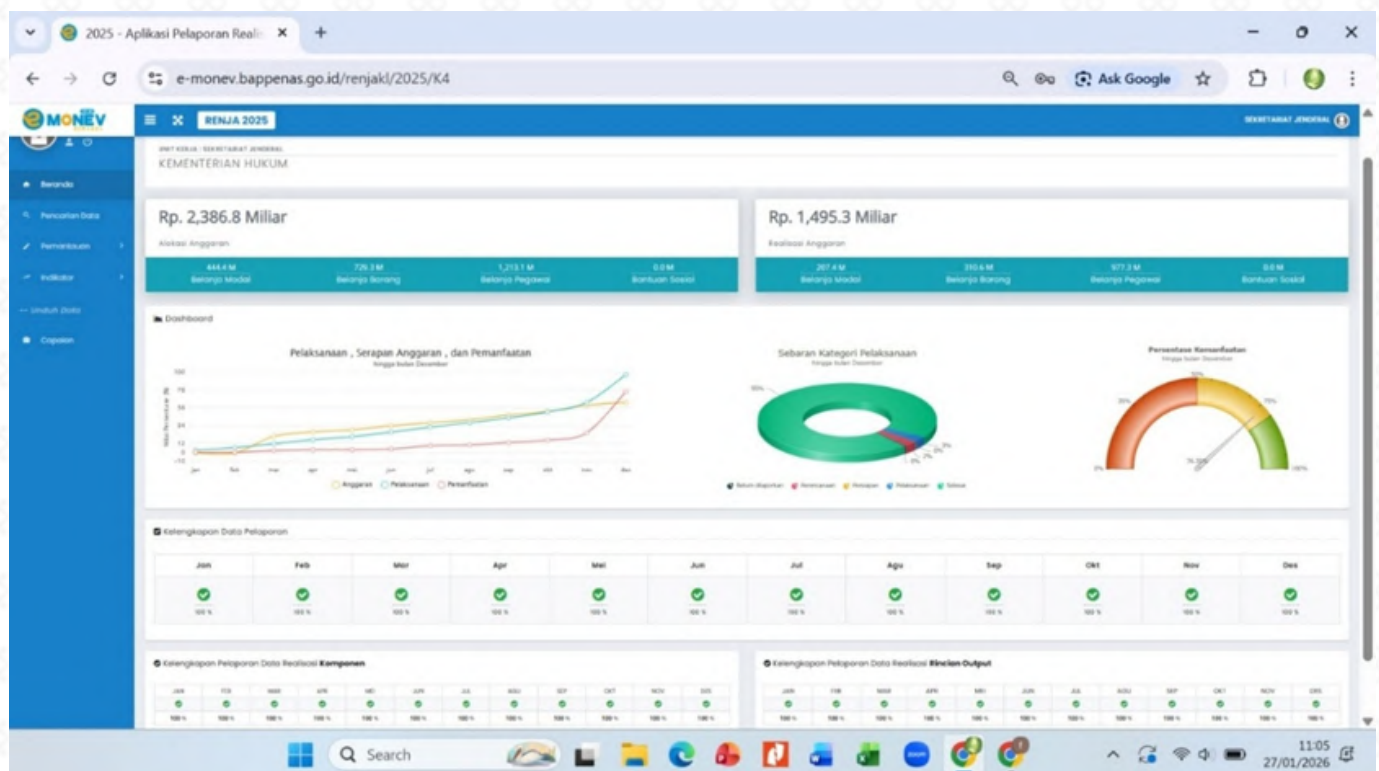
Pada Tahun 2026, Kementerian Hukum akan menyusun dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kinerja akan tercapai dalam satu tahun. Ini merupakan bagian dari sistem akuntabilitas (SAKIP) yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### 3. *E-Monev* BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi *E-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Adapun capaian *E-Monev* Kementerian Hukum Tahun 2025 belum dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala sistematis yang mengakibatkan adanya halangan penarikan data. Adapun progress per Kategori Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan : 22 %
- Persiapan : 10 %
- Pelaksanaan : 59 %
- Selesai : 5 %
- Kemanfaatan : 4 %

Pada Tahun 2025, Kementerian Hukum setiap bulan rutin melakukan penginputan capaian kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III.6 Capaian E-Monev Bappenas Tahun 2025

## E. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Berikut rincian capaian Prioritas Nasional 7 " Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

| NO | RINCIAN OUTPUT                                                                 | REALISASI ANGGARAN |                |                |       | REALISASI KINERJA |        |           |       | PROGRES CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                | ALOKASI AWAL       | ALOKASI AKHIR  | REALISASI      | %     | TARGET            | SATUAN | REALISASI | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1  | RUU KUH Acara Perdata                                                          | Rp 1,793,000,000   | Rp 850,231,000 | Rp 894,457,727 | 98,1  | 1                 | RUU    | 0         | 60 %  | Konsinyering Rapat Koordinasi dan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata 27 s.d 29 NovUji Publik RUU Hukum Acara Perdata di Yogyakarta 30 Okt s.d. 1 Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DITJEN PP        |
| 2  | RUU Kepailitan                                                                 | Rp 501,000,000     | Rp 387,726,000 | Rp 387,204,021 | 99,87 | 1                 | RUU    | 0         | 58 %  | Triwulan IV fokus pada penyelesaian KUHP dan peraturan pelaksanaan KUHP dan KUHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DITJEN PP        |
| 3  | RUU Jaminan Benda Bergerak                                                     | Rp 501,000,000     | Rp 300,226,000 | Rp 299,725,075 | 99,83 | 1                 | RUU    | 1         | 100 % | Draft RUU sudah selesai penyusunan dan sudah disampaikan kepada Presiden. Triwulan IV fokus pada penyelesaian KUHP dan peraturan pelaksanaan KUHP dan KUHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DITJEN PP        |
| 4  | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Rp 1,000,143,000   | Rp 653,335,000 | Rp 644,649,400 | 98,67 | 1                 | RUU    | 0         | 30 %  | Rapat Internal Pemerintah 29 Oktober 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DITJEN PP        |
| 5  | RPP Pelaksanaan UU KUHP                                                        | Rp 970,781,000     | Rp 970,781,000 | Rp 765,609,452 | 85,15 | 3                 | RPP    | 3         | 100 % | I. RPP tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati. Telah disampaikan ke presiden melalui Surat Menteri Hukum Nomor M.HH-PP.01.02-82 tanggal 2 Desember 2025." II. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Telah disampaikan ke presiden melalui Surat Menteri Hukum Nomor M.HH-PP.01.02-91 tanggal 22 Desember 2025." III. RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Telah disampaikan ke presiden melalui Surat Menteri Hukum Nomor M.HH-PP.01.02-70 tanggal 22 Oktober 2025." | DITJEN PP        |

|   |                                                                                    |                      |                      |                      |       |      |                        |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|------|------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Akses) Konvensi Hukum Perdata Internasional | Rp<br>5,600,802,000  | Rp<br>681,579,000    | Rp<br>595,261,401    | 87,35 | 1    | Reko mendasi Kebijakan | 1    | 100 %    | Finalisasi Naskah Urgensi <i>Service Convention</i> dan pada tanggal 31 Desember 2025 Naskah Urgensi telah selesai dan surat penyampaian telah dikirimkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DITJEN AHU  |
| 7 | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi                                                    | Rp<br>50,104,000,000 | Rp<br>47,752,000,000 | Rp<br>46,565,709,720 | 97,52 | 6263 | Orang                  | 9193 | 146,78 % | Adapun rinciannya yaitu jumlah seluruh permohonan bantuan hukum Litigasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 11.788 permohonan dengan jumlah permohonan yang dilayani/ diterima sesuai peraturan perundangan-undangan sebanyak 9.193 orang Penerima Bantuan Hukum.                                                                                                                                                                                                                                | BPHN        |
| 8 | Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi                                                | Rp<br>8,952,130,000  | Rp<br>8,952,130,000  | Rp<br>8,355,475,470  | 93,34 | 839  | Kegiatan               | 3784 | 451,01%  | Capaian target pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sampai dengan Triwulan IV sebanyak 3.784 kegiatan (TW I sebanyak 0 keg + TW II sebanyak 542 keg + TW III sebanyak 704 Keg + TW IV sebanyak 2.538 keg), data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi <i>Database</i> Bantuan Hukum (Sidbankum).                                                                                                                                                                                                      | BPHN        |
| 9 | Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah                               | Rp<br>1,836,760,000  | Rp<br>1,499,854,000  | Rp<br>1,378,261,833  | 91,89 | 120  | Orang                  | 120  | 100%     | Bahwa sampai dengan Triwulan IV, dari sisi target satuan kinerja telah diselenggarakan 4 (empat) angkatan Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah yaitu:<br>1. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pertama IX pada 10 April s.d 28 Mei 20252. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pertama X pada 9 September s.d 22 Oktober 20253. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Muda I pada 30 Juni s.d 28 Agustus 20254. Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Muda II pada 5 Agustus s.d 6 Oktober 2025 | BPSDM Hukum |

|    |                                                                                                       |                     |                     |                     |       |     |                  |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-----|------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP                                                       | Rp<br>1,833,095,000 | Rp<br>1,556,319,000 | Rp<br>1,516,832,986 | 97,46 | 342 | Orang            | 342 | 100% | 1) Bahwa sampai dengan Triwulan IV, dari sisi target satuan kinerja telah diselenggarakan 11 (sebelas) angkatan pelatihan, yaitu: I. ToF Implementasi KUHP Akt. I pada 11 - 30 April 20252. ToF Implementasi KUHP Akt. II pada 5 - 23 Mei 20253. ToF Implementasi KUHP Akt. III pada 5 - 25 Juni 20254. ToF Implementasi KUHP Akt. IV pada 30 Juni - 16 Juli 20255. ToF Implementasi KUHP Akt. V pada 28 Juli - 13 Agustus 20256. ToF Implementasi KUHP Akt. VI pada 8 September - 24 September 20257. ToF Implementasi KUHP Akt. VII pada 29 September - 15 Oktober 20258. ToF Implementasi KUHP Akt. VIII pada 8 - 24 September 20259. ToF Implementasi KUHP Akt. IX pada 20 Oktober - 5 November 202510. ToF Implementasi KUHP Akt. X pada 10 - 26 November 202511. ToF Implementasi KUHP Akt. XI pada 1 -17 Desember 2025. | BPSDM Hukum       |
| 11 | Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi                                                                 | Rp<br>1,000,480,000 | Rp<br>491,480,000   | Rp<br>412,518,101   | 83,93 | 1   | Sistem Informasi | 1   | 100% | Target Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi (aplikasi eRegulasi) untuk Tahun 2025 telah diselesaikan 100% yaitu sebanyak 1 (satu) Master Data, dan 3 (tiga) Modul, namun untuk 7 (tujuh) Modul akan dilaksanakan pada tahun 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Setjen (Pusdatin) |
| 12 | Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia | Rp<br>2,756,904,000 | Rp<br>1,913,406,000 | Rp<br>1,566,155,708 | 81,87 | 1   | NSPK             | 1   | 100% | Pelaksanaan kegiatan dalam TW IV adalah sebagai berikut:- 30 September Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator KUMHAM IMPAS- 1 sd 3 Okt , melakukan FGD lintas K/L dengan Kemenko KUMHAM IMPAS-20 - 22 Okt FGD Internal penyusunan Roadmap Pengembangan KI Tahap II- 1 Des FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan KI Eksternal Perspektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ditjen KI         |

|    |                                                   |                     |                     |                     |       |   |                       |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---|-----------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)         | Rp<br>3,584,599,000 | Rp<br>1,914,866,000 | Rp<br>1,884,811,174 | 98,43 | 1 | Dokumen               | 1 | 100% | Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2025 telah diselesaikan dan dicapai partisipasi instansi sebanyak 599 yang terdiri dari 80 K/L dan 519 Pemda. K/L telah berpartisipasi 100% sedangkan dari total 546 pemerintah daerah, sekitar 519 pemerintah daerah berpartisipasi. Untuk peningkatan partisipasi instansi menjadi 100% di Pemda maka perlu adanya kebijakan dalam bentuk regulasi (Kesepakatan antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri) agar Pemerintah Daerah terikat untuk berpartisipasi dalam kepesertaan penilaian Indeks Reformasi Hukum. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-4.OT.03.01 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian IRH pada K/L dan Pemda Tahun 2025.                         | BSK Hukum |
| 14 | Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP | Rp<br>370,144,000   | Rp<br>209,579,000   | Rp<br>209,506,272   | 99,97 | 1 | Rekomendasi Kebijakan | 1 | 100% | Hasil kajian pendahuluan ini menyimpulkan bahwa adopsi LLP di Indonesia dapat dikategorikan sebagai important but not urgent. Dalam konteks ini, meskipun LLP menawarkan sejumlah keunggulan komparatif seperti tanggung jawab terbatas ( <i>limited liability</i> ), aspek <i>legal personality</i> , fleksibilitas dalam hal pengelolaan, dan efisiensi perpajakan, namun urgensi atau kemendesakannya belum menjadi prioritas hukum dan kebijakan ekonomi nasional saat ini. Oleh karena itu, revitalisasi terhadap rezim pengaturan persekutuan yang ada, baik dari segi <i>legal personality</i> , <i>limited liability</i> , maupun fleksibilitas pengelolaan, dianggap lebih prioritas dibandingkan dengan menciptakan entitas badan usaha baru seperti LLP. | BSK Hukum |

**Tabel III.41 Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2025**

## F. TINDAK LANJUT LHE AKIP KEMENKUMHAM TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/614/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024, terdapat 15 rekomendasi yang diberikan Kementerian PANRB dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Organisasi bersama dengan seluruh Unit Eselon I dan APIP Inspektorat Jenderal merumuskan dan telah menindaklanjuti Rencana Aksi Tindak Lanjut atas LHE AKIP Kemenkumham Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        | DATA DUKUNG                                                                                                                                                                                                                                    | TIMELINE          | PELAKSANA                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran kementerian. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara menyeluruh | Melakukan penyusunan penjenjangan kinerja ( <i>cascading</i> ) dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> | 1. Penjenjangan Kinerja pada Renstra Tahun 2020 - 2024<br><br>2. Penjenjangan Kinerja yang telah disesuaikan dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029                                                                                 | Triwulan III 2025 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029<br>2. Dokumen Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024<br>3. Dokumen Pohon Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025<br><br>Dokumen Rencana Strategis dan Pohon Kinerja tersebut telah memuat penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional menggunakan metode <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> |
| 2  | Melakukan identifikasi dan pemetaan pada <i>cascading</i> kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi <i>crosscutting</i> kinerja dengan tugas dan fungsi antar unit kerja maupun kementerian dan lembaga lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.                                                                                 | Melakukan Penyesuaian Penjenjangan Kinerja ( <i>Cascading</i> ) dan <i>Crosscutting</i> dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029                                                       | 1. Pohon Kinerja hasil <i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i> pada Renstra Tahun 2020 - 2024<br><br>2. Pohon Kinerja Hasil <i>Cascading</i> dan <i>Crosscutting</i> yang telah disesuaikan dalam Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029 | Triwulan III 2025 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Dokumen Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.2. Dokumen Pohon Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025.<br><br>Dokumen Pohon Kinerja tersebut telah menggambarkan adanya <i>crosscutting</i> kinerja antar unit kerja dalam mencapai kinerja.                                                                                                                                                               |
| 3  | Melakukan perbaikan dokumen perencanaan berdasarkan pada penjenjangan kinerja yang telah disempurnakan untuk memastikan kualitas dan keselarasan penetapan kinerja pada dokumen tersebut                                                                                                                                                                | Melakukan Penyusunan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja                                                                                 | 1. Peraturan Menteri Hukum RI tentang Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029<br><br>2. Renja Kementerian Hukum Tahun 2025<br><br>3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                                                         | Triwulan III 2025 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Dokumen Draft Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029<br>2. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025<br>3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025<br><br>Hingga Minggu I Oktober Tahun 2025, Dokumen Renstra masih dalam proses permohonan persetujuan oleh Bappenas                                                                                                                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Mereview kembali kualitas rencana aksi pada sebagian unit kerja untuk memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut                                | Melakukan Verifikasi Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum                                                                                                                                    | Laporan Hasil Verifikasi Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum                                                            | Triwulan III, IV 2025                  | Biro Perencanaan dan Organisasi                                           | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025                                                                                                                                          |
| 5 | Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemantauan kinerja setiap level organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)                                                                  | 1. Melakukan pemantauan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum melalui aplikasi E-Performance<br>2. Melakukan integrasi aplikasi E-Performance dengan SIMPEG                                                               | 1. Laporan Pemantauan hasil evaluasi per triwulan<br>2. Capture Hasil Integrasi aplikasi E-Performance dengan SIMPEG                                                      | 1. Per Triwulan<br>2. Triwulan IV 2025 | Biro Perencanaan dan Organisasi                                           | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Laporan Evaluasi E-Performance Triwulan I dan II Tahun 2025<br>2. Akan dilakukan integrasi antara aplikasi pengukuran kinerja organisasi (E-Performance) dan aplikasi pengukuran kinerja individu (SIMPEG). Namun hingga saat ini masih dalam proses penginputan data kinerja pada fitur E-Kinerja aplikasi SIMPEG oleh Biro SDM |
| 6 | Memastikan dokumen IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja                                                                           | Melakukan Penyusunan Manual IKU sesuai Renstra Kementerian Hukum tahun 2025 - 2029                                                                                                                                                            | Dokumen Manual IKU Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029                                                                                                                    | Triwulan IV 2025                       | Biro Perencanaan dan Organisasi                                           | Hingga Januari Tahun 2026, Dokumen Manual IKU Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029 masih dalam proses penandatanganan Bapak Menteri Hukum Namun telah diupload Kepmenkumham Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                                          |
| 7 | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana aksi secara berkala dan mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan pada unit kerja di bawahnya secara berjenjang                                                              | Melakukan Evaluasi dan Self Assessment atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara berkala untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum                                                                                         | 1. Laporan Self Assessment atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum<br>2. Laporan Hasil Evaluasi                                                            | Triwulan III, IV 2025                  | 1. Seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum<br>2. Setjen, Ditjen AHU, BPSDM | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum<br>Surat Dinas tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Rencana Aksi<br>2. Laporan Hasil Evaluasi (B08)                                                    |
| 8 | Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward and punishment</i> , penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai | 1. Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025<br>2. Kesempatan untuk mendapatkan sertifikat/beasiswa bagi pegawai yang berprestasi<br>3. Kenaikan pangkat luar biasa bagi pegawai yang berprestasi | Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia hal Penyampaian Hasil Capaian Kinerja Bidang Administratif Semester I Tahun 2025 | Triwulan IV 2025                       | 1. Biro Perencanaan & Organisasi<br>2. Biro Sumber Daya Manusia           | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia hal Penyampaian Hasil Capaian Kinerja Bidang Administratif Semester I Tahun 2025<br>2. Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025 berdasarkan 5 Indikator Penilaian                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan revaluasi laporan kinerja unit kerja sebelum dipublikasikan | Melakukan Revaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum | 1. Hasil Revaluasi Laporan Kinerja seluruh satuan kerja secara berjenjang<br>2. Berita Acara Hasil Revaluasi Laporan Kinerja seluruh satuan kerja | 1.Triwulan II 2025<br>2.Triwulan III 2025 | 1. APIP Inspektorat Jenderal<br>2. Biro Perencanaan dan Organisasi | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Surat Penyampaian Hasil Revaluasi LKjIP Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum Tahun 2024<br>2. Berita Acara Hasil Revaluasi yang dapat diakses pada link berikut <a href="https://bit.ly/BA_Revaluasi_LKjIP_KanwilUPT_TA2024">https://bit.ly/BA_Revaluasi_LKjIP_KanwilUPT_TA2024</a><br>3. Perbaikan LKjIP Tahun 2024 atas Hasil Revaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Melakukan penetapan Target berdasarkan <i>baseline</i> dengan melihat ketercapaian Target tiap Indikator pada Tahun-tahun sebelumnya     | Surat Penyampaian Informasi Capaian Target pada tahun sebelumnya                                                                                  | Triwulan IV 2025                          | Biro Perencanaan dan Organisasi                                    | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Nota Dinas Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja kepada Kepala Bagian Program dan Anggaran hal Penyampaian Data Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                           | Melakukan Evaluasi Kinerja secara berkala dan berkelanjutan                                                                              | 1. Laporan <i>Self Assessment</i> atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum<br>2. Laporan Hasil Evaluasi                             | Per Triwulan                              | Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum               | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Surat Setjen perihal Penyampaian Hasil Evaluasi AKIP di lingkungan Kanwil & UPT<br>2. Surat Itjen perihal Penyampaian Hasil Evaluasi AKIP di lingkungan Unit Eselon I<br>3. Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut AKIP Triwulan I dan II Tahun 2025 (Triwulan III masih dalam proses penyusunan)<br>4. Laporan tindak lanjut atas LHE AKIP Internal<br>5. Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP (KAPIP) Tahun 2024 (Hingga Minggu I Oktober Tahun 2025 belum dilakukan evaluasi oleh BPKP, namun telah diupload <i>Draft</i> Laporan Penilaian Mandiri KAPIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal yang masih dalam proses tanda tangan) |
| 12 | Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional <i>judgement</i> secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi riil penerapan SAKIP setiap unit kerja                                                                                                                                                                                                                          | Melaksanakan <i>Workshop</i> Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                          | Dokumen Pelaksanaan <i>Workshop</i> Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                            | B05 2025                                  | APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum                        | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Dokumen <i>Workshop</i> Evaluasi dan Peningkatan Kualitas SAKIP oleh Inspektorat Jenderal mengundang Narasumber dari KemenPANRB pada tanggal 7 Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat menjadi perhatian pimpinan unit kerja dan memastikan adanya proses <i>monitoring</i> untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan berjalan dengan baik                                     | Menyusun Rencana Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk disampaikan ke seluruh pimpinan satuan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Dokumen RTL<br>2. Hasil Evaluasi RTL                                                                                                                                                        | Triwulan II sd IV 2025                     | Biro Perencanaan dan Organisasi                                   | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Dokumen RTL Rekomendasi AKIP Kemenkumham Tahun 2024 dapat diakses pada link berikut <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EfTVrwCsi9oT2L4sTIFgVyKSRxcM6Xl_Rx4b9LimHsU/edit?gid=0#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EfTVrwCsi9oT2L4sTIFgVyKSRxcM6Xl_Rx4b9LimHsU/edit?gid=0#gid=0</a> |
| 14 | Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap unit kerja untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP                                                         | Melakukan Penyusunan Konsep Peraturan Menteri Hukum mengenai Pemberian Penghargaan, Pemberian Insentif penambahan Anggaran bagi satuan kerja dan Penganugerahan kepada kantor wilayah dengan capaian kinerja terbaik                                                                                                                                                                                                                        | 1. Konsep Peraturan Menteri Hukum tentang Pemberian Penghargaan bagi ASN, Purnabakti dan Mitra Kerja dilingkungan Kementerian Hukum<br>2. Konsep Kepmen/Permen Pedoman SAKIP Kementerian Hukum | Triwulan IV 2025                           | 1. Biro Sumber Daya Manusia<br>2. Biro Perencanaan dan Organisasi | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yaitu:<br>1. Permenkumham Nomor 24 Tahun 2023 tentang Hukuman Disiplin<br>2. Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Pemberian Penghargaan Karya Dhika Tahun 202<br>3. Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Tahun 2025<br>4. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghargaan    |
| 15 | Memastikan proses <i>transfer knowledge</i> terkait pembangunan SAKIP dari tim SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada tim SAKIP di Kementerian yang baru dapat berjalan optimal sehingga pembangunan SAKIP pada Kementerian baru dapat berjalan dengan baik | 1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan dalam rangka <i>Sharing Knowledge</i> AKIP Kementerian Hukum dan HAM serta penyusunan rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan mengundang Perwakilan dari Kementerian IMIPAS dan Kementerian HAM pada tanggal 26 Februari 2025<br>2. Telah dilaksanakan Rapat Pemanfaatan Aplikasi E-RB dan Aplikasi E-Performance dengan Kementerian HAM pada tanggal 6 Oktober 2025 | 1. Undangan Rapat<br>2. Notulensi Rapat<br>3. Absensi Rapat<br>4. Dokumentasi Rapat                                                                                                            | 1. Triwulan I 2025<br>2. Triwulan III 2025 | Biro Perencanaan dan Organisasi                                   | Bukti data dukung telah diupload pada Aplikasi ESR KemenPANRB, yang dapat dicek pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13SQvbbYERllbE5DPIqJs9CoViNshifDw">https://drive.google.com/drive/folders/13SQvbbYERllbE5DPIqJs9CoViNshifDw</a>                                                                                                                      |

**Tabel III.42 Capaian Pelaksanaan Tindak Lanjut atas LHE AKIP  
Kemenkumham Tahun 2024**



# **BAB IV PENUTUP**

---

- A. KESIMPULAN;**
- B. SARAN.**

Tahun 2025 merupakan awal mula pemerintahan Kabinet Merah Putih. Di tengah transformasi organisasi terhadap Kementerian/Lembaga, Kementerian Hukum terus berupaya mencapai target-target kinerja terutama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan sinergi seluruh insan pengayoman, kinerja Kementerian Hukum tahun 2025 mampu mencapai bahkan melebihi ekspektasi tidak hanya target tahunan namun juga target jangka menengah.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholders* dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Kementerian Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum, jumlah sumber daya manusia dan sebaran satuan kerja di 33 Provinsi merupakan tantangan dalam pencapaian kinerja Kementerian Hukum. Namun dengan tercapainya kinerja Kementerian Hukum dan berbagai prestasi serta penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025, inimerupakan bentuk nyata kerja keras seluruh insan pengayoman dalam mengabdikan kepada negara dan memberikan pelayanan hukum serta penegakan hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan core values (nilai-nilai dasar) ASN "BerAKHLAK" dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya dan berkelas dunia.





Untuk perbaikan di tahun berikutnya sebagai upaya untuk tetap menjaga kinerja dan prestasi yang telah diraih perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak yang signifikan dalam mendukung visi misi Kementerian Hukum antara lain:

- Fokus pada penguatan akuntabilitas kinerja, perencanaan, penyusunan, implementasi dan pelaporan yang berbasis hasil;
- Simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis melalui berbagai kebijakan strategis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Transformasi sumber daya manusia dalam mengembangkan kompetensi ASN, komitmen pimpinan dan budaya kerja berbasis tim;
- Pengawasan kinerja dan anggaran dalam menjaga sistem pengendalian intern untuk memastikan tindakan korektif diambil secara tepat dan cepat; serta
- Revitalisasi pelayanan publik dalam menyederhanakan birokrasi dan prosedur untuk meningkatkan kemudahan pelayanan.

Kendala dan permasalahan yang dialami dalam mencapai target kinerja masih dapat dilakukan tindak pengendalian untuk meminimalisir potensi risiko namun akan tetap menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholders dan seluruh satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target kinerja Kementerian Hukum dapat dicapai dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus menjaga kesinambungan dalam peningkatan pengelolaan organisasi, tata kelola, dan sumber daya demi Kementerian Hukum yang lebih baik dan berkontribusi yang lebih besar lagi bagi negara Indonesia.



**04 Februari 2026**  
**Menteri Hukum saat meninjau Pos Bantuan Hukum (Posbankum)**  
**Kelurahan Talise di Palu, Sulawesi Tengah**



**19 Februari 2025**  
**Menteri Hukum terima Agnez Mo dan musisi bahas royalti**



# LAMPIRAN

---

- A. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA;**
- B. PRESTASI/PENGHARGAAN;**
- C. CAPAIAN PADA PRIORITAS NASIONAL.**

# Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 7 Januari 2025



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supratman Andi Agtas  
Jabatan : Menteri Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Menteri Hukum  
  
Supratman Andi Agtas

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI HUKUM

| No. | Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                            | Target     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                          | (4)        |
| 1.  | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | Indeks Kepastian Hukum Nasional              | 3,1 Indeks |
| 2.  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90 Indeks  |

| No.   | Kegiatan                              | Anggaran                |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | Program Dukungan Manajemen            | Rp. 4.261.403.597.000,- |
| 2.    | Program Pembentukan Regulasi          | Rp. 53.677.076.000,-    |
| 3.    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 761.520.052.000,-   |
| Total |                                       | Rp. 5.066.600.725.000,- |

Jakarta, 7 Januari 2025

Menteri Hukum  
  
Supratman Andi Agtas

# Perjanjian Kinerja Menteri Hukum 23 Oktober 2025



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supratman Andi Agtas  
Jabatan : Menteri Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Menteri Hukum  
  
Supratman Andi Agtas

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 MENTERI HUKUM

| No. | Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                            | Target       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                          | (4)          |
| 1.  | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | 1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum      | 3,39 Indeks  |
|     |                                                                                                  | 2. Indeks Budaya Hukum                       | 0,83 Indeks  |
|     |                                                                                                  | 3. Indeks Materi Hukum                       | 0,51 Indeks  |
| 2.  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,38 Indeks |

| No.   | Kegiatan                              | Anggaran                |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1.    | Program Dukungan Manajemen            | Rp. 4.261.403.597.000,- |
| 2.    | Program Pembentukan Regulasi          | Rp. 53.677.076.000,-    |
| 3.    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 751.520.052.000,-   |
| Total |                                       | Rp. 5.066.600.725.000,- |

Jakarta, 23 Oktober 2025

Menteri Hukum  
  
Supratman Andi Agtas

# Draft Perjanjian Kinerja Menteri Hukum Tahun 2026



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 MENTERI HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supratman Andi Agtas  
Jabatan : Menteri Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 08 Januari 2026

Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 MENTERI HUKUM

| No. | Sasaran Strategis                                                                                | Indikator Kinerja                            | Target       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                                                              | (3)                                          | (4)          |
| 1.  | Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI                                              | 1) Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum      | 3,41 Indeks  |
|     |                                                                                                  | 2) Indeks Budaya Hukum                       | 0,84 Indeks  |
|     |                                                                                                  | 3) Indeks Materi Hukum                       | 0,52 Indeks  |
| 2.  | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum | 90,40 Indeks |

| No.   | Kegiatan                              | Anggaran              |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.    | Program Dukungan Manajemen            | Rp3.161.924.548.000,- |
| 2.    | Program Pembentukan Regulasi          | Rp47.823.238.000,-    |
| 3.    | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp605.069.214.000,-   |
| Total |                                       | Rp3.814.817.000.000,- |

Jakarta, 08 Januari 2026

Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas



Indeks Kualitas Kebijakan  
Kementerian Hukum dan HAM  
Terbaik II secara Nasional  
Tahun 2024 (Predikat Unggul)

Menteri Hukum Republik  
Indonesia Supratman  
Andi Agtas dinobatkan  
sebagai Tokoh Aspirasi  
Desa. Penerimaan  
penghargaan diwakili  
oleh Kepala Kantor  
Wilayah Kementerian  
Hukum Jawa Tengah  
Heni Susila Wardoyo  
mewakili Menteri Hukum.



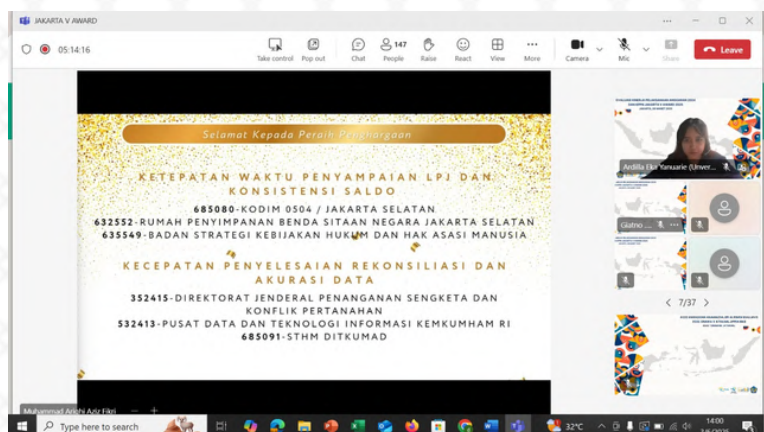
Kementerian Hukum  
menandatangani nota  
kesepahaman (MoU)  
dengan Kementerian  
Legislasi Pemerintah Korea  
Selatan untuk memulai  
proyek pembangunan  
sistem informasi hukum di  
Indonesia secara lebih  
komprehensif.

Kementerian Hukum  
mendapatkan peringkat  
pertama Kinerja  
Pelaksanaan Anggaran  
Tahun Anggaran 2024  
oleh Kementerian  
Keuangan.



Kementerian Hukum  
luncurkan Buku Tanya  
Jawab Seputar  
Pembentukan Perundang-  
undangan di tingkat pusat  
dan daerah dan Aplikasi e-  
HARMONISASI yang  
merupakan langkah  
strategis menuju regulasi  
yang lebih efektif dan  
terintegrasi.

Kementerian Hukum  
mendapat peringkat  
Terbaik III Kategori  
Ketepatan Waktu  
Penyampaian dan  
Konsistensi Saldo –  
Penghargaan Mitra  
Kerja KPPN Jakarta V  
Semester II Tahun  
Anggaran 2024.





Kementerian Hukum meraih penghargaan Digital Innovation in Public Services dalam ajang bergengsi Digital Innovation Awards (DIA) 2025 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group, melalui aplikasi AHU Online.

Melalui Kementerian Hukum, Indonesia Naik Kelas di FATF 2025. Indonesia saat ini berhasil meningkatkan peringkat kepatuhan terhadap rekomendasi 7 FATF.



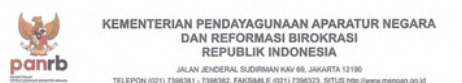
Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

Kementerian Hukum  
Penghargaan Kematangan  
UKPBJ Level 3 Proaktif dari  
Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah.



Inovasi Kementerian Hukum dengan  
judul “Pengembangan Implementasi  
Aplikasi Uji Kompetensi Psikotest  
Catar” sebagai Finalis Top Inovasi  
Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik di Lingkungan K/L,  
Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2025  
oleh Kemenpan RB dengan kategori  
Transformasi Digital Pelayanan Publik.

Kementerian Hukum  
mengesahkan Pembentukan  
80.081 Koperasi Desa/Kelurahan  
Merah Putih yang telah resmi  
berbadan hukum melalui sistem  
AHU Online di seluruh wilayah  
Republik Indonesia dalam waktu  
2 setengah bulan.



**PENGUMUMAN**  
NOMOR: B/242/PP.00.05/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH  
DAERAH, BUMN DAN BUMD TAHUN 2025 BERDASARKAN EFISIENSI ANGGARAN

Kementerian PANRB mengapresiasi antusiasme Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang telah berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Dengan mempertimbangkan masukan selama masa uji publik Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna layanan inovasi pelayanan publik, serta dalam rangka meningkatkan budaya inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, maka Tim Sekretariat KIPP 2025 mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh inovasi yang memenuhi passing grade nilai 85,00 ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tahap penilaian berikutnya.
2. Tahap penilaian berikutnya terdiri dari penilaian feasibilitas inovasi yang berpotensi untuk diterapkan secara nasional oleh Tim Panel Independen (TPI) dan penilaian kebermanfaatan inovasi dari masyarakat pada tanggal 01-05 Agustus 2025.
3. Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 diumumkan berdasarkan atjad sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
4. Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik wajib mempublikasikan video inovasi melalui media sosial Instagram instansi dan mengundang kolaborasi dengan akun Instagram Cerita Yanik (@cerita.yanik).
5. Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari pada lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

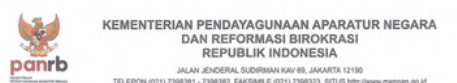
Jakarta, 28 Juli 2025  
Kepala Bidang Pelayanan Publik  
Sekretaris Tim Sekretariat KIPP Tahun 2025

Kementerian Hukum  
Penghargaan Kematangan  
UKPBJ Level 3 Proaktif dari  
Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah.



Kementerian Hukum  
mengesahkan Pembentukan  
80.081 Koperasi Desa/Kelurahan  
Merah Putih yang telah resmi  
berbadan hukum melalui sistem  
AHU Online di seluruh wilayah  
Republik Indonesia dalam waktu  
2 setengah bulan.

Inovasi Kementerian Hukum dengan  
judul "Pengembangan Implementasi  
Aplikasi Uji Kompetensi Psikotest  
Catar" sebagai Finalis Top Inovasi  
Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik di Lingkungan K/L,  
Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2025  
oleh Kemenpan RB dengan kategori  
Transformasi Digital Pelayanan Publik.



PENGUMUMAN  
NOMOR: 8/242/PP.05.05/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN FINALIS TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMPETISI  
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH  
DAERAH, BUMN DAN BUMD TAHUN 2025 BERDASARKAN EFISIENSI ANGGARAN

Kementerian PANRB mengapresiasi antusiasme Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang telah berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. Dengan mempertimbangan masukan selama masa uji publik Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna layanan inovasi pelayanan publik, serta dalam rangka meningkatkan budaya inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, maka Tim Sekretariat KIPP 2025 mengumumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh inovasi yang memenuhi passing grade nilai 85,00 ditetapkan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tahap penilaian berikutnya.
2. Tahap penilaian berikutnya terdiri dari penilaian fasilitas inovasi yang berpotensi untuk diterapkan secara nasional oleh Tim Panel Independen (TPI) dan penilaian keberlanjutan inovasi dari masyarakat pada tanggal 01-05 Agustus 2025.
3. Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 diumumkan berdasarkan abjad sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
4. Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik wajib mempublikasikan video inovasi melalui media sosial Instagram instansi dan mengundang kolaborasi dengan akun Instagram Cerita Yanik (@cerita.yanik).
5. Ketentuan lebih lanjut dapat dipelajari pada lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 28 Juli 2025  
Kepala Bidang Pelayanan Publik  
Ketua Tim Sekretariat KIPP Tahun 2025

Kementerian Hukum  
Penghargaan Kematangan  
UKPBJ Level 3 Proaktif dari  
Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah.



Inovasi Kementerian Hukum dengan  
judul “Pengembangan Implementasi  
Aplikasi Uji Kompetensi Psikotest  
Catat” sebagai Finalis Top Inovasi  
Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi  
Pelayanan Publik di Lingkungan K/L,  
Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2025  
oleh Kemenpan RB dengan kategori  
Transformasi Digital Pelayanan Publik.

Kementerian Hukum  
mengesahkan Pembentukan  
80.081 Koperasi Desa/Kelurahan  
Merah Putih yang telah resmi  
berbadan hukum melalui sistem  
AHU Online di seluruh wilayah  
Republik Indonesia dalam waktu  
2 setengah bulan.





Akreditasi A dengan nilai 98,70 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Hukum menerima Penghargaan dari ANRI atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terjaga untuk Melindungi Eksistensi Bangsa dan Negara.



Kementerian Hukum meraih predikat Akreditasi A dengan nilai 98,70 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Hukum meraih juara pertama atau penghargaan Terbaik I pada kategori Media Sosial Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025.



Kementerian Hukum mendapatkan penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2025 oleh iNews Media Group dalam kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik.

Menteri Hukum menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Koalisi Akses Keadilan (Justice Action Coalition/ JAC) dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat Indonesia.



**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN                                   |                                                                                                                       | BELANJA           |                   |        | TARGET                   | KINERJA REALISASI        | KET                                                     | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                       | ANGGARAN          | REALISASI         | %      |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KEMENTERIAN HUKUM</b>                 |                                                                                                                       | 3,858,441,470,622 | 2,787,134,837,940 | 72.23% |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SS 1</b>                              | <b>Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI</b>                                                            | 777,630,347,000   | 472,013,836,046   | 60.70% |                          |                          |                                                         | Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>IKSS 1.1</i>                          | <i>Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum</i>                                                                           |                   |                   |        | 3,39 Indeks              | 3,76 Indeks              | 110,91%                                                 | Keterkaitan antara Sasaran Strategis "Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh Wilayah NKRI" dengan PN 7 adalah:<br>1. Mendukung kepada Sasaran Pembangunan PN 7<br>"Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional"<br>Didalam Sasaran PN 7 telah ditetapkan arah kebijakan antara lain:<br>a. Reformasi Hukum.<br>b. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum.<br>2. Adapun isu yang melatarbelakangi sasaran PN 7<br>"Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional" adalah:<br>a. Kondisi hiper-regulasi, sepanjang 2019-2023 terdapat 5.267 Permen yang diterbitkan<br>b. Rendahnya kepatutan hukum masyarakat dan penyelenggara negara.<br>3. Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum merupakan indikator dari Sasaran PN 7<br>"Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional", yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. |
| <i>IKSS 1.2</i>                          | <i>Indeks Budaya Hukum</i>                                                                                            |                   |                   |        | 0,83 Indeks              | 0,81 Indeks              | 97,59%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>IKSS 13</i>                           | <i>Indeks Materi Hukum</i>                                                                                            |                   |                   |        | 0,51 Indeks              | 0,61 Indeks              | 119,60%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>IKSS 2.1</i>                          | <i>Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum</i>                                                                   |                   |                   |        | 90,38 Indeks             | n/a                      | Nilai belum keluar                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI (BB)</b> |                                                                                                                       | 33,532,656,000    | 25,170,015,981    | 75.06% |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SP BB 1</b>                           | <b>Meningkatnya Kepatutan Hukum Lembaga Hukum</b>                                                                     |                   |                   |        | 0,94                     | 0,97                     | 103,20%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>IKP BB 1.1</i>                        | <i>Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum</i>                                                                          |                   |                   |        |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SP BB 2</b>                           | <b>Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan</b>                                                             |                   |                   |        | 3,26 Indeks              | 3,78 Indeks              | 115,95%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>IKP BB 2.1</i>                        | <i>Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan</i>                                                                   |                   |                   |        |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SP BB 3</b>                           | <b>Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional</b>                |                   |                   |        |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>IKP BB 3.1</i>                        | <i>Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional</i> |                   |                   |        | 50%                      | 100%                     | 200%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <b>7123</b>                                                                                                           | 1,292,567,000     | 1,272,077,029     | 98.41% |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <b>SK 7123.1</b>                                                                                                      |                   |                   |        |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>IKK 7123.1.1</i>                                                                                                   |                   |                   |        | 75%                      | 98,56%                   | 131,41%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7123.AFA.001</i>                                                                                                   | 202,509,000       | 197,363,622       | 97.46% | 2 NSPK                   | 4 NSPK                   | 200%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7123.BDB.001</i>                                                                                                   | 78,185,000        | 76,868,408        | 98.32% | 8 Lembaga                | 9 Lembaga                | 112,5%                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7123.BDB.002</i>                                                                                                   | 176,956,000       | 175,776,122       | 99.33% | 8 Lembaga                | 8 Lembaga                | 100%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <b>SK 7123.2</b>                                                                                                      |                   |                   |        |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>IKK 7123.2.1</i>                                                                                                   |                   |                   |        | 75%                      | 81,65%                   | 108,87%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7123.ADG.001</i>                                                                                                   | 663,400,000       | 652,645,525       | 98.38% | 200 Orang                | 240 Orang                | 120%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7123.AFA.002</i>                                                                                                   | 74,515,000        | 73,874,560        | 99.14% | 3 NSPK                   | 3 NSPK                   | 100%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7123.BDB.003</i>                                                                                                   | 97,002,000        | 95,548,792        | 98.50% | 5 Lembaga                | 20 Lembaga               | 400%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <b>7124</b>                                                                                                           | 907,768,000       | 906,239,039       | 99.83% |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <b>SK 7124.1</b>                                                                                                      |                   |                   |        |                          |                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>IKK 7124.1.1</i>                                                                                                   |                   |                   |        | 81%                      | 81,66%                   | 100,81%                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7124.ABD.001</i>                                                                                                   | 177,227,000       | 177,165,000       | 99.97% | 22 Rekomendasi Kebijakan | 91 Rekomendasi Kebijakan | 414%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7124.ABD.002</i>                                                                                                   | 332,415,000       | 331,660,300       | 99.77% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 93 Rekomendasi Kebijakan | 465 %                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7124.ABD.003</i>                                                                                                   | 393,291,000       | 392,612,129       | 99.83% | 18 Rekomendasi Kebijakan | 77 Rekomendasi Kebijakan | 428%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>IKK 7124.1.2</i>                                                                                                   |                   |                   |        | 81%                      | 100%                     | 123%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7124.ABD.004</i>                                                                                                   | 240,000           | 239,500           | 99.79% | 2 Rekomendasi Kebijakan  | 2 Rekomendasi Kebijakan  | 100%                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | <i>7124.ABD.005</i>                                                                                                   | 2,165,000         | 2,141,200         | 98.90% | 2 Rekomendasi Kebijakan  | -                        | Tidak ada permohonan (Realisasi berdasarkan permohonan) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Data versi excel dapat diakses pada link berikut: [https://drive.google.com/drive/folders/1zzpgUhSfIRaUQ2djuaqplj2SqAnrdINC?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1zzpgUhSfIRaUQ2djuaqplj2SqAnrdINC?usp=drive_link)

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              |                                                                                                                                                           | BELANJA       |               |        | TARGET                   | KINERJA REALISASI        | KET                                                                    | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                                                           | ANGGARAN      | REALISASI     | %      |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | 7124.ABD.006 | Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan di Luar Pengadilan Bidang Perekonomian                                                     | 2,430,000     | 2,420,910     | 99.63% | 2 Rekomendasi Kebijakan  | -                        | Tidak ada permohonan (Realisasi berdasarkan permohonan)                |                                       |
|        | 7125         | PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                                                                                                                  | 4,736,820,000 | 4,547,574,705 | 96.00% |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | SK 7125.1    | Meningkatnya penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum sesuai perencanaan                                                    |               |               |        |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | IKK 7125.1.1 | Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kemenkum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan                                          |               |               |        | 80%                      | 107,3%                   | 134,12%                                                                |                                       |
|        | 7125.AAA.001 | Penyusunan Rancangan Undang-Undang                                                                                                                        | 640,240,000   | 634,262,863   | 99.07% | 3 RUU                    | 8 RUU                    | 266,67%                                                                |                                       |
|        | 7125.AAA.002 | Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Penyusunan DIM                                                                                                     | 308,952,000   | 301,583,653   | 97.62% | 2 RUU                    | 4 RUU                    | 200%                                                                   |                                       |
|        | 7125.AAC.001 | Rancangan Peraturan Pemerintah                                                                                                                            | 40,570,000    | 39,720,000    | 97.90% | 4 RPP                    | 11 RPP                   | 275%                                                                   |                                       |
|        | 7125.AAD.001 | Rancangan Peraturan Presiden                                                                                                                              | 385,568,000   | 375,657,785   | 97.43% | 4 Rperpres               | 5 RPERPRES               | 125%                                                                   |                                       |
|        | 7125.AAG.001 | Rancangan Peraturan Menteri                                                                                                                               | 155,274,000   | 146,841,101   | 94.57% | 4 Permen                 | 5 RPERMEN                | 125%                                                                   |                                       |
|        | 7125.ABD.001 | Konsep RPUU                                                                                                                                               | 61,532,000    | 57,863,628    | 94.04% | 6 Rekomendasi Kebijakan  | 11 Rekomendasi Kebijakan | 183,33%                                                                |                                       |
|        | 7125.PAA.002 | RUU KUH Acara Perdata                                                                                                                                     | 904,291,000   | 894,457,727   | 98.91% | 1 RUU                    | 1 RUU                    | 100%                                                                   |                                       |
|        | 7125.PAA.003 | RUU Kepailitan                                                                                                                                            | 387,726,000   | 387,204,021   | 99.87% | 1 RUU                    | 1 RUU                    | 100%                                                                   |                                       |
|        | 7125.PAA.004 | RUU Jaminan Benda Bergerak                                                                                                                                | 300,226,000   | 299,725,075   | 99.83% | 1 RUU                    | 1 RUU                    | 100%                                                                   |                                       |
|        | 7125.PAA.005 | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika                                                                            | 653,335,000   | 644,649,400   | 98.67% | 1 RUU                    | 1 RUU                    | 100%                                                                   |                                       |
|        | 7125.PAC.001 | RPP Pelaksanaan UU KUHP                                                                                                                                   | 899,106,000   | 765,609,452   | 85.15% | 3 RPP                    | 3 RPP                    | 100%                                                                   |                                       |
|        | 7126         | PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                                                                   | 1,162,801,000 | 1,145,260,280 | 98.49% |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | SK 7126.1    | Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan dan dipublikasikan                                                               |               |               |        |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | IKK 7126.1.1 | Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan                                                                                 |               |               |        | 91%                      | 100%                     | 109,89%                                                                |                                       |
|        | 7126.BMA.001 | Pengundangan PUU                                                                                                                                          | 291,809,000   | 286,059,600   | 98.03% | 1 Dokumen                | 1330                     | 1330%                                                                  |                                       |
|        | IKK 7126.1.2 | Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan                                                                               |               |               |        | 85%                      | 94,8%                    | 111,53%                                                                |                                       |
|        | 7126.BMA.004 | Terjemahan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                   | 316,831,000   | 315,027,574   | 99.43% | 1 Dokumen                | 147                      | 14,700% (Realisasi berdasarkan permohonan penerjemahan)                |                                       |
|        | IKK 7126.1.3 | Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Jurnal Legislasi Indonesia yang Dipublikasikan                                                                |               |               |        | 85%                      | 100%                     | 117,65%                                                                |                                       |
|        | 7126.BMA.002 | Publikasi Jurnal Legislasi Indonesia                                                                                                                      | 237,597,000   | 235,044,898   | 98.93% | 1 Data                   | 4                        | 400%                                                                   |                                       |
|        | KK 7126.1.4  | ITingkat ketersediaan (Availability Time) sistem informasi PUU                                                                                            |               |               |        | 91%                      | 98%                      | 107,69%                                                                |                                       |
|        | 7126.BMA.003 | Data dan Informasi PUU                                                                                                                                    | 316,564,000   | 309,128,208   | 97.65% | 1 Layanan                | 1 Layanan                | 100%                                                                   |                                       |
|        | 7127         | HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG POLHUKHANKAMPEMIPAS DAN KOMDIGI                                                                         | 1,774,150,000 | 1,762,733,786 | 99.36% |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | SK 7127.1    | Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemipas dan komdigi sesuai ketentuan PUU                   |               |               |        |                          |                          |                                                                        |                                       |
|        | IKK 7127.1.1 | Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukhankampemipas dan komdigi yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU                  |               |               |        | 81%                      | 98,4%                    | 121,48%                                                                |                                       |
|        | 7127.ABD.001 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Politik, Pemerintahan, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Dan Kesejahteraan Rakyat | 1,774,150,000 | 1,762,733,786 | 99.36% | 80 Rekomendasi Kebijakan | 387                      | 483,75% (Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa) |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              |                                                                                                                               | BELANJA       |               |        | TARGET                   | KINERJA                 |  | KET                                                                      | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                               | ANGGARAN      | REALISASI     | %      |                          | REALISASI               |  |                                                                          |                                       |
|        | 7128         | HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                          | 1,149,723,000 | 1,137,374,344 | 98.93% |                          |                         |  |                                                                          |                                       |
|        | SK 7128.1    | Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan PUU  |               |               |        |                          |                         |  |                                                                          |                                       |
|        | IKK 7128.1.1 | Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesejahteraan Rakyat yang Selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU |               |               |        | 81%                      | 99,09%                  |  | 122,33%                                                                  |                                       |
|        | 7128.ABD.001 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, dan Penanaman Modal                                    | 89,940,000    | 89,712,141    | 99.75% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 109                     |  | 545%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7128.ABD.002 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Fiskal                                         | 89,940,000    | 89,664,397    | 99.69% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 171                     |  | 855%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7128.ABD.003 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang                 | 89,940,000    | 89,314,189    | 99.30% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 158                     |  | 790%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7128.ABD.004 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi                                     | 89,940,000    | 88,592,776    | 98.50% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 107                     |  | 535%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7128.ABD.005 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Kesejahteraan Masyarakat                                                             | 789,963,000   | 780,090,841   | 98.75% | 80 Rekomendasi Kebijakan | 654                     |  | 817,5%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa) |                                       |
|        | 7833         | HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN                                                                  | 938,502,000   | 933,425,825   | 99.46% |                          |                         |  |                                                                          |                                       |
|        | SK 7833.1    | Terwujudnya penyelesaian harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sesuai ketentuan PUU          |               |               |        |                          |                         |  |                                                                          |                                       |
|        | IKK 7833.1.1 | Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian yang selesai diharmonisasi sesuai ketentuan PUU         |               |               |        | 81%                      | 96,01%                  |  | 118,53%                                                                  |                                       |
|        | 7833.ABD.001 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Moneter, Jasa Keuangan, BUMN, dan Penanaman Modal                                    | 238,039,000   | 234,445,864   | 98.49% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 109                     |  | 545%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7833.ABD.002 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Fiskal                                         | 319,799,000   | 318,876,068   | 99.71% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 171                     |  | 855%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7833.ABD.003 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang                 | 50,896,000    | 50,743,000    | 99.70% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 158                     |  | 790%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7833.ABD.004 | Rekomendasi Hasil Harmonisasi PUU Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset, dan Teknologi                                     | 329,768,000   | 329,360,893   | 99.88% | 20 Rekomendasi Kebijakan | 107                     |  | 535%<br>(Realisasi berdasarkan permohonan harmonisasi oleh pemrakarsa)   |                                       |
|        | 7834         | PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                                                                                      | 1,388,301,000 | 1,361,423,347 | 98.06% |                          |                         |  |                                                                          |                                       |
|        | SK 7834.1    | Terwujudnya Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Berkualitas                                                              |               |               |        |                          |                         |  |                                                                          |                                       |
|        | IKK 7834.1.1 | Indeks Perencanaan Peraturan Perundang-undangan                                                                               |               |               |        | 3,10 Indeks              | 3,10                    |  | 100%                                                                     |                                       |
|        | 7834.ABD.001 | Rekomendasi kebijakan Program Legislasi                                                                                       | 200,020,000   | 198,573,519   | 99.28% | 1 Rekomendasi Kebijakan  | 1 Rekomendasi Kebijakan |  | 100%                                                                     |                                       |
|        | 7834.ABD.002 | Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Rancangan PP Dan Perpres                                                                     | 261,003,000   | 259,919,400   | 99.58% | 1 Rekomendasi Kebijakan  | 1 Rekomendasi Kebijakan |  | 100%                                                                     |                                       |
|        | 7834.ABD.003 | Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Naskah Akademik RUU                                                                          | 692,337,000   | 672,150,624   | 97.08% | 6 Rekomendasi Kebijakan  | 9 Rekomendasi Kebijakan |  | 150%                                                                     |                                       |
|        | 7834.ABD.004 | Rekomendasi Kebijakan Penyelarasan Naskah Akademik                                                                            | 153,420,000   | 153,156,200   | 99.83% | 2 Rekomendasi Kebijakan  | 4 Rekomendasi Kebijakan |  | 200%                                                                     |                                       |
|        | 7834.BDB.001 | Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                                                 | 81,521,000    | 77,623,604    | 95.22% | 1 Lembaga                | 2 Lembaga               |  | 200%                                                                     |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              |                                                                                                                              | BELANJA       |               |        | TARGET                      | KINERJA REALISASI          | KET                                                                                                                                                                                                                                      | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              | ANGGARAN      | REALISASI     | %      |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | 7129         | PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH                                                                   | 7,287,035,000 | 7,246,740,781 | 99.45% |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7129.1    | Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah                                                     |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7129.1.1 | Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum                                         |               |               |        | 100%                        | -                          | Dikarenakan adanya perpindahan tusi perencanaan PUU dari BPHN ke DJPP pada awal tahun 2025, hal ini berimbas pada belum adanya target kinerja dan anggaran perencanaan PUU di daerah. Target ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2026. |                                       |
|        | IKK 7129.1.2 | Persentase perancangan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum                                         |               |               |        | 100%                        | 99.51%                     | Permohonan yang belum selesai, telah diselesaikan pada awal tahun 2026                                                                                                                                                                   |                                       |
|        | 7129.ABD.001 | Rekomendasi Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah                                                                        | 6,289,752,000 | 6,258,941,974 | 99.51% | 1,067 Rekomendasi Kebijakan | 1055 Rekomendasi Kebijakan | 98,88%                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|        | 7129.ADG.001 | Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah                                                                   | 640,056,000   | 635,417,677   | 99.28% | 599 Orang                   | 595 Orang                  | 99,33%                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|        | 7129.FAE.001 | Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah                                                                        | 357,227,000   | 352,381,130   | 98.64% | 33 Dokumen                  | 32 Dokumen                 | 96,97%                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|        |              |                                                                                                                              |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        |              |                                                                                                                              |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | 7131         | ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL                                                                                         | 3,756,000,000 | 1,204,113,955 | 32.06% |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7131.1    | Meningkatnya Kualitas Analisis Hukum                                                                                         |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7131.1.1 | Persentase Analisis Hukum yang Naik Jenjang                                                                                  |               |               |        | 5%                          | 7,8%                       | 156%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | SK 7131.2    | Meningkatnya tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan                           |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7131.2.1 | Persentase hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh K/L             |               |               |        | 72%                         | 86,96%                     | 120,78%                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|        | 7131.AAG.001 | Penyusunan Permen Peraturan Pelaksanaan Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum | 117,903,000   |               | 0.00%  | 1 Permen                    | -                          | Blokir                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|        | 7131.ABD.001 | Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum                                                                                            | 1,486,904,000 | 813,233,766   | 54.69% | 60 Rekomendasi Kebijakan    | 300                        | 500%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | 7131.ABD.002 | Indeks Pembangunan Hukum                                                                                                     | 1,250,000,000 |               | 0.00%  | 1 Rekomendasi Kebijakan     | -                          | Blokir                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|        | 7131.ADG.001 | Standardisasi dan Bimbingan Jabatan Fungsional Analisis Hukum                                                                | 901,193,000   | 390,880,189   | 43.37% | 400 orang                   | 4610                       | 1.152,5%                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|        |              |                                                                                                                              |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | 7132         | PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL                                                                       | 4,632,360,000 | 3,150,305,046 | 68.01% |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7132.1    | Meningkatnya Kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum                                                                         |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7132.1.1 | Persentase Kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum                                                                           |               |               |        | N/A                         | 100%                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | SK 7132.2    | Terwujudnya Reformasi Hukum di Lingkungan K/L/D                                                                              |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7132.2.1 | Persentase K/L/D yang Berhasil Melakukan Reformasi Hukum                                                                     |               |               |        | N/A                         | 100%                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | SK 7132.3    | Meningkatnya K/L yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang-Undang                       |               |               |        |                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7132.3.1 | Persentase K/L/D yang melaksanakan rencana tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan Undang Undang                       |               |               |        | N/A                         | 100%                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | 7132.ABD.001 | Rekomendasi Program Legislasi                                                                                                | 138,818,000   |               | 0.00%  | -                           | -                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | 7132.ABD.002 | Rekomendasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden                                                 | 203,824,000   |               | 0.00%  | -                           | -                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Sudah tidak menjadi Tusi BPHN         |
|        | 7132.ABD.003 | Naskah Akademik RUU                                                                                                          | 436,872,000   |               | 0.00%  | -                           | -                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | 7132.ABD.004 | Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik                                                                                     | 346,603,000   |               | 0.00%  | -                           | -                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|        | 7132.ABD.005 | Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional                                                                               | 807,886,000   | 556,232,511   | 68.85% | 1 Rekomendasi Kebijakan     | 1                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | 7132.AFA.001 | Pedoman di bidang Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional                                                | 1,442,187,000 | 1,420,115,665 | 98.47% | 1 NSPK                      | 1                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        | 7132.BDB.001 | Fasilitasi perencanaan hukum nasional                                                                                        | 81,431,000    |               | 0.00%  | -                           | -                          | Sudah tidak menjadi Tusi BPHN                                                                                                                                                                                                            |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                                                             | BELANJA         |                 |        | TARGET                  | KINERJA                 |  | KET                           | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                             | ANGGARAN        | REALISASI       | %      |                         | REALISASI               |  |                               |                                       |
|        | 7132.BMA.001 | Informasi Indeks Pembangunan Hukum                                                                                          | 1,174,739,000   | 1,173,956,870   | 99.93% | 1 Dokumen, Peta, Data   | 1                       |  | 100%                          |                                       |
|        | 7133         | PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DI WILAYAH                                       | 4,506,629,000   | 502,747,844     | 11.16% |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | SK 7133.1    | Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda                                 |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | IKK 7133.1.1 | Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil |                 |                 |        | 10%                     | 10%                     |  | 100%                          |                                       |
|        | 7133.ABD.001 | Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah                                                                                 | 1,865,153,000   | 502,747,844     | 26.95% | 1                       | 1                       |  | 100%                          |                                       |
|        | 7133.BDB.001 | Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah                                                                      | 2,641,476,000   |                 | 0.00%  | -                       | -                       |  | Sudah tidak menjadi Tusi BPHN |                                       |
|        |              |                                                                                                                             |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              |                                                                                                                             |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (BF)                                                                                  | 687,676,485,000 | 433,542,908,781 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | SP BF 1 - Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional                                                                  |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 1.1 Indeks Penegakan Hukum AHU                                                                                       |                 |                 |        | 3.50 Indeks             | 3.88 Indeks             |  | 110.86%                       |                                       |
|        |              | SP BF 2 - Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU                                                                        |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU                                                            |                 |                 |        | 3.71 Indeks             | 3.86 Indeks             |  | 104.04%                       |                                       |
|        |              | SP BF 3 - Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan                                                                |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 3.1 Indeks kemudahan berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keper                                                     |                 |                 |        | 3.10 Indeks             | 3.65 Indeks             |  | 117.74%                       |                                       |
|        |              | SP BF 4 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual                           |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelind                                                         |                 |                 |        | 3.36 Indeks             | 3.43 Indeks             |  | 102.08%                       |                                       |
|        |              | SP BF 5 - Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Int                                                              |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 5.1 Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual                                                          |                 |                 |        | 3.05 Indeks             | 3.75 Indeks             |  | 122.95%                       |                                       |
|        |              | SP BF 6 - Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hu                                                               |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembi                                                          |                 |                 |        | 3.68 Indeks             | 3.87 Indeks             |  | 105.16%                       |                                       |
|        |              | SP BF 7 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap h                                                            |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual                                                        |                 |                 |        | 2.2 Indeks              | 2.16 Indeks             |  | 98.18%                        |                                       |
|        |              | SP BF 8 - Meningkatnya Kepatutan Hukum Masyarakat Indonesia                                                                 |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        |              | IKP BF 8.1 Tingkat Kepatutan Hukum Masyarakat                                                                               |                 |                 |        | 0.72 Nilai              | 0.72 Nilai              |  | 100%                          |                                       |
|        |              |                                                                                                                             |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | 7106         | ADMINISTRASI OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL                                                                         | 46,771,815,000  | 4,748,784,775   | 10.15% |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | SK 7106.1    | Terlaksananya Tindak Lanjut Pembentukan Perjanjian dan/atau Permintaan MLA dan Ekstradisi sesuai Kewenangan Otoritas Pusat  |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | IKK 7106.1.1 | Persentase Pembentukan Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti                                                   |                 |                 |        | 97%                     | 100%                    |  | 103.09%                       |                                       |
|        | IKK 7106.1.2 | Persentase Permintaan MLA dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti                                                               |                 |                 |        | 97%                     | 100%                    |  | 103.09%                       |                                       |
|        | SK 7106.2    | Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU                                         |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | IKK 7106.2.1 | Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional terhadap Standar Pelayanan                    |                 |                 |        | 95%                     | 99.99%                  |  | 105.25%                       |                                       |
|        | IKK 7106.2.2 | Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang Diselesaikan                                    |                 |                 |        | 97.50%                  | 100%                    |  | 102.56%                       |                                       |
|        | 7106.AEC.001 | Perjanjian Kerja Sama Bilateral di Bidang Otoritas Pusat                                                                    | 2,700,450,000   | 113,454,000     | 4.20%  | 5 Kesepakatan           | 12 Kesepakatan          |  | 240%                          |                                       |
|        | 7106.BAB.001 | Layanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional kepada Lembaga                                                               | 23,153,762,000  | 3,824,745,920   | 16.52% | 4 Lembaga               | 4 Lembaga               |  | 100%                          |                                       |
|        | 7106.BAH.001 | Layanan Atase Hukum di Luar Negeri                                                                                          | 2,936,439,000   | 162,508,975     | 5.53%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               |  | 100%                          |                                       |
|        | 7106.BAH.002 | Layanan Legalisasi Apostille                                                                                                | 1,880,980,000   | 57,236,140      | 3.04%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               |  | 100%                          |                                       |
|        | 7106.BCB.001 | Penanganan Perkara di Pengadilan Asing dan Forum Internasional                                                              | 10,499,382,000  |                 | 0.00%  | 2 Perkara               | 3 Perkara               |  | 150%                          |                                       |
|        | 7106.PBD.001 | Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan (Akses) Konvensi HCCH 1965 Service Convention                                         | 5,600,802,000   | 590,839,740     | 10.55% | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |  | 100%                          |                                       |
|        |              |                                                                                                                             |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | 7107         | ADMINISTRASI HUKUM PERDATA                                                                                                  | 24,662,579,000  | 2,471,454,466   | 10.02% |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | SK 7107.1    | Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU                                                                  |                 |                 |        |                         |                         |  |                               |                                       |
|        | IKK 7107.1.1 | Tingkat kepatuhan layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan                                  |                 |                 |        | 95%                     | 100%                    |  | 105.26%%                      |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                                                                                    | BELANJA         |                |        | TARGET      | KINERJA     |  | KET      | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|-------------|--|----------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                                                    | ANGGARAN        | REALISASI      | %      |             | REALISASI   |  |          |                                       |
|        | IKK 7107.1.2 | Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang Diselesaikan                                                                                    |                 |                |        | 97.50%      | 100%        |  | 102,56%  |                                       |
|        | SK 7107.2    | Meningkatnya Kinerja Kurator Keperdataan                                                                                                           |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7107.2.1 | Persentase Kurator Keperdataan dengan kinerja "Baik"                                                                                               |                 |                |        | 90%         | 100%        |  | 111,11%  |                                       |
|        | SK 7107.3    | Meningkatnya Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia serta Pendaftaran Kurator dan Pengurus                                                          |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7107.3.1 | Tingkat Kemudahan Pendaftaran Jaminan Fidusia                                                                                                      |                 |                |        | 83%         | 94,48%      |  | 113,83%  |                                       |
|        | IKK 7107.3.2 | Tingkat Kemudahan Pendaftaran Kurator dan Pengurus                                                                                                 |                 |                |        | 81%         | 88%         |  | 108,64%  |                                       |
|        | 7107.BAH.001 | Layanan Administrasi Jaminan Fidusia dan Ijin Jual Boedel                                                                                          | 1,050,327,000   |                | 0.00%  | 2 Layanan   | 2 Layanan   |  | 100%     |                                       |
|        | 7107.BAH.002 | Layanan Hukum Perdata Umum, Harta Peninggalan dan Kurator Negara, serta Kenotariatan                                                               | 21,822,444,000  | 1,830,478,902  | 8.39%  | 3 Layanan   | 3 Layanan   |  | 100%     |                                       |
|        | 7107.BCB.001 | Penanganan Perkara Keperdataan                                                                                                                     | 1,457,648,000   | 350,406,583    | 24.04% | 15 Perkara  | 15 Perkara  |  | 100%     |                                       |
|        | 7107.BDB.001 | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga di Bidang Administrasi Hukum Perdata                                                                              | 332,160,000     | 290,568,981    | 87.48% | 1 Lembaga   | 1 Lembaga   |  | 100%     |                                       |
|        |              |                                                                                                                                                    |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | 7108         | ADMINISTRASI HUKUM PIDANA                                                                                                                          | 11,235,779,000  | 1,775,419,110  | 15.80% |             |             |  |          |                                       |
|        | SK 7108.1    | Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli dalam Mendukung Penegakan Hukum                                                                            |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7108.1.1 | Persentase Keterangan Ahli yang Diberikan Sesuai Permintaan                                                                                        |                 |                |        | 95%         | 100%        |  | 105.26%  |                                       |
|        | SK 7108.2    | Terselenggaranya Penempatan Sumber Daya Manusia PPNS Sesuai Bidangannya                                                                            |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7108.2.1 | Persentase PPNS yang Bekerja di Bidang Penyelidikan dan/atau Penyidikan                                                                            |                 |                |        | 85%         | 89.80%      |  | 105.64%  |                                       |
|        | SK 7108.3    | Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU                                                                         |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7108.3.1 | Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan                                         |                 |                |        | 95%         | 99.16%      |  | 101.70%  |                                       |
|        | IKK 7108.3.2 | Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan                                                                    |                 |                |        | 97.50%      | 99.38%      |  | 101.92%  |                                       |
|        | 7108.BAB.001 | Layanan Pemberian Keterangan Ahli dan Administrasi PPNS                                                                                            | 1,622,383,000   | 281,935,721    | 17.38% | 6 Lembaga   | 6 Lembaga   |  | 100%     |                                       |
|        | 7108.BAH.001 | Layanan Permohonan Grasi, Pendapat Hukum Pidana, dan Pengelolaan Data Sidik Jari                                                                   | 9,613,396,000   | 1,493,483,389  | 15.54% | 3 Layanan   | 3 Layanan   |  | 100%     |                                       |
|        |              |                                                                                                                                                    |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | 7109         | ADMINISTRASI HUKUM TATA NEGARA                                                                                                                     | 13,725,135,000  | 3,192,479,167  | 23.26% |             |             |  |          |                                       |
|        | SK 7109.1    | Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU                                                                                     |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7109.1.1 | Tingkat kepatuhan Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Ditjen AHU terhadap Standar Pelayanan                                                     |                 |                |        | 95%         | 97.74%      |  | 102,888% |                                       |
|        | IKK 7109.1.2 | Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang Diselesaikan                                                                                |                 |                |        | 97.50%      | 97.74%      |  | 100.25%  |                                       |
|        | 7109.BAA.001 | Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan                                                                                                 | 12,605,772,000  | 3,071,123,927  | 24.36% | 2700 orang  | 2700 orang  |  | 100%     |                                       |
|        | 7109.BAH.001 | Layanan Administrasi Badan Hukum Partai Politik                                                                                                    | 692,082,000     | 30,696,500     | 4.44%  | 1 Layanan   | 1 Layanan   |  | 100%     |                                       |
|        | 7109.BCB.001 | Penanganan Perkara Badan Hukum Partai Politik                                                                                                      | 427,281,000     | 90,658,740     | 21.22% | 1 Perkara   | 1 Perkara   |  | 100%     |                                       |
|        |              |                                                                                                                                                    |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | 7110         | PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH                                                                                                 | 110,770,518,000 | 40,663,959,952 | 36.71% |             |             |  |          |                                       |
|        | SK 7110.1    | Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah                                                                         |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7110.1.1 | Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah                                                                                       |                 |                |        | 3.20 Indeks | 3.23 Indeks |  | 100,94%  |                                       |
|        | SK 7110.2    | Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah                                         |                 |                |        |             |             |  |          |                                       |
|        | IKK 7110.2.1 | Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah |                 |                |        | 98.10%      | 98.42%      |  | 100.33%  |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |  |                     | BELANJA                                                                                                                  |                 |                 | TARGET | KINERJA            |                    | KET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |  |                     | ANGGARAN                                                                                                                 | REALISASI       | %               |        | REALISASI          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <b>SK 7110.3</b>    | <b>Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan</b>                                                          |                 |                 |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <i>IKK 7110.3.1</i> | <i>Persentase Penyelesaian Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan</i>                                                |                 |                 | 98.10% | 100%               |                    | 101.94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        |  | <i>7110.BAH.001</i> | <i>Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah</i>                                                                        | 53,922,509,000  | 22,274,140,519  | 41.31% | 132 Layanan        | 131 Layanan        | 99,24%<br>(kanwil sumatera utara hanya memenuhi 3 dari 4 layanan target RO di wilayah)                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|        |  | <i>7110.BAH.002</i> | <i>Layanan Balai Harta Peninggalan</i>                                                                                   | 13,404,765,000  | 2,364,665,959   | 17.64% | 25 Layanan         | 25 Layanan         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7110.BAH.003</i> | <i>Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah</i>                                                                    | 2,891,681,000   | 678,730,956     | 23.47% | 33 Layanan         | 33 Layanan         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7110.BCB.001</i> | <i>Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah</i>                                                          | 657,661,000     | 95,491,100      | 14.52% | 33 Perkara         | 33 Perkara         | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7110.BIC.001</i> | <i>Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah</i>                                                          | 39,893,902,000  | 15,250,931,418  | 38.23% | 276 Lembaga        | 273 Lembaga        | 98,91%<br>(Kanwil Sumatera Utara hanya memenuhi 10 dari 13 lembaga target RO di wilayah)                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|        |  | <b>7111</b>         | <b>PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI ADMINISTRASI HUKUM UMUM</b>                                                       | 213,129,492,000 | 206,903,229,517 | 97.08% |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <b>SK 7111.1</b>    | <b>Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Enabler Layanan Hukum Ditjen AHU</b>                  |                 |                 |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <i>IKK 7111.1.1</i> | <i>Service Level Agreement (SLA) Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen AHU</i>                               |                 |                 | 85%    | 100%               |                    | 117,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        |  | <i>IKK 7111.1.2</i> | <i>Mean Time to Respond (MTTR) terhadap Serangan Siber ke Ditjen AHU</i>                                                 |                 |                 | 1 Jam  | 0,33 jam           |                    | 506,06%<br>(untuk rumus ini menggunakan Rumus B berdasarkan Kepmen Pedoman Penyusunan LKJIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dimana apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik) |                                       |
|        |  | <i>7111.BMA.001</i> | <i>Layanan Data dan Informasi Ditjen AHU</i>                                                                             | 579,480,000     | 402,981,400     | 69.54% | 40 Data            | 40 Data            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7111.CAN.001</i> | <i>Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Administrasi Hukum Umum</i>                                          | 144,286,596,000 | 143,469,997,168 | 99.43% | 1 Unit             | 1 Unit             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7111.CCL.001</i> | <i>Layanan Pemeliharaan Sarana TIK Bidang Administrasi Hukum Umum</i>                                                    | 15,780,500,000  | 15,455,250,999  | 97.94% | 32 Unit            | 32 Unit            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7111.CDS.001</i> | <i>Layanan Pemeliharaan Prasarana TIK Bidang Administrasi Hukum Umum</i>                                                 | 4,577,683,000   | 3,773,800,000   | 82.44% | 2 Unit             | 2 Unit             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <i>7111.FAB.001</i> | <i>Sistem Informasi Administrasi Hukum Umum</i>                                                                          | 47,905,233,000  | 43,801,199,950  | 91.43% | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | <b>7112</b>         | <b>ADMINISTRASI BADAN USAHA</b>                                                                                          | 18,703,384,000  | 3,762,101,348   | 20.11% |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <b>SK 7112.1</b>    | <b>Dimanfaatkannya Data dan Informasi Badan Usaha dalam Penegakan Hukum</b>                                              |                 |                 |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <i>IKK 7112.1.1</i> | <i>Persentase Data dan Informasi Badan Usaha yang Dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH) Berdasarkan Kerja Sama</i>     |                 |                 | 90%    | 100%               |                    | 111,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        |  | <b>SK 7112.2</b>    | <b>Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha</b>                                                                     |                 |                 |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <i>IKK 7112.2.1</i> | <i>Tingkat Kepatuhan Layanan Administrasi Badan Usaha terhadap Standar Pelayanan</i>                                     |                 |                 | 95%    | 98,99%             |                    | 104,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|        |  | <i>IKK 7112.2.2</i> | <i>Persentase Layanan Administrasi Badan Usaha yang Diselesaikan</i>                                                     |                 |                 | 97.50% | 97.95%             |                    | 100,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        |  | <b>SK 7112.3</b>    | <b>Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perseorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha</b> |                 |                 |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        |  | <i>IKK 7112.3.1</i> | <i>Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas</i>                                                                    |                 |                 | 86%    | 88.56%             |                    | 102.98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        |  | <i>IKK 7112.3.2</i> | <i>Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan</i>                                                                  |                 |                 | 85%    | 94.21%             |                    | 110.84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |  |              | BELANJA                                                                                                                |                |               | KINERJA REALISASI |                                                                              | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                    |         |
|--------|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        |  |              | ANGGARAN                                                                                                               | REALISASI      | %             | TARGET            | KET                                                                          |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | 7112.BAH.001 | Layanan Administrasi Badan Usaha                                                                                       | 16,208,364,000 | 2,412,895,729 | 14.89%            | 1 Layanan                                                                    | 100%                                                                                                                                                     |         |
|        |  | 7112.BCB.001 | Penanganan Permasalahan Badan Usaha                                                                                    | 2,495,020,000  | 1,349,205,619 | 54.08%            | 70 Perkara                                                                   | 100%                                                                                                                                                     |         |
|        |  |              |                                                                                                                        |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  |              |                                                                                                                        |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | 7115         | PENYELENGGARAAN SISTEM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI                                                                   | 1,877,717,000  | 1,822,181,800 | 97.04%            |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | SK 7115.1    | Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri                                                                     |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7115.1.1 | Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan |                |               | 85%               | 100%                                                                         | 117,65%<br>(untuk saat ini yang digunakan adalah kepatuhan biaya, karena untuk data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih dikembangkan oleh TI) |         |
|        |  | IKK 7115.1.2 | Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait                                                     |                |               | 95%               | 100%                                                                         | 105,26%                                                                                                                                                  |         |
|        |  | IKK 7115.1.3 | Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri                                                                        |                |               | 80%               | 100%                                                                         | 125%                                                                                                                                                     |         |
|        |  | IKK 7115.1.4 | Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)                                                               |                |               | 75%               | 85,70%                                                                       | 114,27%                                                                                                                                                  |         |
|        |  | SK 7115.2    | Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta                                                                                      |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7115.2.1 | Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta                                                                            |                |               | 20%               | 29,17%                                                                       | 145,85%                                                                                                                                                  |         |
|        |  | SK 7115.3    | Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri                                                                               |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7115.3.1 | Persentase Desain Industri terdaftar                                                                                   |                |               | 75%               | 77,84%                                                                       | 103,79%                                                                                                                                                  |         |
|        |  | SK 7115.4    | Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal                                                                   |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7115.4.1 | Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal                                                         |                |               | 25%               | 2,23%                                                                        | 0.89%                                                                                                                                                    |         |
|        |  | SK 7115.5    | Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri                                                                         |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7115.5.1 | Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja "Baik"                                                             |                |               | 90%               | 100%                                                                         | 111,11%                                                                                                                                                  |         |
|        |  | 7115.AFA.001 | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal            | 347,180,000    | 336,590,142   | 96.95%            | 3 NSPK                                                                       | 3 NSPK                                                                                                                                                   | 100%    |
|        |  | 7115.BAH.001 | Layanan Hak Cipta                                                                                                      | 695,426,000    | 665,514,672   | 95.70%            | 120.000 Layanan                                                              | 226.782 Layanan                                                                                                                                          | 188,99% |
|        |  | 7115.BAH.002 | Layanan Desain Industri                                                                                                | 375,933,000    | 371,915,725   | 98.93%            | 5.500 Layanan                                                                | 8.449 Layanan                                                                                                                                            | 153,62% |
|        |  | 7115.BAH.003 | Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri                                                                   | 130,029,000    | 124,599,171   | 95.82%            | 300 Dokumen                                                                  | 670 Dokumen                                                                                                                                              | 223,33% |
|        |  | 7115.BAH.004 | Layanan Kekayaan Intelektual Komunal                                                                                   | 104,115,000    | 101,435,630   | 97.43%            | 1200 Layanan                                                                 | 963 Layanan                                                                                                                                              | 80,25%  |
|        |  | 7115.BDB.001 | Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif                                                                                   | 225,034,000    | 222,126,460   | 98.71%            | 1.0 Lembaga                                                                  | 1 lembaga                                                                                                                                                | 100%    |
|        |  |              |                                                                                                                        |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | 7116         | PENYELENGGARAAN KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL                                             | 9,733,413,000  | 9,347,400,026 | 96.03%            |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | SK 7116.1    | Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual                                                                   |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7116.1.1 | Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual                             |                |               | 2 indeks          | N/A                                                                          | Belum terdapat kategorisasi atas instrumen penghitungan                                                                                                  |         |
|        |  | SK 7116.2    | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual                                        |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7116.2.1 | Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual                                             |                |               | 2,2 indeks        | N/A                                                                          | Belum terdapat pembobotan kategorisasi serta konversi skala likert atas instrumen penghitungan                                                           |         |
|        |  | SK 7116.3    | Meningkatnya kinerja Analisis Kekayaan Intelektual                                                                     |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7116.3.1 | Persentase Analisis KI dengan kinerja "Baik"                                                                           |                |               | -                 | -                                                                            | Tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025                                                                                                     |         |
|        |  | SK 7116.4    | Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual                                                                           |                |               |                   |                                                                              |                                                                                                                                                          |         |
|        |  | IKK 7116.4.1 | Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat                            |                |               | -                 | -                                                                            | Tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025                                                                                                     |         |
|        |  | 7116.AEC.001 | Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual                                                                  | 3,654,418,000  | 3,277,629,717 | 89.69%            | 27<br>(terbentuknya kesepakatan kerja sama dan/atau implementasi kerja sama) | 32                                                                                                                                                       | 118,52% |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                                 |  | BELANJA       |               |         | TARGET                                                                       | KINERJA REALISASI | KET<br>294,29%                                                                                                                                                                                                               | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                 |  | ANGGARAN      | REALISASI     | %       |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        | 7116.AEC.002 | Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual                                          |  | 1,000         | -             | 0.00%   | 35<br>(terbentuknya kesepakatan kerja sama dan/atau implementasi kerja sama) | 103               | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI.                                                                                                                     |                                       |
|        | 7116.AFA.001 | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual        |  | -             | -             | -       | 5                                                                            | 5                 | 100%                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7116.BDC.001 | Diseminasi Kekayaan Intelektual                                                                 |  | 5,871,820,000 | 5,871,596,309 | 100.00% | 10.000                                                                       | 44.752            | 447,52%                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7116.BDC.002 | Edukasi Kekayaan Intelektual                                                                    |  | 121,974,000   | 112,974,000   | 92.62%  | 10.000                                                                       | 28.305            | 283,05%                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7116.BDC.003 | Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual                                                        |  | 85,200,000    | 85,200,000    | 100.00% | 1.000                                                                        | 1.370             | 137%                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7117         | PENYELENGGARAAN SISTEM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS                                             |  | 4,710,792,000 | 4,607,379,096 | 97.80%  |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        | SK 7117.1    | Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis                                               |  |               |               |         |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7117.1.1 | IKK 7117.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan. |  |               |               |         | 90%                                                                          | 100%              | Pada IKK ini realisasi 100%, dengan indikator yang digunakan saat ini berupa kepatuhan biaya, sementara data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih dalam tahap pengembangan oleh TI. Capaian Kinerja adalah 111.11% |                                       |
|        | IKK 7117.1.2 | Tingkat Validasi Sertifikat Merek                                                               |  |               |               |         | 90%                                                                          | 99,97%            | a. Jumlah Permohonan Merek TA 2025 = 150.561<br>b. Total Merek yang dimenangkan oleh Penggugat TA 2025 = 41<br>c. Capaian realisasi dibagi target sebesar 111,07%                                                            |                                       |
|        | IKK 7117.1.3 | ingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis                                                   |  |               |               |         | 90%                                                                          | 100%              | a. Total IG yang terdaftar TA 2025 = 86<br>b. Total IG yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat = 0<br>c. Capaian Realisasi dibagi Target = 111,11%                                                                       |                                       |
|        | SK 7117.2    | Meningkatnya Pendaftaran Merek                                                                  |  |               |               |         |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7117.2.1 | Persentase Merek Terdaftar                                                                      |  |               |               |         | 70%                                                                          | 105,06%           | a. Jumlah merek terdaftar 2025 = 150.561<br>b. Total Permohonan yang masuk tahun 2025 = 143.297<br>c. Capaian Realisasi dibagi target = 150,08%                                                                              |                                       |
|        | SK 7117.3    | Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis                                                     |  |               |               |         |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7117.3.1 | Persentase Indikasi Geografis Terdaftar                                                         |  |               |               |         | 50%                                                                          | 94,82%            | a. Jumlah Permohonan IG yang terdaftar tahun 2021-2025 = 165<br>b. Permohonan yang diajukan yang masuk tahun 20221-2025 = 174<br>c. Capaian sebesar 189,64%                                                                  |                                       |
|        | SK 7117.4    | Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek                                                            |  |               |               |         |                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7117.4.1 | Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"                                                |  |               |               |         | 82%                                                                          | 90,38%            | a. Jumlah JF Pemeriksa Merek kinerja "Baik" tahun 2025 = 141<br>b. Total Jumlah JF Pemeriksa Merek = 156<br>c. Capaian, realisasi dibagi target sebesar 110,21%                                                              |                                       |
|        | 7117.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis                   |  | 21,496,000    | 4,372,032     | 20.34%  | 2 NSPK                                                                       | 4 NSPK            | 200%                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7117.BAH.001 | Layanan Merek                                                                                   |  | 1,044,542,000 | 1,010,780,214 | 96.77%  | 71.780 Layanan                                                               | 183.197 Layanan   | 255,22%                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7117.BAH.002 | Layanan Indikasi Geografis                                                                      |  | 479,629,000   | 443,331,971   | 92.43%  | 18 Layanan                                                                   | 100 Layanan       | 555,56%                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7117.BAH.003 | Keputusan atas Permohonan Banding Merek                                                         |  | 2,740,602,000 | 2,734,544,000 | 99.78%  | 540 Layanan                                                                  | 603 Layanan       | 111,67%                                                                                                                                                                                                                      |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              |                                                                                                                   | BELANJA        |                |         | TARGET         | KINERJA REALISASI | KET                                                                                                                                                        | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                   | ANGGARAN       | REALISASI      | %       |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | 7117.BAH.004 | Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis                                                               | 424,523,000    | 414,350,879    | 97.60%  | 245 Layanan    | 533 Layanan       | 217,55%                                                                                                                                                    |                                       |
|        |              |                                                                                                                   |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | 7118         | PENYELENGGARAAN SISTEM PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG                                | 4,092,965,000  | 4,067,218,542  | 99.37%  |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | SK 7118.1    | Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang                                 |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7118.1.1 | Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan |                |                |         | 85%            | 87%               | 102,35%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | IKK 7118.1.2 | Tingkat Validasi Sertifikat Paten                                                                                 |                |                |         | 91%            | 100%              | 109,89%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | IKK 7118.1.3 | Tingkat Validasi Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu                                                     |                |                |         | -              | -                 | Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Manual IKU Renstra DJKI Tahun 2025 sd 2029, untuk IKK 7118.1.3 belum ditetapkan target di tahun 2025 |                                       |
|        | IKK 7118.1.4 | Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang                                                             |                |                |         | 91,5%          | 100%              | 109,29%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | SK 7118.2    | Meningkatnya Pendaftaran Paten                                                                                    |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7118.2.1 | Persentase Paten yang Diberi (granted)                                                                            |                |                |         | 35%            | 35,20%            | 100,57%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | SK 7118.3    | Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu                                                        |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7118.3.1 | Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar                                                       |                |                |         | 100%           | 100%              | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | SK 7118.4    | Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang                                                                 |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7118.4.1 | Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang                                                       |                |                |         | 10%            | 300%              | 3.000%                                                                                                                                                     |                                       |
|        | SK 7118.5    | Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten                                                                              |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7118.5.1 | Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"                                                                  |                |                |         | 82%            | 100%              | 121,95%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | 7118.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang     | 587,628,000    | 581,219,421    | 98.91%  | 3 NSPK         | 3 NSPK            | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7118.BAH.001 | Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang                                               | 322,188,000    | 305,976,919    | 94.97%  | 13.000 Layanan | 15.174 Layanan    | 116,72%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | 7118.BAH.002 | Keputusan atas Permohonan Banding Paten                                                                           | 3,081,361,000  | 3,078,636,000  | 99.91%  | 25 Layanan     | 25 Layanan        | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7118.BAH.003 | Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang                               | 101,788,000    | 101,386,202    | 99.61%  | 200 Layanan    | 843 Layanan       | 421,50%                                                                                                                                                    |                                       |
|        |              |                                                                                                                   |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | 7119         | PENYELENGGARAAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                              | 3,683,354,000  | 3,703,033.158  | 100.53% |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | SK 7119.1    | Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual                                          |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7119.1.1 | Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual                                                |                |                |         | 76%            | 100%              | 131,57%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | IKK 7119.1.2 | Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani                                                |                |                |         | 52%            | 70,37%            | 135,32%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | 7119.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI                         | 864,092,000    | 794,589,859    | 91.96%  | 2 NSPK         | 2 NSPK            | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7119.BAH.001 | Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual                                                                   | 735,554,000    | 751,527,252    | 102.17% | 60 Titik       | 135 Titik         | 225%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7119.BCE.001 | Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual                                                                   | 2,071,891,000  | 2,041,088,623  | 98.51%  | 20 Perkara     | 66 Perkara        | 330%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7119.BCE.002 | Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI                                                                                  | 11,817,000     | 115,827,424    | 980.18% | 18 Perkara     | 18 Perkara        | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        |              |                                                                                                                   |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | 7120         | PENYELENGGARAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                   | 63,500,465,000 | 56,351,234,405 | 88.74%  |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | SK 7120.1    | Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual                                             |                |                |         |                |                   |                                                                                                                                                            |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |  |              |                                                                                                                   | BELANJA        |                |        | TARGET             | KINERJA REALISASI      | KET                                                                                                                                                                                            | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |  |              |                                                                                                                   | ANGGARAN       | REALISASI      | %      |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7120.1.1 | Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual                                             |                |                |        | 98,50%             | N/A<br>(Not Available) | Untuk SLA belum tersedia atau N/A (Not Available) karena dokumen Service Level Agreement (SLA) selesai dibuat pada akhir Desember. SLA akan diterapkan pada tahun 2026.                        |                                       |
|        |  | IKK 7120.1.2 | Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia        |                |                |        | 98,5%              | 100%                   | Capaian: 101,52%                                                                                                                                                                               |                                       |
|        |  | IKK 7120.1.3 | Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual                                |                |                |        | 1 jam              | N/A<br>(Not Available) | untuk Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual tidak ada atau N/A (Not Available) karena tidak ada insiden siber yang terjadi pada periode tersebut. |                                       |
|        |  | 7120.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual                         | 6,045,684,000  | 4,516,293,013  | 74.70% | 5 NSPK             | 5 NSPK                 | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | 7120.BMA.001 | Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual                                                                   | -              | -              | -      | 1 Data             | 1 Data                 | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | 7120.CAN.001 | Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual                                             | 55,263,521,000 | 50,287,897,692 | 91.00% | 1 Unit             | 1 Unit                 | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | 7120.CDS.001 | Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual                     | 27,160,000     |                | 0.00%  | 1 Titik/Lokasi     | 1 Titik/Lokasi         | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | 7120.FAB.001 | Sistem Informasi Kekayaan Intelektual                                                                             | 2,164,100,000  | 1,547,043,700  | 71.49% | 1 Sistem Informasi | 1 Sistem Informasi     | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | 7121         | PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH                                                            | 74,543,338,000 | 25,316,337,582 | 33.96% |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | SK 7121.1    | Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah                                 |                |                |        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7121.1.1 | Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan |                |                |        | 85%                | N/A                    | Penetapan IKK baru sehingga belum terdapat instrumen perhitungan realisasi, baru akan dilakukan di tahun 2026                                                                                  |                                       |
|        |  | SK 7121.2    | Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan                           |                |                |        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7121.2.1 | Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani                                 |                |                |        | 30%                | 81,6%                  | 272%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | SK 7121.3    | Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah                                    |                |                |        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7121.3.1 | Tingkat Matuntas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah                                          |                |                |        | 2,30 Level         | 3,18 Level             | 138,26%                                                                                                                                                                                        |                                       |
|        |  | 7121.BDC.001 | Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                            | 42,062,656,000 | 9,437,893,680  | 22.44% | 33.900 Orang       | 33.575 Orang           | 99,04%                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | 7121.BDC.002 | Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                   | 25,073,100,000 | 14,077,126,760 | 56.14% | 10.348 Orang       | 10.288 Orang           | 99,42%                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | 7121.BDC.003 | Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual                                                       | 2,008,807,000  | 538,665,637    | 26.82% | 4.950 Orang        | 4.810 Orang            | 97,17%                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | 7121.BKB.001 | Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah                                                | 5,398,775,000  | 1,262,651,505  | 23.39% | 96 Laporan         | 95 Laporan             | 98,95%                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | 7134         | LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JDIHN                                                                                | 4,915,265,000  | 1,503,492,771  | 30.59% |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | SK 7134.1    | Tersedianya Layanan literasi hukum dan JDIHN yang Berkualitas                                                     |                |                |        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7134.1.1 | Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap Standar Pelayanan                                     |                |                |        | N/A                | N/A                    | N/A                                                                                                                                                                                            |                                       |
|        |  | IKK 7134.1.2 | Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia                                        |                |                |        | 35%                | 24,96%                 | 71,30%                                                                                                                                                                                         |                                       |
|        |  | SK 7134.2    | Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN                                                                         |                |                |        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7134.2.1 | Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN                                               |                |                |        | 100%               | 100%                   | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |
|        |  | 7134.AAD.001 | Rancangan Peraturan Presiden tentang JDIHN                                                                        | 497,691,000    | 95,099,000     | 19.11% | 1 RPerpres         | 1                      | 100%                                                                                                                                                                                           |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |                            | BELANJA                                                                                                |                |                | TARGET      | KINERJA REALISASI       | KET       | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|
|        |                            | ANGGARAN                                                                                               | REALISASI      | %              |             |                         |           |                                       |
|        | 7134.AFA.001               | Pedoman Pengelolaan TI BPHN                                                                            | 289,816,000    | 83,853,615     | 28.93%      | 1 NPSK                  | -         | Blokir                                |
|        | 7134.BDB.001               | Pengelolaan JDIHN                                                                                      | 2,621,257,000  | 1,044,237,014  | 39.84%      | 5 Lembaga               | 5 Lembaga | 100%                                  |
|        | 7134.BMA.001               | Dokumen dan Informasi Hukum                                                                            | 648,731,000    | 31,349,442     | 4.83%       | 530,000 Data            | 705,949   | 133,19%                               |
|        | 7134.CCL.001               | Layanan Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi BPHN                                    | 185,438,000    | 79,277,300     | 42.75%      | 1 Unit                  | -         | Blokir                                |
|        | 7134.FAB.001               | Sistem Informasi BPHN                                                                                  | 672,332,000    | 169,676,400    | 25.24%      | 1 Sistem Informasi      | -         | Blokir                                |
|        | 7135                       | PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM                                   | 7,442,285,000  | 3,044,425,148  | 40.91%      |                         |           |                                       |
|        | SK 7135.1                  | Meningkatnya Layanan penyuluhan hukum nasional                                                         |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7135.1.1               | Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum terhadap Standar Pelayanan                                  |                |                | 83%         | 98,75%                  | 118,97%   |                                       |
|        | SK 7135.2                  | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum                                                                     |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7135.2.1               | Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap Standar Pelayanan                                     |                |                | 83%         | 95,42%                  | 114,96%   |                                       |
|        | SK 7135.3                  | Terbangunnya Budaya Hukum Masyarakat                                                                   |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7135.3.1               | Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum                                             |                |                | 3.08 Indeks | 2.88 Indeks             | 93,50%    |                                       |
|        | IKK 7135.3.2               | Persentase pos bantuan hukum desa/kelurahan yang sudah memberikan layanan bantuan hukum sesuai standar |                |                | N/A         | 100%                    | 100%      |                                       |
|        | SK 7135.4                  | Meningkatnya kualitas Penyuluh hukum                                                                   |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7135.4.1               | Persentase Penyuluh hukum yang naik jenjang                                                            |                |                | 5%          | 5%                      | 100%      |                                       |
|        | 7135.ADG.001               | Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional                                                                      | 1,772,779,000  | 702,068,483    | 39.60%      | 500 Orang               | 4416      | 883,20%                               |
|        | 7135.BDD.001               | Penyuluhan hukum                                                                                       | 423,974,000    | 28,488,800     | 6.72%       | 150 Kelompok Masyarakat | 502       | 334,66%                               |
|        | 7135.BDD.002               | Pengelolaan Desa/Kelurahan sadar hukum                                                                 | 1,546,599,000  | 856,626,738    | 55.39%      | 5 Kelompok Masyarakat   | 36        | 720%                                  |
|        | 7135.BIB.001               | Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards                                                               | 2,118,388,000  | 1,299,906,500  | 61.36%      | 300 Orang               | 802       | 267,33%                               |
|        | 7135.BIC.001               | Pembinaan penyelenggaraan bantuan hukum                                                                | 1,255,635,000  | 140,138,627    | 11.16%      | 652 Lembaga             | 777       | 119,17%                               |
|        | 7135.BMA.001               | Penyusunan Konsep Peta Permasalahan Hukum                                                              | 324,910,000    | 17,196,000     | 5.29%       | 1 Dokumen Peta/Data     | 1         | 100%                                  |
|        | 7136                       | PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DI WILAYAH                                                             | 74,178,189,000 | 60,262,777,918 | 81.24%      |                         |           |                                       |
|        | SK 7136.1                  | Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah                                                          |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7136.1.1               | Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi                                    |                |                | 88%         | 78,59%                  | 89.30%    |                                       |
|        | SK 7136.2                  | Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas                |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7136.2.1               | Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah               |                |                | 50%         | 50%                     | 100%      |                                       |
|        | SK 7136.3                  | Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah                                                              |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | IKK 7136.3.1               | Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan                   |                |                | 10%         | 85.62%                  | 856.2%    |                                       |
|        | 7136.BDB.001               | Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah                                                                   | 3,095,388,000  | 809,893,518    | 26.16%      | 9.33                    | 9.94      | 106.53%                               |
|        | 7136.BDD.001               | Layanan penyuluhan hukum di Daerah                                                                     | 2,508,593,000  | 739,075,030    | 29.46%      | 2                       | 2.42      | 121.00%                               |
|        | 7136.BDD.002               | Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum                                                                   | 2,785,130,000  | 1,494,305,649  | 53.65%      | 9.55                    | 9.64      | 100.94%                               |
|        | 7136.BIB.001               | Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah                                                    | 1,522,995,000  | 599,637,977    | 39.37%      | 1                       | 1         | 100%                                  |
|        | 7136.BIC.001               | Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah                                                         | 3,358,200,000  | 735,757,168    | 21.91%      | 18.97                   | 19.79     | 104,32%                               |
|        | 7136.BMA.001               | Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah                                                            | 879,148,000    | 398,215,950    | 45.30%      | 1                       | 1         | 100%                                  |
|        | 7136.FAE.001               | Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum                                                     | 972,605,000    | 505,542,436    | 51.98%      | 1                       | 1         | 100%                                  |
|        | 7136.QBA.U01               | Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi                                                                        | 50,104,000,000 | 46,609,474,720 | 93.03%      | 230.73                  | 252.67    | 109,50%                               |
|        | 7136.QBC.U01               | Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi                                                                    | 8,952,130,000  | 8,370,875,470  | 93.51%      | 92.7                    | 99.36     | 107,18%                               |
|        |                            |                                                                                                        |                |                |             |                         |           |                                       |
|        |                            |                                                                                                        |                |                |             |                         |           |                                       |
|        | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN |                                                                                                        | 56,421,206,000 | 13,300,911,284 | 23.57%      |                         |           |                                       |
|        | SP WA 1                    | Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum                     |                |                |             |                         |           |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN   |            |                                                                                                                                                     | BELANJA           |                   |        | TARGET       | KINERJA REALISASI | KET                                                  | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |            |                                                                                                                                                     | ANGGARAN          | REALISASI         | %      |              |                   |                                                      |                                       |
|          | IKP WA 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum                                                          |                   |                   |        | 3.48         | 3.87              | 111.21%                                              |                                       |
|          |            | 7145 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional                                                                                                           | 12,066,857,000    | 2,837,385,439     | 23.51% |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | SK 7145.1 Meningkatnya Layanan Pelatihan Fungsional Hukum                                                                                           |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | IKK 7145.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Fungsional Hukum terhadap Standar Pelayanan                                                        |                   |                   |        | 80%          | 100.00%           | 125%                                                 |                                       |
|          |            | IKK 7145.1.2 Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional Hukum                  |                   |                   |        | 91%          | 100%              | 110%                                                 |                                       |
|          |            | IKK 7145.1.3 Persentase Alumni Peserta Pelatihan Fungsional Hukum yang Meningkatkan Kinerjanya terhadap Total Alumni                                |                   |                   |        | 91%          | 97.76%            | 107%                                                 |                                       |
|          |            | 7145.EBC.001 Layanan Pelatihan Fungsional                                                                                                           | 10,230,097,000    | 1,459,123,606     | 14.26% | 21,595 orang | 24,842 orang      | 115%                                                 |                                       |
|          |            | 7145.UAC.001 Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah                                                                                   | 1,836,760,000     | 1,378,261,833     | 75.04% | 120 orang    | 120 orang         | 100%                                                 |                                       |
|          |            |                                                                                                                                                     |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | 7146 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur                                                                                                  | 6,476,877,000     | 1,389,409,788     | 21.45% |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | SK 7146.1 Meningkatnya Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum                                                                             |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | IKK 7146.1.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Penilaian Kompetensi SDM di Bidang Hukum terhadap Standar Pelayanan                                          |                   |                   |        | 80%          | 92%               | 115%                                                 |                                       |
|          |            | IKK 7146.1.2 Persentase ASN Bidang Hukum yang Telah Mengikuti Penilaian Kompetensi                                                                  |                   |                   |        | 92%          | 133%              | 145%                                                 |                                       |
|          |            | IKK 7146.1.3 Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang Ditindaklanjuti                                                                             |                   |                   |        | 90%          | 99.23%            | 110%                                                 |                                       |
|          |            | 7146.ADG.954 Penilaian Kompetensi ASN Bidang Hukum                                                                                                  | 6,476,877,000     | 1,389,409,788     | 21.45% | 1,556 orang  | 2,073 orang       | 133%                                                 |                                       |
|          |            |                                                                                                                                                     |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | 7147 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan                                                                                              | 18,412,148,000    | 5,214,197,585     | 28.32% |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | SK 7147.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum                                                                          |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | IKK 7147.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum terhadap Standar Pelayanan                                       |                   |                   |        | 80%          | 98.90%            | 124%                                                 |                                       |
|          |            | IKK 7147.2.2 Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum |                   |                   |        | 91%          | 100%              | 110%                                                 |                                       |
|          |            | IKK 7147.2.3 Persentase Alumni Peserta Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan SDM Hukum yang Meningkatkan Kinerjanya terhadap Total Alumni               |                   |                   |        | 91%          | 96.72%            | 106%                                                 |                                       |
|          |            | 7147.EBC.001 Layanan Pelatihan Teknis bidang Hukum                                                                                                  | 5,714,059,000     | 2,301,688,398     | 40.28% | 17,872 orang | 20,245 orang      | 113.2%                                               |                                       |
|          |            | 7147.EBC.002 Layanan Pelatihan Kepemimpinan bidang Hukum                                                                                            | 10,864,994,000    | 1,395,676,201     | 12.85% | 887 orang    | 1,225 orang       | 138.1%                                               |                                       |
|          |            | 7147.UAC.001 Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP                                                                                        | 1,833,095,000     | 1,516,832,986     | 82.75% | 342 orang    | 342 orang         | 100%                                                 |                                       |
|          |            |                                                                                                                                                     |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | 7149 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah                                                                                                  | 19,465,324,000    | 3,859,918,472     | 19.83% |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | SK 7149.2 Meningkatnya Layanan Pelatihan Hukum di Wilayah                                                                                           |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | IKK 7149.2.1 Tingkat Kepatuhan Layanan Pelatihan Hukum di Balai Diklat Hukum terhadap Standar Pelayanan                                             |                   |                   |        | 0            | 0                 | Tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 |                                       |
|          |            | IKK 7149.2.2 Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Balai Diklat Hukum                                   |                   |                   |        | 0            | 0                 | Tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 |                                       |
|          |            | 7149.EBC.001 Layanan Pelatihan Bidang Hukum                                                                                                         | 19,465,324,000    | 3,859,918,472     | 19.83% | 10,851       | 10,851            | 100%                                                 |                                       |
|          |            |                                                                                                                                                     |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            |                                                                                                                                                     |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
| SS 2     |            | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi                                                    | 3,080,811,123,622 | 2,315,121,001,894 | 75.15% |              |                   |                                                      |                                       |
| IKSS 2.1 |            | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum                                                                                                        |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            |                                                                                                                                                     |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                                                                                                                          | 3,080,811,123,622 | 2,315,121,001,894 | 75.15% |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | SP WA.1 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum                                                                      |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | IKP WA 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum                                                                                     |                   |                   |        | 87.38        | n/a               | Nilai belum keluar                                   |                                       |
|          |            | SP WA.2 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum                                                                                           |                   |                   |        |              |                   |                                                      |                                       |
|          |            | IKP WA 2.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum                                                                                              |                   |                   |        | 65           | 92.54             | 142.37%                                              |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN     |                                                                                            | BELANJA                                                                  |               |               | TARGET      | KINERJA     |             | KET                                                                                                                                  | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                                                            | ANGGARAN                                                                 | REALISASI     | %             |             | REALISASI   |             |                                                                                                                                      |                                       |
| SP WA.3    | Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Hukum                                             |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
| IKP WA 3.1 | Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Hukum                                      |                                                                          |               |               | 3,20        | n/a         |             | Nilai belum keluar                                                                                                                   |                                       |
| SP WA.4    | Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum                                                   |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
| IKP WA 4.1 | Rata-Rata Penurunan Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum                         |                                                                          |               |               | 6,5 Indeks  | 7,2 Indeks  |             | 110,76%                                                                                                                              |                                       |
| SP WA.5    | Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum         |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
| IKP WA 5.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum |                                                                          |               |               | 3,48 Indeks | 3,87 Indeks |             | 111,20%                                                                                                                              |                                       |
|            |                                                                                            |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | 7092                                                                                       | HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA                                  | 6,088,432,000 | 6,003,588,940 | 98,61%      |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | SK 7092.1                                                                                  | Terwujudnya Reformasi Hukum Kementerian Hukum                            |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | IKK 7092.1.1                                                                               | Indeks Reformasi Hukum Kemenkum                                          |               |               | 100 Indeks  | 100 Indeks  |             | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | SK 7092.2                                                                                  | Meningkatnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik                |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | IKK 7092.2.1                                                                               | Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik                       |               |               | 90 Nilai    | 95,79 Nilai |             | 106,43%                                                                                                                              |                                       |
|            | SK 7092.3                                                                                  | Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum                             |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | IKK 7092.3.1                                                                               | Indeks citra positif Kementerian Hukum                                   |               |               | 80 Indeks   | 99 Indeks   |             | 123,75%                                                                                                                              |                                       |
|            | 7092 EBA 001                                                                               | Pembinaan dan Pelaksanaan Humas, Hukum, dan Kerja Sama                   | 2,961,842,000 | 2,951,720,548 | 99,66%      | 100%        | 100%        | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | 7092 EBA 002                                                                               | Kerja Sama                                                               | 1,930,120,000 | 1,861,248,392 | 96,43%      | 3,1 Indeks  | 3,86 Indeks | 124,5%                                                                                                                               |                                       |
|            | 7092 EBA 957                                                                               | Layanan Hukum                                                            | 16,470,000    | 16,470,000    | 100,00%     | 100%        | 100%        | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | 7092 EBA 958                                                                               | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                | 670,000,000   | 664,550,000   | 99,19%      | 100%        | 100%        | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | 7092 EBA 969                                                                               | Layanan Bantuan Hukum                                                    | 510,000,000   | 509,600,000   | 99,92%      | 85%         | 100%        | 117,6%                                                                                                                               |                                       |
|            |                                                                                            |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            |                                                                                            |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | 7093                                                                                       | PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM          | 5,216,352,000 | 5,205,384,748 | 99,79%      |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | SK 7093.1                                                                                  | Terinternalisasinya Budaya ASN Berakhlak di lingkungan Kementerian Hukum |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | IKK 7093.1.1                                                                               | Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum                                       |               |               | 77,2%       | 91,92%      |             | 119,07%                                                                                                                              |                                       |
|            | IKK 7093.1.2                                                                               | Indeks Sistem Merit Kementerian Hukum                                    |               |               | 380         | n/a         |             | Adanya likudasi KASIN Tahun 2024 sehingga tidak melaksanakan penilaian pada Tahun 2024                                               |                                       |
|            | 7093 EBC 001                                                                               | Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM                                    | 765,491,000   | 764,764,500   | 99,91%      | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | 7093 EBC 954                                                                               | Layanan Manajemen SDM                                                    | 4,450,861,000 | 4,440,620,248 | 99,77%      | 5.000 Orang | 5.000 Orang | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            |                                                                                            |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | 7094                                                                                       | PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN HUKUM          | 4,378,889,000 | 4,370,621,807 | 99,81%      |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | SK 7094.1                                                                                  | Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Kementerian Hukum          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | IKK 7094.1.1                                                                               | Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum                        |               |               | WTP (opini) | WTP (opini) |             | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | IKK 7094.1.2                                                                               | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                            |               |               | 96 Nilai    | 94,66       |             | 98,60%<br>(Tidak Tercapai karena masih terdapat Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi faktor pengurang Nilai sebesar 0,5) |                                       |
|            | IKK 7094.1.3                                                                               | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK               |               |               | 100%        | 100%        |             | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | 7094 EBD 001                                                                               | Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat Jenderal                          | 41,450,000    | 41,429,216    | 99,95%      | 6 Dokumen   | 6 Dokumen   | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            | 7094 EBD 955                                                                               | Layanan Manajemen Keuangan                                               | 4,337,439,000 | 4,329,192,591 | 99,81%      | 14 Dokumen  | 14 Dokumen  | 100%                                                                                                                                 |                                       |
|            |                                                                                            |                                                                          |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | 7095                                                                                       | PERENCANAAN DAN ORGANISASI                                               | 9,348,071,000 | 9,323,869,445 | 99,74%      |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | SK 7095.1                                                                                  | Meningkatnya Implementasi SAKIP Kementerian Hukum                        |               |               |             |             |             |                                                                                                                                      |                                       |
|            | IKK 7095.1.1                                                                               | Nilai SAKIP Kementerian Hukum                                            | 681.271.000   | 681.271.000   | 100%        | 78,32 (BB)  | n/a         | Evaluasi SAKIP K/L pada akhir tahun oleh KemenPANRB sehingga belum dapat dilakukan perhitungan capaian                               |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              |                                                                            | BELANJA           |                 |         | TARGET        | KINERJA REALISASI | KET                                                                                                                                                        | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                            | ANGGARAN          | REALISASI       | %       |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | SK 7095.2    | Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan Agile                        |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7095.2.1 | Nilai Indeks Kapabilitas Kelembagaan                                       |                   |                 |         | 1,60 (C)      | n/a               | Termasuk dalam IKK baru, belum dapat dinilai dan akan masuk dalam periode penilaian di tahun 2026                                                          |                                       |
|        | IKK 7095.2.2 | Indeks Pelayanan Publik                                                    |                   |                 |         | 4,52 Indeks   | 4,58 Indeks       | 101,32%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | IKK 7095.2.3 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kemenkum              |                   |                 |         | 3,16 Nilai    | n/a               | Hasil penilaian tahun 2025 telah dilakukan oleh BSK untuk periode survei Jan - Okt                                                                         |                                       |
|        | IKK 7095.2.4 | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik                          |                   |                 |         | 82,50         | n/a               | Belum dilakukan penilaian                                                                                                                                  |                                       |
|        | SK 7095.3    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran Kementerian Hukum            |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7095.3.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum                   |                   |                 |         | 90,5          | 98,86             | 108,64%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | IKK 7095.3.2 | Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum                           |                   |                 |         | 91            | n/a               | Nilai belum keluar                                                                                                                                         |                                       |
|        | SK 7095.4    | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum             |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7095.4.1 | Persentase Rekomendasi LHE RB yang ditindaklanjuti                         |                   |                 |         | 100%          | 100%              | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | IKK 7095.4.2 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB                                     |                   |                 |         | 100%          | 100%              | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                | 2,264,370,000     | 2,249,405,702   | 99.34%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 001 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian                           | 154,297,000       | 154,150,675     | 99.91%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 002 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit Sekretariat Jenderal             | 264,621,000       | 263,866,220     | 99.71%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 003 | Penyusunan Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran                        | 2,523,535,000     | 2,519,542,830   | 99.84%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 004 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum     | 3,046,986,000     | 3,046,526,071   | 99.98%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 005 | Layanan Manajemen Kinerja Kementerian                                      | 172,250,000       | 171,936,446     | 99.82%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                            | 3,522,000         | 3,521,919       | 100.00% | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi     | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                  | 780,768,000       | 777,283,286     | 99.55%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7095 EBD 975 | Layanan Manajemen Kinerja Sekretariat Jenderal                             | 137,722,000       | 137,636,296     | 99.94%  | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        |              |                                                                            |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | 7096         | PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN HUKUM | 14,582,360,000    | 2,668,157,373   | 18.30%  |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | SK 7096.1    | Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN                                 |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7096.1.1 | Indeks Pengelolaan Aset                                                    |                   |                 |         | 3,6 Indeks    | n/a               | Hasil penilaian akan dikeluarkan bulan februari tahun 2026                                                                                                 |                                       |
|        | IKK 7096.1.2 | Indeks Tata Kelola Pengadaan                                               |                   |                 |         | 80 Indeks     | 99,87             | 124,83%                                                                                                                                                    |                                       |
|        | 7096 EBA 956 | Layanan BMN                                                                | 14,582,360,000    | 2,668,157,373   | 18.30%  | 15 Laporan    | 15 Laporan        | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        |              |                                                                            |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | 7097         | PELAYANAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN KEMENTERIAN HUKUM              | 1,003,746,357,622 | 776,435,750,218 | 77.35%  |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | SK 7097.1    | Terwujudnya pengawasan kearsipan Kementerian Hukum                         |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7097.1.1 | Nilai Tingkat Pengawasan kearsipan                                         |                   |                 |         | 89,5          | 82                | 91.62% (Tidak Tercapai dikarenakan adanya perubahan organisasi sehingga mempengaruhi pedoman kearsipan dan perubahan IKK sesuai Renstra Tahun 2025 - 2029) |                                       |
|        | SK 7097.2    | Meningkatnya Kepuasan Layanan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal      |                   |                 |         |               |                   |                                                                                                                                                            |                                       |
|        | IKK 7097.2.1 | Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan              |                   |                 |         | 3,70          | 3,67              | 99,18% (Tidak Tercapai dikarenakan adanya perubahan IKK sesuai Renstra Tahun 2025 - 2029)                                                                  |                                       |
|        | 7097 EBA 001 | Layanan BMN Unit Eselon I Setjen                                           | 15,800,000        | 15,800,000      | 100.00% | 1 Layanan     | 1 Layanan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |
|        | 7097 EBA 959 | Layanan Protokol                                                           | 598,222,622       | 598,222,622     | 100.00% | 2 Laporan     | 2 Laporan         | 100%                                                                                                                                                       |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              | BELANJA                                                                                     |                 |                 | TARGET      | KINERJA REALISASI       | KET                     | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | ANGGARAN                                                                                    | REALISASI       | %               |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7097 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                | 5,240,587,000   | 5,240,210,696   | 99.99%      | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7097 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                         | 983,227,944,000 | 755,917,730,331 | 76.88%      | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7097 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                     | 12,179,847,000  | 12,179,840,450  | 100.00%     | 86 Unit                 | 86 Unit                 | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7097 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                  | 2,414,853,000   | 2,414,843,119   | 100.00%     | 6 Unit                  | 6 Unit                  | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7097 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                           | 69,104,000      | 69,103,000      | 100.00%     | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        |              |                                                                                             |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098         | PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM                                        | 170,593,965,000 | 138,362,677,805 | 81.11%      |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | SK 7098.1    | Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | IKK 7098.1.1 | Indeks SPBE Kementerian Hukum                                                               |                 |                 | 4,36 Indeks | 4,36 Indeks             | 100%                    |                                                                                                                                                                                      |
|        | IKK 7098.1.2 | Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum                   |                 |                 | 25%         | 25%                     | 100%                    |                                                                                                                                                                                      |
|        | IKK 7098.1.3 | Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral                                       |                 |                 | 3,39        | 3,39                    | 100%                    |                                                                                                                                                                                      |
|        | SK 7098.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                    |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | IKK 7098.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                         |                 |                 | 3,60        | 3,63                    | 117,09%                 |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 ABO 001 | Kajian Regulasi TI Kementerian Hukum                                                        | 2,534,972,000   | 92,263,200      | 3.64%       | 5 Rekomendasi Kebijakan | 5 Rekomendasi Kebijakan | blokir untuk kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan TI, dokumen Statistik Sektoral dan                                                                                            |
|        | 7098 BMA 001 | Satu Data Kementerian dan Statistik Sektoral                                                | 559,772,000     | 219,957,192     | 39.29%      | 2 Dokumen               | 2 Dokumen               | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7098 CAN 001 | Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusdatin                                          | 135,638,524,000 | 110,494,506,969 | 81.46%      | 36 Unit                 | 36 unit                 | Sesuai dengan target                                                                                                                                                                 |
|        |              |                                                                                             |                 |                 |             |                         |                         | 20%                                                                                                                                                                                  |
|        | 7098 CDS 001 | Layanan Pemeliharaan Data Center dan Server Kementerian Hukum                               | 200,000,000     | 152,070,000     | 76.04%      | 20 Unit                 | 4                       | Dilaksanakan setelah pembukaan blokir pada akhir tahun anggaran. difokuskan pada pemeliharaan sarana pendukung server                                                                |
|        | 7098 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                 | 9,820,000       |                 | 0.00%       | 1 layanan               | 1 layanan               | Layanan dukungan manajemen internal yang anggarannya di blokir pada awal tahun anggaran 2025. untuk pelaksanaan kegiatan layanan internal tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan |
|        | 7098 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                   | 9,900,000       |                 | 0.00%       | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                         | 27,083,084,000  | 26,435,362,343  | 97.61%      | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                     | 556,000,000     | 556,000,000     | 100.00%     | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                       | 43,200,000      |                 | 0.00%       | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                        | 3,520,000       |                 | 0.00%       | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                  | 15,344,000      |                 | 0.00%       | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                   | 68,470,000      |                 | 0.00%       | 1 layanan               | 1 layanan               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 FAB 001 | Sistem Informasi Pusdatin                                                                   | 2,051,340,000   |                 | 0.00%       | 3 Sistem Informasi      | 0 Sistem Informasi      |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 FAI 001 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kementerian                               | 47,460,000      |                 | 0.00%       | 1 Lembaga               | 0 Lembaga               |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7098 FAI 002 | Penyelenggaraan SPBE Kantor Wilayah dan UPT                                                 | 772,079,000     |                 | 0.00%       | 41 Lembaga              | 0 Lembaga               | Anggaran pelaksanaan kegiatan diblokir efisiensi anggaran TA 2025. akan tetapi proses penyelenggaraan SPBE tetap dilaksanakan                                                        |
|        |              |                                                                                             |                 |                 |             |                         |                         | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7098 UAB 001 | Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi                                                       | 1,000,480,000   | 412,518,101     | 41.23%      | 1 Sistem Informasi      | 1 Sistem Informasi      | Dilaksanakan sesuai dengan jadwal                                                                                                                                                    |
|        |              |                                                                                             |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        |              |                                                                                             |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7099         | PENGLOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM                   | 833,021,541,000 | 553,669,126,549 | 66.47%      |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | SK 7099.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                 |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | IKK 7099.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                  |                 |                 | 100%        | 100%                    | 100%                    |                                                                                                                                                                                      |
|        | SK 7099.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                    |                 |                 |             |                         |                         |                                                                                                                                                                                      |
|        | IKK 7099.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                         |                 |                 | 3,60        | 3,63                    | 100,83%                 |                                                                                                                                                                                      |
|        | 7099 EBA 001 | Pengelolaan BMN Kantor Wilayah                                                              | 4,350,590,000   | 1,437,777,632   | 33.05%      | 66                      | 66                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBA 002 | Layanan Kerja Sama                                                                          | 2,005,265,000   | 119,604,436     | 5.96%       | 33                      | 33                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                 | 276,268,000     | 43,212,497      | 15.64%      | 33                      | 33                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                   | 11,470,723,000  | 4,194,811,331   | 36.57%      | 33                      | 33                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                            | 7,298,180,000   | 1,997,661,214   | 27.37%      | 33                      | 33                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                | 4,525,421,000   | 729,788,504     | 16.13%      | 33                      | 33                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                         | 471,991,916,000 | 453,415,751,425 | 96.06%      | 33                      | 33                      | 100%                                                                                                                                                                                 |
|        | 7099 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                     | 68,112,684,000  | 922,753,656     | 1.35%       | 4908                    | 4634                    | 94,42%                                                                                                                                                                               |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                              | BELANJA         |                |         | KINERJA   |           | KET                       | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                              | ANGGARAN        | REALISASI      | %       | TARGET    | REALISASI |                           |                                       |
|        | 7099 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                   | 225,823,004,000 | 80,914,584,493 | 35.83%  | 10737     | 10726     | 99,90%                    |                                       |
|        | 7099 EBC 001 | Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM                                                        | 1,568,121,000   | 302,375,155    | 19.28%  | 33        | 33        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                        | 7,361,224,000   | 2,138,537,331  | 29.05%  | 2814      | 2641      | 93,85%                    |                                       |
|        | 7099 EBD 001 | Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah                                 | 11,468,092,000  | 3,142,045,903  | 27.40%  | 66        | 66        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBD 002 | Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah                                                     | 1,170,608,000   | 199,417,626    | 17.04%  | 99        | 99        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBD 003 | Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan                                                 | 7,247,276,000   | 2,153,133,108  | 29.71%  | 66        | 66        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                         | 1,467,956,000   | 214,107,714    | 14.59%  | 99        | 99        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                   | 615,751,000     | 119,857,840    | 19.47%  | 34        | 34        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                    | 5,370,815,000   | 1,423,785,889  | 26.51%  | 99        | 99        | 100%                      |                                       |
|        | 7099 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                            | 897,647,000     | 199,920,795    | 22.27%  | 33        | 33        | 100%                      |                                       |
|        |              |                                                                                              |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | 7100         | PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I                                                     | 1,405,854,000   | 1,405,520,072  | 99.98%  |           |           |                           |                                       |
|        | SK 7100.1    | Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum                          |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7100.1.1 | Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti |                 |                |         | 80%       | 85,71%    | 107,14%                   |                                       |
|        | SK 7100.2    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal        |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7100.2.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal         |                 |                |         | 75%       | 78,40%    | 104,53%                   |                                       |
|        | SK 7100.3    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP                                                 |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7100.3.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP                                                    |                 |                |         | 90%       | 100%      | 111,11%                   |                                       |
|        | SK 7100.4    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI                                                  |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7100.4.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI                                                     |                 |                |         | 90%       | 100%      | 111,11%                   |                                       |
|        | SK 7100.5    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK                                                 |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7100.5.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK                                                    |                 |                |         | 90%       | 100%      | 111,11%                   |                                       |
|        | 7100 EBD 001 | Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi DKI Jakarta                                     | -               | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | blokir efisiensi anggaran |                                       |
|        | 7100 EBD 002 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat                                   | 22,440,000      | 22,440,000     | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%                      |                                       |
|        | 7100 EBD 003 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah                                  | -               | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | blokir efisiensi anggaran |                                       |
|        | 7100 EBD 004 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara                               | 57,984,000      | 57,983,820     | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%                      |                                       |
|        | 7100 EBD 005 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur                             | -               | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | blokir efisiensi anggaran |                                       |
|        | 7100 EBD 006 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bali                                         | -               | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | blokir efisiensi anggaran |                                       |
|        | 7100 EBD 965 | Layanan Audit Internal                                                                       | 1,325,430,000   | 1,325,096,252  | 99.97%  | 1 laporan | 1 laporan | 100%                      |                                       |
|        |              |                                                                                              |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | 7101         | PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH II                                                    | 1,392,946,000   | 1,392,459,524  | 99.97%  |           |           |                           |                                       |
|        | SK 7101.1    | Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum                          |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7101.1.1 | Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti |                 |                |         | 80%       | 100%      | 125%                      |                                       |
|        | SK 7101.2    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal        |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7101.2.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal         |                 |                |         | 75%       | 71,96%    | 95,94%                    |                                       |
|        | SK 7101.3    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP                                                 |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7101.3.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP                                                    |                 |                |         | 90%       | 100%      | 111,11%                   |                                       |
|        | SK 7101.4 T  | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI                                                  |                 |                |         |           |           |                           |                                       |
|        | IKK 7101.4.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI                                                     |                 |                |         | 90%       | 100%      | 111,11%                   |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |  |                                                                                                     | BELANJA       |               |         | TARGET    | KINERJA   |  | KET     | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|--|---------|---------------------------------------|
|        |  |                                                                                                     | ANGGARAN      | REALISASI     | %       |           | REALISASI |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7101.5</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK</b>                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK</i>                                                    |               |               |         | 90%       | 100%      |  | 111,11% |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 001</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama</i>                                            | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 002</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur</i>                                   | 43,888,000    | 43,862,800    | 99.94%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 003</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat</i>                               | 42,387,000    | 42,381,000    | 99.99%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 004</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Lampung</i>                                      | 39,026,000    | 39,021,400    | 99.99%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 005</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau</i>                               | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 006</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah</i>                            | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 007</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku Utara</i>                                 | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 008</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku</i>                                       | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7101 EBD 965</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Internal</i>                                                                       | 1,267,645,000 | 1,267,194,324 | 99.96%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  |                                                                                                     |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>7102</b>                                                                                         |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH III</b>                                                   | 1,361,706,000 | 1,359,850,940 | 99.86%  |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7102.1</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum</b>                          |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7102.1.1</i>                                                                                 |               |               |         | 80%       | 100%      |  | 125%    |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti</i> |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7102.2</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal</b>        |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7102.2.1</i>                                                                                 |               |               |         | 75%       | 80,84%    |  | 107,8%  |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal</i>         |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7102.3</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP</b>                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7102.3.1</i>                                                                                 |               |               |         | 90%       | 100%      |  | 111,11% |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP</i>                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7102.4</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI</b>                                                  |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7102.4.1</i>                                                                                 |               |               |         | 90%       | 100%      |  | 111,11% |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI</i>                                                     |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7102.5</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK</b>                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7102.5.1</i>                                                                                 |               |               |         | 90%       | 100%      |  | 111,11% |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK</i>                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 001</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama</i>                                            | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 002</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara</i>                               | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 003</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Riau</i>                                         | 60,260,000    | 60,255,920    | 99.99%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 004</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi D.I. Yogyakarta</i>                              | 49,195,000    | 49,186,700    | 99.98%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 005</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku</i>                                       | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 006</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara</i>                            | -             | -             | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 007</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo</i>                                    | 54,284,000    | 54,279,900    | 99.99%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  | <i>7102 EBD 965</i>                                                                                 |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>Layanan Audit Internal</i>                                                                       | 1,197,967,000 | 1,196,128,420 | 99.85%  | 1 laporan | 1 laporan |  | 100%    |                                       |
|        |  |                                                                                                     |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>7103</b>                                                                                         |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>                                                    | 1,374,833,000 | 1,374,306,757 | 99.96%  |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7103.1</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum</b>                          |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7103.1.1</i>                                                                                 |               |               |         | 80%       | 100%      |  | 125%    |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti</i> |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>SK 7103.2</b>                                                                                    |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <b>Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal</b>        |               |               |         |           |           |  |         |                                       |
|        |  | <i>IKK 7103.2.1</i>                                                                                 |               |               |         | 75%       | 84,54%    |  | 112,72% |                                       |
|        |  | <i>Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal</i>         |               |               |         |           |           |  |         |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |              | BELANJA                                                                                      |                |                | TARGET  | KINERJA   |           | KET     | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|
|        |              | ANGGARAN                                                                                     | REALISASI      | %              |         | REALISASI |           |         |                                       |
|        | SK 7103.3    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP                                                 |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7103.3.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP                                                    |                |                | 90%     | 100%      |           | 111,11% |                                       |
|        | SK 7103.4    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI                                                  |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7103.4.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI                                                     |                |                | 90%     | 100%      |           | 111,11% |                                       |
|        | SK 7103.5    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK                                                 |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7103.5.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK                                                    |                |                | 90%     | 100%      |           | 111,11% |                                       |
|        | 7103 EBD 001 | Layanan Audit Kinerja dalam Perkantoran yang Sama                                            | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 002 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat                                   | 60,002,000     | 60,000,500     | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 003 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan                             | 43,528,000     | 43,526,280     | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 004 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat                             | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 005 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah                              | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 006 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat                                  | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 007 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur                          | 55,070,000     | 55,070,000     | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7103 EBD 965 | Layanan Audit Internal                                                                       | 1,216,233,000  | 1,215,709,977  | 99.96%  | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        |              |                                                                                              |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | 7104         | PENGAWASAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH V                                                     | 1,648,438,000  | 1,645,513,848  | 99.82%  |           |           |         |                                       |
|        | SK 7104.1    | Terselesaikannya tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenkum                          |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7104.1.1 | Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti |                |                | 80%     | 100%      |           | 125%    |                                       |
|        | SK 7104.2    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal        |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7104.2.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal         |                |                | 75%     | 80%       |           | 106,67% |                                       |
|        | SK 7104.3    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP                                                 |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7104.3.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP                                                    |                |                | 90%     | 100%      |           | 111,11% |                                       |
|        | SK 7104.4    | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi MRI                                                  |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7104.4.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI                                                     |                |                | 90%     | 100%      |           | 111,11% |                                       |
|        | SK 7104.5 T  | Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi IEPK                                                 |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7104.5.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK                                                    |                |                | 90%     | 100%      |           | 111,11% |                                       |
|        | 7104 EBD 001 | Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama                                            | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7104 EBD 002 | Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi DKI Jakarta                                     | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7104 EBD 003 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Aceh                                         | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7104 EBD 004 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan                             | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7104 EBD 005 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan                           | -              | -              | 100.00% | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7104 EBD 006 | Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat                          | 52,266,000     | 52,108,800     | 99.70%  | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        | 7104 EBD 965 | Layanan Audit Internal                                                                       | 1,596,172,000  | 1,593,405,048  | 99.83%  | 1 laporan | 1 laporan | 100%    |                                       |
|        |              |                                                                                              |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | 7105         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIK LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN HUKUM                       | 24,324,712,000 | 23,754,653,536 | 97.66%  |           |           |         |                                       |
|        | SK 7105.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                  |                |                |         |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7105.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Semua hasil audit BPK)           |                |                | 100%    | 100%      |           | 100%    |                                       |
|        | SK 7105.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                     |                |                |         |           |           |         |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |  |              | BELANJA                                                                                            |                 |                 | TARGET        | KINERJA REALISASI  | KET                | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL                                                                          |
|--------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |              | ANGGARAN                                                                                           | REALISASI       | %               |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | IKK 7105.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                |                 |                 | 3,60 (indeks) | 3,63 (indeks)      | 100,83%            |                                                                                                                |
|        |  | SK 7105.3    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Inspektorat Jenderal                      |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | IKK 7105.3.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Inspektorat Jenderal           |                 |                 | 90            | N/A                | Nilai belum keluar |                                                                                                                |
|        |  | SK 7105.4    | Meningkatnya Kapabilitas APIP                                                                      |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | IKK 71054.1  | Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan Kapabilitas APIP                                  |                 |                 | 88,1%         | 89,47%             | 101,56%            |                                                                                                                |
|        |  | 7105 BMA 001 | Data dan Informasi Publik Unit Inspektorat Jenderal                                                | -               | -               | 100.00%       | 8 Data             | 8 Data             | 100.00%                                                                                                        |
|        |  | 7105 CAN 001 | Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang ITJEN                                             | 132,500,000     | 132,000,000     | 99.62%        | 1 Unit             | 1 Unit             | 100.00%                                                                                                        |
|        |  | 7105 CDS 001 | OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi                                             | 5,000,000       | 5,000,000       | 100.00%       | 5 Unit             | 5 Unit             | 100.00%                                                                                                        |
|        |  | 7105 EBA 001 | Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan                                                       | -               | -               | 100.00%       | 1 Laporan          | 1 Laporan          | 100.00%                                                                                                        |
|        |  | 7105 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                        | 121,028,000     | 117,560,000     | 97.13%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                          | -               | -               | 100.00%       | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                   | 773,006,000     | 751,057,470     | 97.16%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                        | -               | -               | 100.00%       | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                       | 555,986,000     | 541,738,460     | 97.44%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBA 963 | Layanan Data dan Informasi                                                                         | 244,150,000     | 235,174,991     | 96.32%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                | 21,015,210,000  | 20,500,291,925  | 97.55%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                            | 1,298,820,000   | 1,298,612,500   | 99.98%        | 537 Unit           | 537 Unit           | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBC 001 | Peningkatan Kapabilitas APIP                                                                       | -               | -               | 100.00%       | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                              | -               | -               | 100.00%       | 104 orang          | 104 orang          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 002 | Laporan Kinerja Unit Eselon I                                                                      | -               | -               | 100.00%       | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 003 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                        | -               | -               | 100.00%       | 3 Laporan          | 3 Laporan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                               | -               | -               | 100.00%       | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                    | -               | -               | 100.00%       | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                         | -               | -               | 100.00%       | 1 Laporan          | 1 Laporan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                          | 128,710,000     | 123,368,190     | 95.85%        | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                  | 25,302,000      | 24,850,000      | 98.21%        | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7105 FAB 001 | Sistem Informasi Pemerintahan Unit Inspektorat Jenderal                                            | 25,000,000      | 25,000,000      | 100.00%       | 3 Sistem Informasi | 3 Sistem Informasi | 100%                                                                                                           |
|        |  |              |                                                                                                    |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  |              |                                                                                                    |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | 7114         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN AHU                                          | 299,148,621,000 | 221,327,496,973 | 73.99%        |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | SK 7114.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                        |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | IKK 7114.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                         |                 |                 | 100%          | 100%               | 100%               |                                                                                                                |
|        |  | SK 7114.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                           |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | IKK 7114.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                |                 |                 | 3.53          | 3,59               | 101,69%            |                                                                                                                |
|        |  | SK 7114.3    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum            |                 |                 |               |                    |                    |                                                                                                                |
|        |  | IKK 7114.3.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum |                 |                 | 85 (Nilai)    | 98.56 (Nilai)      | 115.95%            |                                                                                                                |
|        |  | 7114 AEF 001 | Layanan Sosialisasi                                                                                | 200,000,000     | -               | 0.00%         | 500 orang          | 500 orang          | 100% Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap dilaksanakan sosialisasi dengan menggunakan media online |
|        |  | 7114 EBA 001 | Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan                                                       | 20,404,365,000  | 20,164,617,178  | 98.83%        | 1 Laporan          | 1 Laporan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7114 EBA 002 | Layanan Kerja Sama                                                                                 | 594,345,000     | 122,806,940     | 20.66%        | 1 Dokumen          | 1 Dokumen          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7114 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                        | 150,566,000     | 86,990,000      | 57.78%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7114 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                          | 458,000,000     | 1,440,000       | 0.31%         | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |
|        |  | 7114 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                   | 5,582,426,000   | 2,917,316,837   | 52.26%        | 1 Layanan          | 1 Layanan          | 100%                                                                                                           |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              | BELANJA                                                                                         |                 |                 | TARGET      | KINERJA     |           | KET                                                                                                      | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              | ANGGARAN                                                                                        | REALISASI       | %               |             | REALISASI   |           |                                                                                                          |                                       |
|        | 7114 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                     | 7,543,943,000   | 581,308,858     | 7.71%       | 1 Layanan   | 1 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                    | 83,323,412,000  | 82,561,391,134  | 99.09%      | 1 Layanan   | 1 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                             | 57,621,300,000  | 55,297,102,949  | 95.97%      | 1 Layanan   | 1 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                         | 51,476,056,000  | 45,366,485,739  | 88.13%      | 497 Unit    | 497 Unit  | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                      | 3,383,000,000   | 1,017,171,755   | 30.07%      | 1 Unit      | 1 Unit    | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBC 001 | Layanan Pengelolaan SDM                                                                         | 13,466,355,000  | 2,701,446,504   | 20.06%      | 1 Laporan   | 1 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                           | 2,132,000,000   | 299,299,812     | 14.04%      | 533 orang   | 533 Orang | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 001 | Penyusunan Program, Informasi Kinerja dan Supervisi Anggaran                                    | 7,228,354,000   | 410,619,596     | 5.68%       | 1 Dokumen   | 1 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 002 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                     | 10,413,394,000  | 1,850,992,481   | 17.78%      | 3 Laporan   | 3 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 003 | Layanan Pengelolaan Anggaran                                                                    | 17,656,998,000  | 1,992,870,465   | 11.29%      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                            | 552,500,000     | 122,860,300     | 22.24%      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                 | 230,000,000     | 54,241,000      | 23.58%      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                      | 508,000,000     | 47,110,900      | 9.27%       | 1 Laporan   | 1 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                       | 3,795,106,000   | 321,621,837     | 8.47%       | 1 Laporan   | 1 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                               | 12,249,161,000  | 5,274,160,438   | 43.06%      | 1 Laporan   | 1 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7114 EBD 975 | Layanan Manajemen Kinerja                                                                       | 179,340,000     | 135,642,250     | 75.63%      | 1 Dokumen   | 1 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        |              |                                                                                                 |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | 7113         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BHP                                              | 38,745,937,000  | 34,661,216,810  |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7113.1    | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BHP                                     |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7113.1.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BHP                          |                 |                 | 100%        | 100%        | 100%      |                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7113.2.1 | Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan                         |                 |                 | 3.1 Indeks  | 3.86 Indeks | 124.52%   |                                                                                                          |                                       |
|        | 7113 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                     | 34,374,000      | 15,733,300      | 45.77%      | 5 Layanan   | 5 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                       | 1,130,797,000   | 630,999,798     | 55.80%      | 4 Layanan   | 4 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                    | 2,323,165,000   | 1,945,683,018   | 83.75%      | 5 Layanan   | 5 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                             | 22,829,742,000  | 21,663,710,471  | 94.89%      | 5 Layanan   | 5 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                         | 9,016,415,000   | 8,857,706,431   | 98.24%      | 350 Unit    | 350 Unit  | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBC 001 | Layanan Pengelolaan SDM                                                                         | 2,008,888,000   | 921,150,654     | 45.85%      | 5 Layanan   | 5 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                           | 264,339,000     | 185,349,775     | 70.12%      | 145 Orang   | 145 Orang | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBD 001 | Layanan Pengelolaan Anggaran                                                                    | 506,588,000     | 131,482,792     | 25.95%      | 5 Dokumen   | 5 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                            | 377,532,000     | 132,249,935     | 35.03%      | 5 Dokumen   | 5 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                 | 174,508,000     | 145,732,780     | 83.51%      | 2 Dokumen   | 2 Dokumen | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                      | 42,092,000      | 11,293,856      | 26.83%      | 5 Laporan   | 5 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                       | 32,241,000      | 20,124,000      | 62.42%      | 5 Laporan   | 5 Laporan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7113 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                               | 5,256,000       |                 | 0.00%       |             |           | (Anggaran di Blokir)                                                                                     |                                       |
|        |              |                                                                                                 |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        |              |                                                                                                 |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | 7122         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL                      | 208,113,139,000 | 191,651,653,944 | 92.09%      |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7122.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                     |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7122.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                      |                 |                 | 100%        | 100%        | 100%      |                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7122.2    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual            |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7122.2.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual |                 |                 | 85 Nilai    | 96,44 Nilai | 113,46%   |                                                                                                          |                                       |
|        | SK 7122.3    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                        |                 |                 |             |             |           |                                                                                                          |                                       |
|        | IKK 7122.3.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                             |                 |                 | 3,37 Indeks | 3,47 Indeks | 102.97%   |                                                                                                          |                                       |
|        | 7122 EBA 001 | Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan                                                    | 13,171,959,000  | 12,620,203,277  | 95.81%      | 1 Layanan   | 1 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        |              |                                                                                                 |                 |                 |             |             |           | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7122 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                     | -               | -               | -           | 1 Layanan   | 1 Layanan | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI. |                                       |
|        | 7122 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                       | 56,357,000      | 56,354,599      | 100.00%     | 1 Layanan   | 1 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |
|        | 7122 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                | 9,904,508,000   | 9,509,084,320   | 96.01%      | 1 Layanan   | 1 Layanan | 100%                                                                                                     |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |  |              | BELANJA                                                                                                 |                 |                | TARGET | KINERJA     |             | KET     | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL                                                                    |
|--------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |              | ANGGARAN                                                                                                | REALISASI       | %              |        | REALISASI   |             |         |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                             | 1,991,070,000   | 1,920,623,496  | 96.46% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                            | 63,047,756,000  | 62,366,093,330 | 98.92% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                     | 111,066,088,000 | 97,453,880,057 | 87.74% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                                 | -               | -              | -      | 600 unit    | 600 unit    | 100%    | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI. |
|        |  | 7122 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                              | -               | -              | -      | 1 unit      | 1 unit      | 100%    | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI. |
|        |  | 7122 EBC 001 | Layanan Pengelolaan SDM                                                                                 | 1,509,854,000   | 1,028,217,629  | 68.10% | 4 layanan   | 4 layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                                   | 600,000         | -              | 0.00%  | 6 layanan   | 6 layanan   | 100%    | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI. |
|        |  | 7122 EBD 001 | Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran                                                               | 915,738,000     | 757,342,843    | 82.70% | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBD 002 | Fasilitasi Peningkatan dan Evaluasi Kinerja                                                             | 2,424,229,000   | 2,310,335,694  | 95.30% | 5 dokumen   | 5 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBD 003 | Layanan Pengelolaan Keuangan                                                                            | 1,229,113,000   | 1,204,805,652  | 98.02% | 3 dokumen   | 3 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                    | 301,040,000     | 300,974,608    | 99.98% | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                         | 124,240,000     | 118,592,756    | 95.45% | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                              | 2,000,000       | -              | 0.00%  | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%    | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI. |
|        |  | 7122 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                               | 455,181,000     | 438,538,014    | 96.34% | 2 dokumen   | 2 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7122 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                       | -               | -              | -      | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 100%    | terkena efisiensi tapi kinerja tetap max. belanja anggaran dan belanja realisasinya sesuai dengan SAKTI. |
|        |  | 7122 PFA 001 | Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia   | 1,913,406,000   | 1,566,607,669  | 81.88% | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7130         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PP                                       | 55,170,689,000  | 53,651,345,269 | 97.25% |             |             |         |                                                                                                          |
|        |  | SK 7130.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                             |                 |                |        |             |             |         |                                                                                                          |
|        |  | IKK 7130.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                              |                 |                |        | 100%        | 100%        | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | SK 7130.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                                |                 |                |        |             |             |         |                                                                                                          |
|        |  | IKK 7130.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                     |                 |                |        | 3,87 Indeks | 3,88 Indeks | 100.26% |                                                                                                          |
|        |  | SK 7130.3    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-Undangan            |                 |                |        |             |             |         |                                                                                                          |
|        |  | IKK 7130.3.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-Undangan |                 |                |        | 90 Nilai    | 89,55 Nilai | 99.50%  |                                                                                                          |
|        |  | 7130 EBA 003 | Layanan Kerja Sama                                                                                      | 339,855,000     | 335,087,101    | 98.60% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7130 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                             | 89,012,000      | 88,874,520     | 99.85% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7130 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                               | 112,740,000     | 112,079,944    | 99.41% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |
|        |  | 7130 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                        | 7,104,000       | 7,060,000      | 99.38% | 1 Layanan   | 1 Layanan   | 100%    |                                                                                                          |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              | BELANJA                                                                                            |                |                | TARGET | KINERJA   |           | KET     | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|
|        |              | ANGGARAN                                                                                           | REALISASI      | %              |        | REALISASI |           |         |                                       |
|        | 7130 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                        | 39,386,000     | 37,874,896     | 96.16% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                       | 490,035,000    | 487,633,416    | 99.51% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                | 33,366,464,000 | 32,703,990,990 | 98.01% | 2 Layanan | 2 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                            | 3,741,830,000  | 3,126,186,022  | 83.55% | 104 Unit  | 104 Unit  | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                         | 14,943,000,000 | 14,745,452,408 | 98.68% | 4.236 m2  | 4.236 m2  | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                              | 310,000,000    | 308,482,068    | 99.51% | 245 Orang | 245 Orang | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 001 | Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran                                      | 102,997,000    | 96,327,610     | 93.52% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 003 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                        | 612,163,000    | 606,317,163    | 99.05% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                               | 279,518,000    | 277,880,066    | 99.41% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                    | 142,656,000    | 140,805,065    | 98.70% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                         | 201,900,000    | 201,831,032    | 99.97% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                          | 350,903,000    | 342,515,897    | 97.61% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7130 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                  | 41,126,000     | 32,947,071     | 80.11% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        |              |                                                                                                    |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        |              |                                                                                                    |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | 7137         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPHN                                       | 46,409,888,000 | 43,552,953,634 | 93.84% |           |           |         |                                       |
|        | SK 7137.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                        |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7137.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                         |                |                | 100%   | 100%      |           | 100%    |                                       |
|        | SK 7137.2    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional            |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7137.2.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional |                |                | 90     | 90,67     |           | 100,74% |                                       |
|        | SK 7137.3    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                           |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7137.3.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                |                |                | 3,85   | 3,87      |           | 100,52% |                                       |
|        | 7137 EBA 001 | Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan                                                       | 73,188,000     | 46,446,950     | 63.46% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 002 | Layanan Kerja Sama                                                                                 | 324,252,000    | 70,347,100     | 21.70% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                        | 104,280,000    | 30,684,020     | 29.42% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                          | 542,329,000    | 173,055,267    | 31.91% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                   | 188,889,000    | 125,477,627    | 66.43% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                        | 201,888,000    | 41,497,216     | 20.55% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                       | 412,158,000    | 337,784,948    | 81.96% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                | 33,492,980,000 | 32,987,838,472 | 98.49% | 1 Layanan | 1 Layanan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                            | 4,505,150,000  | 4,491,890,257  | 99.71% | 447 unit  | 462 unit  | 103.4%  |                                       |
|        | 7137 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                         | 3,689,000,000  | 3,671,460,622  | 99.52% | 653 m2    | 653 m2    | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                              | 612,530,000    | 603,014,491    | 98.45% | 239 orang | 252 orang | 105.44% |                                       |
|        | 7137 EBD 002 | Laporan Kinerja Unit Eselon I                                                                      | 56,625,000     | 21,335,990     | 37.68% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBD 003 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                        | 909,869,000    | 281,642,623    | 30.95% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                               | 440,947,000    | 433,641,441    | 98.34% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                    | 131,116,000    | 10,039,700     | 7.66%  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                         | 508,725,000    | 136,767,574    | 26.88% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                          | 164,099,000    | 62,466,336     | 38.07% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        | 7137 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                  | 51,863,000     | 27,563,000     | 53.15% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100%    |                                       |
|        |              |                                                                                                    |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        |              |                                                                                                    |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | 7138         | DUKUNGAN MANAJEMEN BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM                                                  | 39,463,906,000 | 38,831,041,711 | 98.40% |           |           |         |                                       |
|        | SK 7138.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                        |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7138.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                         |                |                | 100%   | 100%      |           | 100%    |                                       |
|        | SK 7138.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                           |                |                |        |           |           |         |                                       |
|        | IKK 7138.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                |                |                | 3,74   | 3,75      |           | 100,26% |                                       |
|        | SK 7138.3    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum            |                |                |        |           |           |         |                                       |

DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025

| URAIAN |  |              | BELANJA                                                                                                           |                |                | TARGET  | KINERJA                 |                         | KET                                                            | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |  |              | ANGGARAN                                                                                                          | REALISASI      | %              |         | REALISASI               |                         |                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7138.3.1 | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum                |                |                | 90      | 93,08                   |                         | 103,42%                                                        |                                       |
|        |  | 7138 EBA 003 | Layanan Kerja Sama                                                                                                | 0              | 0              | 100.00% | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100% Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai |                                       |
|        |  | 7138 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                                       | 12,571,000     | 12,567,000     | 99.97%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                                         | -              | -              | 100.00% | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100% Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai |                                       |
|        |  | 7138 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                                  | -              | -              | 100.00% | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100% Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai |                                       |
|        |  | 7138 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                                       | -              | -              | 100.00% | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100% Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai |                                       |
|        |  | 7138 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                                      | 142,990,000    | 142,808,744    | 99.87%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                               | 19,161,962,000 | 18,702,959,831 | 97.60%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                                           | 3,402,245,000  | 3,327,231,810  | 97.80%  | 909 unit                | 909 unit                | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                                        | 16,553,616,000 | 16,470,685,940 | 99.50%  | 1 unit                  | 1 unit                  | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                                             | 26,579,000     | 26,482,000     | 99.64%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 001 | Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran                                                     | 12,559,000     | 12,363,200     | 98.44%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 002 | Laporan Kinerja Unit Eselon I                                                                                     | 2,920,000      | 550,000        | 18.84%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 003 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                                       | 17,565,000     | 16,491,925     | 93.89%  | 1 Laporan               | 1 Laporan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                              | 7,701,000      | 5,474,000      | 71.08%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                                   | 63,676,000     | 55,041,438     | 86.44%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                                        | 25,408,000     | 25,099,800     | 98.79%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                                         | 31,514,000     | 30,806,000     | 97.75%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7138 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                                 | 2,600,000      | 2,480,023      | 95.39%  | 1 Layanan               | 1 Layanan               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7139         | ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM                          | 2,914,866,000  | 2,769,978,144  | 95.03%  |                         |                         |                                                                |                                       |
|        |  | SK 7139.1    | Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum              |                |                |         |                         |                         |                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7139.1.1 | Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum yang ditindaklanjuti      |                |                | 95%     | 100%                    |                         | 105,26%                                                        |                                       |
|        |  | 7139 ABD 001 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                                           | 388,262,000    | 375,827,818    | 96.80%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7139 ABD 002 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum                                                                    | 611,738,000    | 491,114,152    | 80.28%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7139 QMA 001 | Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH)                                                                         | 1,914,866,000  | 1,903,036,174  | 99.38%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7140         | ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM                                                                       | 1,209,579,000  | 1,208,994,298  | 99.95%  |                         |                         |                                                                |                                       |
|        |  | SK 7140.1    | Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum                                  |                |                |         |                         |                         |                                                                |                                       |
|        |  | IKK 7140.1.1 | Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti                          |                |                | 95%     | 100%                    |                         | 105,26%                                                        |                                       |
|        |  | 7140 ABD 001 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum                                                                    | 167,104,000    | 167,029,607    | 99.96%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7140 ABD 002 | Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Bantuan Hukum       | 343,392,000    | 343,243,842    | 99.96%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7140 BMA 001 | Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di Kementerian Hukum | 489,504,000    | 489,214,577    | 99.94%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7140 PBD 001 | Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha LLP                                                                 | 209,579,000    | 209,506,272    | 99.97%  | 1 rekomendasi kebijakan | 1 rekomendasi kebijakan | 100%                                                           |                                       |
|        |  | 7141         | ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM                                                                     | 1,000,000,000  | 996,277,410    | 99.63%  |                         |                         |                                                                |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                                                                                                                   | BELANJA        |                |         | TARGET                  | KINERJA                 |  | KET                                                                                                                                                          | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                                                                                   | ANGGARAN       | REALISASI      | %       |                         | REALISASI               |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | SK 7141.1    | Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum                                                                                                |                |                |         |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7141.1.1 | Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Tata Kelola Hukum yang ditindaklanjuti                                                                                        |                |                |         | 95%                     | 100%                    |  | 105,26%                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7141 ABD 001 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Tata Kelola Organisasi                                                                                                                             | 376,155,000    | 373,861,564    | 99.39%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7141 ABD 002 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengawasan Internal                                                                                                                                | 840,000        | 840,000        | 100.00% | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7141 ABD 003 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur                                                                                                          | 3,630,000      | 3,630,000      | 100.00% | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7141 BMA 001 | Pengukuran Indeks Layanan Sekretariat di lingkungan Kementerian Hukum                                                                                                             | 619,375,000    | 617,945,846    | 99.77%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7142         | ANALISIS STRATEGI EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DAN PUBLIKASI HASIL ANALISIS KEBIJAKAN                                                                                                 | 1,000,000,000  | 978,606,413    | 97.86%  |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | SK 7142.1    | Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum                                                                           |                |                |         |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7142.1.1 | Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum yang ditindaklanjuti                                                                   |                |                |         | 95%                     | 100%                    |  | 105,26%                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7142 ABD 001 | Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum                                                              | 158,715,000    | 157,902,378    | 99.49%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7142 ABD 002 | Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum                                                                                                           | 29,133,000     | 28,788,770     | 98.82%  | 4 rekomendasi kebijakan | 4 rekomendasi kebijakan |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7142 BMA 001 | Data dan Informasi Publik                                                                                                                                                         | 285,809,000    | 285,635,427    | 99.94%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7142 BMA 002 | Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                 | 188,603,000    | 187,896,538    | 99.63%  | 1 dokumen               | 1 dokumen               |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7142 FAB 001 | Data dan Informasi Digital Badan Strategi Kebijakan Hukum                                                                                                                         | 37,514,000     | 35,373,300     | 94.29%  | 1 sistem informasi      | 1 sistem informasi      |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7142 FAB 002 | Sistem Informasi Badan Strategi Kebijakan Hukum                                                                                                                                   | 300,226,000    | 283,010,000    | 94.27%  | 1 sistem informasi      | 1 sistem informasi      |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7143         | ANALISIS STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH                                                                                                                                      | 11,681,066,000 | 3,386,482,798  | 28.99%  |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | SK 7143.1    | Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah                                                                                                                |                |                |         |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7143.1.1 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah                                                                                                          |                |                |         | 95%                     | 100%                    |  | 105,26%                                                                                                                                                      |                                       |
|        | 7143 ABD 001 | Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah                                                                                                                                   | 10,985,726,000 | 3,111,325,377  | 28.32%  | 1 rekomendasi           | 100%                    |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7143 AEF 001 | Diskusi Strategi Kebijakan Hukum                                                                                                                                                  | 695,340,000    | 275,157,421    | 39.57%  | 1 Laporan               | 1 Laporan               |  | 100%                                                                                                                                                         |                                       |
|        | 7144         | PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN                                                                                                                                              | 99,157,850,000 | 69,001,389,252 | 69.59%  |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | SK 7144.1    | Meningkatnya Kualitas pendidikan pada Politeknik Pengayoman Indonesia                                                                                                             |                |                |         |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7144.1.1 | Persentase hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks SINTA terhadap total hasil penelitian Politeknik Pengayoman Indonesia |                |                |         | 30 %                    | 83.90%                  |  | Total Penelitian yang telah dipublikasi yaitu sebanyak 540 Penelitian                                                                                        |                                       |
|        | IKK 7144.1.2 | Persentase IPK Politeknik Pengayoman Indonesia dengan predikat minimal "Sangat Memuaskan"                                                                                         |                |                |         | 50 %                    | 52.18 %                 |  | Tahun 2025 Poltekpin meluluskan 644 Taruna dengan rincian 336 Taruna lulus dengan predikat Sangat Memukan dan 308 Taruna lulus dengan predikat dengan pujian |                                       |
|        | IKK 7144.1.3 | Persentase jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Politeknik Pengayoman Indonesia (Dosen/Taruna)                                                                       |                |                |         | 75 %                    | 85.5 %                  |  | Total Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu 432 kegiatan                                                                                       |                                       |
|        | SK 7144.2    | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia                                                                                           |                |                |         |                         |                         |  |                                                                                                                                                              |                                       |
|        | IKK 7144.2.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia                                                                                |                |                |         | 100 %                   | 100 %                   |  |                                                                                                                                                              |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                                     | BELANJA         |                 |        | TARGET    | KINERJA REALISASI | KET                                                                             | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                     | ANGGARAN        | REALISASI       | %      |           |                   |                                                                                 |                                       |
|        | IKK 7144.2.2 | Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Politeknik Pengayoman Indonesia terhadap Layanan Kesekretariatan |                 |                 |        | 3,92      | -                 | Belum melaksanakan survey dikarenakan untuk Poltekipin belum mempunyai akun 3AS |                                       |
|        | 7144 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                         | 12,976,000      |                 | 0.00%  | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%<br>Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai               |                                       |
|        | 7144 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                        | 2,100,516,000   | 1,126,342,185   | 53.62% | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                 | 22,352,253,000  | 21,682,569,540  | 97.00% | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                             | 2,995,628,000   | 563,839,041     | 18.82% | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                               | 4,621,188,000   | 3,995,715,186   | 86.47% | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U01 | Pendidikan Taruna Tk I Politeknik Ilmu Pemasarakatan                                                | 7,236,397,000   | 5,475,784,400   | 75.67% | 280 Orang | 280 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U02 | Pendidikan Taruna Tk II Politeknik Ilmu Pemasarakatan                                               | 6,581,182,000   | 4,029,226,800   | 61.22% | 280 Orang | 280 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U03 | Pendidikan Taruna Tk III Politeknik Ilmu Pemasarakatan                                              | 8,108,731,000   | 4,981,023,600   | 61.43% | 350 Orang | 350 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U04 | Pendidikan Taruna Tk IV Politeknik Ilmu Pemasarakatan                                               | 9,256,199,000   | 4,599,521,700   | 49.69% | 347 Orang | 347 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U05 | Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan                                               | 3,428,443,000   | 2,737,552,500   | 79.85% | 280 Orang | 280 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U06 | Pendidikan Taruna Tingkat I Politeknik Imigrasi                                                     | 5,825,221,000   | 3,953,324,100   | 67.87% | 210 Orang | 210 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U07 | Pendidikan Taruna Tingkat II Politeknik Imigrasi                                                    | 7,474,471,000   | 4,144,512,900   | 55.45% | 309 Orang | 309 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U08 | Pendidikan Taruna Tingkat III Politeknik Imigrasi                                                   | 7,674,127,000   | 4,428,047,900   | 57.70% | 311 Orang | 311 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U09 | Pendidikan Taruna Tingkat IV Politeknik Imigrasi                                                    | 8,537,795,000   | 5,215,984,600   | 61.09% | 304 Orang | 304 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBC U10 | Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi                                                         | 2,444,833,000   | 1,978,916,500   | 80.94% | 210 Orang | 210 Orang         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                | 29,815,000      | -               | 0.00%  | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%<br>Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai               |                                       |
|        | 7144 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                     | 316,564,000     | 89,028,300      | 28.12% | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7144 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                          | 106,341,000     | -               | 0.00%  | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%<br>Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai               |                                       |
|        | 7144 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                           | 55,170,000      | -               | 0.00%  | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%<br>Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai               |                                       |
|        |              |                                                                                                     |                 |                 |        |           |                   |                                                                                 |                                       |
|        | 7148         | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPSDM HUKUM                                          | 167,060,435,000 | 109,336,585,300 | 65.45% |           |                   |                                                                                 |                                       |
|        | SK 7148.1    | Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                         |                 |                 |        |           |                   |                                                                                 |                                       |
|        | IKK 7148.1.1 | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK                                          |                 |                 |        | 100%      | 100%              | 100%                                                                            |                                       |
|        | SK 7148.2    | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen                            |                 |                 |        |           |                   |                                                                                 |                                       |
|        | IKK 7148.2.1 | Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen                                                 |                 |                 |        | 3.67      | 3.7               | 100.82%                                                                         |                                       |
|        | SK 7148.3    | Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup BPSDM Hukum                                |                 |                 |        |           |                   |                                                                                 |                                       |
|        | IKK 71483.1  | Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup BPSDM Hukum                     |                 |                 |        | 90        | 76.13             | 84.59%                                                                          |                                       |
|        | 7148 EBA 001 | Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan                                                        | 12,320,000      | -               | 0.00%  | 1 Dokumen | 1 Dokumen         | 100%<br>Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai               |                                       |
|        | 7148 EBA 003 | Layanan Kerja Sama                                                                                  | 88,850,000      | 10,414,800      | 11.72% | 1 Dokumen | 1 Dokumen         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7148 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                         | 170,445,000     | 40,666,200      | 23.86% | 1 Dokumen | 1 Dokumen         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7148 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                           | 458,000,000     | 167,641,580     | 36.60% | 2 Layanan | 2 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7148 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                    | 119,550,000     | 18,584,000      | 15.54% | 3 Layanan | 3 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7148 EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal                                                         | 3,685,475,000   | 339,740,449     | 9.22%  | 1 Dokumen | 1 Dokumen         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7148 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                        | 1,477,004,000   | 431,140,090     | 29.19% | 1 Layanan | 1 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |
|        | 7148 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                 | 89,243,850,000  | 71,716,413,522  | 80.36% | 2 Layanan | 2 Layanan         | 100%                                                                            |                                       |

**DATA CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM PADA PRIORITAS NASIONAL 2025**

| URAIAN |              |                                                                                                           | BELANJA        |                |        | TARGET      | KINERJA     |  | KET                                                               | KETERKAITAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |              |                                                                                                           | ANGGARAN       | REALISASI      | %      |             | REALISASI   |  |                                                                   |                                       |
|        | 7148 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                                   | 32,193,837,000 | 31,606,535,299 | 98.18% | 3,522 Unit  | 3,522 Unit  |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                                | 16,766,684,000 | 1,775,158,009  | 10.59% | 4 Unit      | 4 Unit      |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                                     | 702,393,000    | 624,372,997    | 88.89% | 246 orang   | 246 orang   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 001 | Penyusunan Program, Informasi Kinerja, dan Supervisi Anggaran                                             | 2,233,730,000  | 158,651,431    | 7.10%  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 002 | Laporan Kinerja Unit Eselon I                                                                             | 38,476,000     | -              | 0.00%  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  | 100%<br>Anggaran Terdampak Efisiensi Namun Kinerja Tetap Tercapai |                                       |
|        | 7148 EBD 003 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                               | 16,127,767,000 | 1,447,466,626  | 8.97%  | 3 Laporan   | 3 Laporan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                      | 2,173,013,000  | 149,465,600    | 6.88%  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                           | 250,042,000    | 184,005,450    | 73.59% | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                                | 632,639,000    | 308,928,947    | 48.83% | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                                 | 599,904,000    | 355,313,300    | 59.23% | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7148 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                         | 86,456,000     | 2,087,000      | 2.41%  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149         | MENINGKATKAN LAYANAN PELATIHAN HUKUM DI WILAYAH                                                           | 31,250,691,000 | 16,795,498,376 | 53.74% |             |             |  |                                                                   |                                       |
|        | SK 7149.1    | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum              |                |                |        |             |             |  |                                                                   |                                       |
|        | IKK 7149.1.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum   |                |                |        | 100%        | 100%        |  | 100%                                                              |                                       |
|        | IKK 7149.1.2 | Indeks kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan  |                |                |        | 3.92        | 3.98        |  | 101.53%                                                           |                                       |
|        | SK 7149.3    | Meningkatnya Layanan Pelatihan ASN Kementerian Hukum di wilayah                                           |                |                |        |             |             |  |                                                                   |                                       |
|        | IKK 7149.3.1 | Persentase peserta yang lulus pelatihan terhadap total peserta pelatihan ASN Kementerian Hukum di Wilayah |                |                |        | 95%         | 99.87%      |  | 105%                                                              |                                       |
|        |              | Layanan Kerja Sama                                                                                        | 80,140,000     | 56,289,000     | 70.24% | 2 layanan   | 2 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBA 956 | Layanan BMN                                                                                               | 27,371,000     | 23,362,600     | 85.36% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                                                                 | 303,017,000    | 117,822,118    | 38.88% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBA 959 | Layanan Protokol                                                                                          | 395,454,000    | 292,216,339    | 73.89% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBA 962 | Layanan Umum                                                                                              | 1,031,738,000  | 605,340,357    | 58.67% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBA 994 | Layanan Perkantoran                                                                                       | 12,257,053,000 | 12,062,115,900 | 98.41% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBB 951 | Layanan Sarana Internal                                                                                   | 2,075,664,000  | 724,727,000    | 34.92% | 66 Unit     | 66 Unit     |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBB 971 | Layanan Prasarana Internal                                                                                | 4,472,332,000  |                | 0.00%  | 4 Unit      | 0 Unit      |  | Anggaran Terdampak Efisiensi                                      |                                       |
|        | 7149 EBC 002 | Layanan Pelatihan Dasar CPNS                                                                              | 8,290,447,000  | 2,022,919,546  | 24.40% | 1,615 orang | 1,615 orang |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBC 954 | Layanan Manajemen SDM                                                                                     | 646,645,000    | 376,167,777    | 58.17% | 23 orang    | 23 orang    |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBD 003 | Fasilitasi Evaluasi Kinerja                                                                               | 120,647,000    | 8,291,365      | 6.87%  | 1 layanan   | 1 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                                                      | 315,751,000    | 82,743,485     | 26.21% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBD 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                                                           | 480,002,000    | 94,166,332     | 19.62% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBD 955 | Layanan Manajemen Keuangan                                                                                | 312,153,000    | 139,294,743    | 44.62% | 5 layanan   | 5 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBD 961 | Layanan Reformasi Kinerja                                                                                 | 436,277,000    | 184,079,314    | 42.19% | 3 layanan   | 3 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |
|        | 7149 EBD 974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                                                                         | 6,000,000      | 5,962,500      | 99.38% | 1 layanan   | 1 layanan   |  | 100%                                                              |                                       |

DATA ANGGARAN BERASAL DARI BI DJA



**KEMENTERIAN HUKUM**  
REPUBLIK INDONESIA



**Website**  
[www.kemenkum.go.id](http://www.kemenkum.go.id)



**Layanan Pengaduan**  
0811-1377-803